KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

TRIWULAN III

TAHUN 2025

LAPORAN KINERJA

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

MANTEEP

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin serta rahmat-Nya penyusunan "Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Triwulan III Tahun 2025" dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen kami dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional dan berintegritas.

Penyusunan laporan ini mengacu pada regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Dengan dasar tersebut, laporan ini diharapkan mampu menyajikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program dan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap selama Triwulan III tahun 2025.

Laporan ini tidak hanya menampilkan data dan informasi capaian secara kuantitatif, tetapi juga dimaksudkan sebagai alat ukur dan evaluasi terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan, manajemen pelabuhan, dan kinerja kelembagaan secara makro dan mikro. Melalui laporan ini, kami berupaya mengidentifikasi berbagai pencapaian sekaligus tantangan yang masih perlu dibenahi sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pelabuhan yang baik (*good governance*).

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sepenuhnya sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara ideal. Namun, berkat kerja keras, dedikasi, dan dukungan dari seluruh jajaran, pelaksanaan program dan kegiatan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Untuk itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan laporan ini.

Akhir kata, besar harapan kami agar laporan ini dapat memberikan manfaat, menjadi bahan evaluasi yang konstruktif, serta mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan yang lebih produktif, efektif, dan efisien, baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan anggaran, maupun koordinasi pelaksanaan program di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

Cilacap, **17** Oktober 2025

Kepala Pelabuhan Perikanan

Samudera Cilacap

Imas Masriah, S.Pi.,M.Pi.

NIP. 19750414 200212 2 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vii
RINGKASAN EKSEKUTIF viii
PENDAHULUAN 1
Latar Belakang 1
Tujuan 3
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 4
Keragaan Pegawai 11
Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 2025 15
PERENCANAAN KINERJA 17
Rencana Strategis 17
Rencana Kerja Tahun 2025 19
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 19
Pengukuran Kinerja 23
AKUNTABILITAS KINERJA 26
Capaian Kinerja Organisasi 26
Evaluasi dan Analisis Kinerja 27
Capaian IKU PPS Cilacap 30
Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025 67
PENUTUP 70
Kesimpulan 70
Permasalahan dan Tindaklanjut 71
Penutup 74
LAMPIRAN DAN DATA DUKUNG 76

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Rencana Kerja PPS Cilacap TA 2025 19
Tabel 2 Perjanjian Kinerja PPS Cilacap TA 2025 21
Tabel 3 Indikator dan Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2025 Revisi April 23
Tabel 4 Bobot validasi IKU 24
Tabel 5 Klasifikasi target indikator kinerja 25
Tabel 6 Status Capaian Nilai Kinerja 25
Tabel 7 Capaian IKU PPS Cilacap Triwulan III Tahun 2025 33
Tabel 8 Capaian IKU 1 Triwulan III Tahun 2025 35
Tabel 9 Perbandingan capaian realisasi IKU 1 Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2025 36
Tabel 10 Capaian Realisasi IKU 1 Triwulan III terhadap target Tahun 2025 37
Tabel 11 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 1 39
Tabel 12 Capaian IKU 2 Triwulan III Tahun 2025 39
Tabel 13 Perbandingan capaian realisasi IKU 2 Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2025 40
Tabel 14 Capaian Realisasi IKU 2 Triwulan III terhadap target Tahun 2025 41
Tabel 15 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 2 43
Tabel 16 Capaian IKU 4 Triwulan III Tahun 2025 45
Tabel 17 Perbandingan capaian realisasi IKU 4 Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2025 45
Tabel 18 Realisasi IKU 4 Triwulan III terhadap target Tahun 2025 46
Tabel 19 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 4 49
Tabel 20 Capaian IKU 7 Triwulan III Tahun 2025 50
Tabel 21 Perbandingan capaian realisasi IKU 7 Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2025 50
Tabel 22 Capaian Realisasi IKU 7 Triwulan III terhadap target Tahun 2025 52
Tabel 23 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 7 54
Tabel 24 Capaian IKU 8 Triwulan III Tahun 2025 55

Tabel 25 Perbandingan capaian realisasi IKU 8 Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2025 56
Tabel 26 Capaian Realisasi IKU 8 Triwulan III terhadap target Tahun 2025..... 56
Tabel 27 Capaian IKU 11 Triwulan III Tahun 2025 59
Tabel 28 Perbandingan capaian realisasi IKU 11 Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2025 60
Tabel 29 Capaian Realisasi IKU 11 Triwulan III terhadap target Tahun 2025 60
Tabel 30 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 11 61
Tabel 31 Capaian IKU 14 Triwulan III Tahun 2025 62
Tabel 32 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 11 64
Tabel 33 Capaian IKU 18 Triwulan III Tahun 2025..... 65
Tabel 34 Perbandingan capaian realisasi IKU 18 Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2025 65
Tabel 35 Capaian Realisasi IKU 18 Triwulan III terhadap target Tahun 2025 66
Tabel 36 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 18 67

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Struktur Organisasi Pelabuhan Samudera Cilacap Tahun 2025 5
Gambar 2 Diagram Pie Jumlah Pegawai PPS Cilacap..... 11
Gambar 3 Diagram Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu di PPS Cilacap..... 13
Gambar 4 Diagram Tingkat Pendidikan Pegawai di PPS Cilacap..... 14
Gambar 5 Diagram perbandingan gender pegawai di PPS Cilacap..... 14
Gambar 6 Nilai NKO PPS Cilacap Aplikasi Kinerjaku Periode Triwulan III Tahun 2025 27
Gambar 7 *Screen shot* Aplikasi SIDAK per 8 Oktober 2025 59

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPS Cilacap) merupakan unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan dari Direkorat Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap tanggal 30 Desember 2020.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, yang diikuti dengan membuat Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kinerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja Tahunan secara konsisten, terus menerus, dan berkesinambungan PPS Cilacap berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Kegiatan. Laporan Kinerja (LKj) merupakan informasi tertulis yang menjelaskan tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

PPS Cilacap telah menetapkan 5 (lima) sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam Tahun 2025. Kelima sasaran kegiatan tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 18 (delapan belas) indikator kinerja utama (IKU) dengan rincian 8 (delapan) indikator kinerja dengan periode pengukuran triwulanan, 3 (tiga) indikator kinerja semesteran, dan 7 (tujuh) indikator kinerja dengan periode perhitungan tahunan. Periode Triwulan III Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa dari lima sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sasaran strategis yang dilaksanakan pada periode Triwulan III Tahun 2025 ini tercapai dengan baik

dalam percapaian progres kegiatan. Capaian kinerja tersebut tercermin dalam hasil pengukuran melalui aplikasi resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id), di mana PPS Cilacap mencatatkan nilai capaian sebesar 118,23% pada Triwulan III. Sementara itu, akumulasi capaian hingga akhir Triwulan III mencapai 117,79%. Kedua nilai tersebut berada dalam kategori "Istimewa" (rentang nilai 110–120) dan ditandai dengan indikator berwarna biru,dengan rincian sebagai berikut:

1. IKU 1 - Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebanyak Rp. 3.996,61 Juta atau 157,96% dari target Triwulan III yaitu Rp. 2.530,18 Juta;
2. IKU 2 - Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebanyak 26.063,95 Ton atau 130.32% dari target Triwulan III yaitu 20.000 Ton;
3. IKU 4 - Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai dengan Nilai 96,5 atau sebesar 114,88% dari target Triwulan III yaitu Nilai 84;
4. IKU 7 - Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai Nilai 94,66 atau sebesar 314,49% dari target Triwulan III yaitu Nilai 30,1;
5. IKU 8 - Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan tercapai sebanyak 1.283 Kapal atau 188,68% dari target Triwulan III yaitu 680 Kapal;
6. IKU 11 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebesar 100% atau 117,65% dari target Triwulan III yaitu 85%;
7. IKU 14 - Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai 100 Persen atau 131,58% dari target Triwulan III yaitu 76%; dan
8. IKU 18 - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap mendapatkan Nilai 92,91 atau 104,98% dari target Triwulan III yaitu Nilai 88,5.

Capaian kinerja PPS Cilacap selama Triwulan III Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang baik, meskipun terdapat beberapa kendala signifikan yang memengaruhi pencapaian indikator utama. Keberhasilan tersebut juga tercermin dalam hasil Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) Tahun 2025, di mana PPS Cilacap meraih nilai sempurna 100 dan predikat "AA", tertinggi di antara 29 satuan kerja di bawah Ditjen Perikanan Tangkap. PPS Cilacap dinilai unggul pada seluruh aspek manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi internal dengan penerapan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant,* dan *Time-bound*) serta penggunaan aplikasi Kinerjaku sebagai instrumen pengendalian kinerja.

Dari sisi pendanaan, PPS Cilacap memperoleh anggaran sebesar Rp136,05 miliar yang dialokasikan untuk tiga kegiatan utama: Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pengelolaan Sumber Daya Ikan, dan Dukungan Manajemen Internal. Realisasi belanja pegawai mencapai 97,9% dari pagu Rp3,59 miliar dengan potensi kelebihan kebutuhan karena penyesuaian gaji dan formasi baru. Sementara itu, realisasi belanja barang, modal, dan bansos baru mencapai 8,87% akibat blokir anggaran dan penundaan proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) senilai Rp 96,01 miliar yang dijadwalkan ulang ke tahun 2026.

Secara keseluruhan, kinerja PPS Cilacap pada Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan prestasi luar biasa dalam capaian kinerja dan akuntabilitas, meskipun masih menghadapi tantangan pada sisi serapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan fisik. Selanjutnya, diperlukan langkah percepatan pembukaan blokir, penyelesaian administrasi, serta penguatan koordinasi lintas unit untuk memastikan efektivitas program, efisiensi penggunaan anggaran, dan keberlanjutan capaian strategis di periode berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPS Cilacap) sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja PPS Cilacap dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance)* adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen PPS Cilacap dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan pada akhir periode pengukuran. Penyelenggaraan kegiatan tersebut, harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) atau Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan *Good Governance* di lingkungan PPS Cilacap.

PPS Cilacap sebagai pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan secara terpadu

berdasarkan program jangka panjang dan jangka menengah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya program pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Renstra DJPT).

Sebagai salah satu instansi pemerintah di bawah lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), PPS Cilacap telah menetapkan rencana kerja Tahun 2025, melakukan monitoring dan evaluasi, serta melaksanakan pengukuran terhadap capaian kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) PPS Cilacap periode Triwulan III Tahun 2025 sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas yang diemban. Acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja PPS Cilacap Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Peraturan Presiden No. 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
g. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;

h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dengan demikian, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) PPS Cilacap Triwulan III Tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang perikanan tangkap. Laporan ini diharapkan dapat menjadi alat evaluasi yang komprehensif terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus sebagai dasar perbaikan kinerja di masa mendatang. Melalui pelaporan yang terukur, terarah, dan berlandaskan regulasi yang berlaku, PPS Cilacap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tujuan

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPS Cilacap) sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Negara telah menetapkan target kinerja dan dilakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut kemudian disusun dalam Laporan Kinerja PPS Cilacap sebagai wujud Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja PPS Cilacap Triwulan III Tahun 2025 ini, yaitu:

1. sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi PPS Cilacap kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
2. sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja PPS Cilacap pada Triwulan III Tahun 2025 dalam upaya memperbaiki kinerja selanjutnya; dan
3. sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPS Cilacap) memiliki tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta menjamin keselamatan operasional kapal perikanan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2020. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS Cilacap menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pelabuhan perikanan;
b. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan perikanan;
c. pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
d. pelaksanaan pemeriksaan logbook penangkapan ikan;
e. pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
f. pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
g. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
h. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
i. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan;
j. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
k. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
l. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
m. pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;

n. pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan perikanan; dan
o. pelaksanaan urusan ketatausahaan

Struktur organisasi PPS Cilacap Tahun 2025 tersusun secara fungsional untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab instansi secara efektif. Berdasarkan struktur tersebut, Kepala PPS Cilacap dijabat oleh Imas Masriah, S.Pi., M.Pi., dalam pelaksanaan tugas administrasi dan tata usaha, Kepala Pelabuhan dibantu oleh Kepala Subbagian Umum, yaitu Sigit Purwoko, S.Si.P., M.AP. Selain itu, terdapat Koordinator/Ketua Tim Kerja dan Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan teknis operasional sesuai bidang keahlian masing-masing.

Gambar 1 Struktur Organisasi Pelabuhan Samudera Cilacap Tahun 2025

Adapun susunan organisasi PPS Cilacap berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Subbagian Umum.

   Subbagian Umum dalam hal ini sebagai Tim Kerja Dukungan Manajerial yang mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan dengan uraian sebagai berikut:

   a. Menyiapkan bahan penilaian Pembangunan ZI WBK PPS Cilacap;
   b. Melakukan penyusunan bahan konsep penyelesaian tindak lanjut temuan aparatur pemeriksa (BPK, Itjen) di unit kerja lingkup PPS Cilacap;
   c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas rekonsiliasi kinerja lingkup PPS Cilacap;
   d. Menyiapkan bahan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) lingkup PPS Cilacap;
   e. Menyiapkan bahan penilaian Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPS Cilacap;
   f. Menyiapkan bahan penilaian Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Cilacap;
   g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran lingkup PPS Cilacap;
   h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja teknis terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup PPS Cilacap;
   i. Melaksanakan perencanaan dan penganggaran lingkup PPS Cilacap;
   j. Melaksanakan pengelolaan kinerja lingkup PPS Cilacap;
   k. Melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup PPS Cilacap;
   l. Melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia aparatur lingkup PPS Cilacap;
   m. Melaksanakan penyiapan bahan terkait organisasi dan tata laksana di PPS Cilacap;
   n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Sekretariat terkait proses pengadaan barang/jasa di PPS Cilacap;
   o. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara lingkup PPS Cilacap;
   p. Melaksanakan pengelolaan persuratan dan kearsipan lingkup PPS Cilacap;

q. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan lingkup PPS Cilacap.

2. Kelompok Jabatan Pelaksana

   Kelompok jabatan pelaksana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, tergabung dalam Tim Kerja lingkup PPS Cilacap sesuai dengan Surat Tugas Kepala Pelabuhan Cilacap Nomor B.3642/PPSC/KP.440/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

   mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, telah dibentuk tim kerja dengan ketua tim kerja sebagaimana ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Pelabuhan Nomor B.104/PPC/KP.440/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Tim Kerja lingkup PPS Cilacap sebagai berikut:

   a. Tim Kerja Operasional Pelabuhan;

      Tim Kerja Operasional Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional kepelabuhanan dan kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Operasional Pelabuhan menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

      - Penyiapan data dan statistik Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
      - Melakukan identifikasi terkait perhitungan kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
      - Melakukan evaluasi terkait kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
      - Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
      - Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
      - Menyiapkan data mutu perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
      - Menyiapkan Kegiatan pembinaan dan pemeriksanaan terhadap mutu ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;

- Menyiapkan Kegiatan pengujian mutu hasil perikanan dan melaporakan hasil pengujian mutu yang telah dilakukan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- Menyiapkan dan mempublikasikan data dalam bentuk visual dan nonvisual terkait perkembangan operasional di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- Menyiapkan pengelolaan aplikasi PIPP.

b. Tim Kerja Kesyahbandaran;

Tim Kerja Kesyahbandaran mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional kapal perikanan dan kesyahbandaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Kesyahbandaran menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan pelayanan perizinan kapal perikanan izin daerah di PPS Cilacap;
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindugan Nelayan/Awak Kapal Perikanan di PPS Cilacap;
- Melakukan identifikasi terkait perhitungan kinerja pelayanan kesyahbandaran di PPS Cilacap;
- Melakukan evaluasi terkait kinerja pelayanan kesyahbandaran di PPS Cilacap;
- Melaksanakan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di PPS Cilacap;
- Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan di PPS Cilacap;
- Melaksanakan pemeriksaan Log Book di PPS Cilacap;
- Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di PPS Cilacap;
- Melaksanakan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan di PPS Cilacap;
- Melaksanakan pengawasan pengisian bahan bakar di PPS Cilacap;

- Melaksanakan bimbingan teknis kesyahbandaran di PPS Cilacap;
- Menyiapkan pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Pengawakan Kapal Perikanan di PPS Cilacap;
- Menyiapkan pengaturan tambat labuh, bongkar muat, perbaikan kapal dan penyaluran bahan perbekalan kapal di PPS Cilacap;
- Menyiapkan pemeriksaan perencanaan pelayaran dengan selamat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan kesyahbandaran di PPS Cilacap;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan kesyahbandaran di PPS Cilacap.

c. Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana;

Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, pengembangan, dan pengendalian sarana dan prasarana, serta fasilitasi di pelabuhan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Menyiapkan data/informasi yang terkait dengan bahan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana PPS Cilacap;
- Menyiapkan bahan usulan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana PPS Cilacap;
- Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian, serta pendayagunaan sarana prasarana di PPS Cilacap;
- Melaksanakan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan di PPS Cilacap;
- Menyiapkan bahan penyusunan laporan pengawasan penggunaan/ pemanfaatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan oleh pelabuhan perikanan sendiri ataupun oleh pihak swasta;

- Menyiapkan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan perikanan di PPS Cilacap;
- Melaksanakan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan di PPS Cilacap;
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan tata kelola sarana dan prasarana di PPS Cilacap;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan tata kelola sarana dan prasarana di PPS Cilacap.

d. Tim Kerja Pelayanan Usaha;

Tim Kerja Pelayanan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemanfaatan di pelabuhan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Pelayanan Usaha menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait permohonan pengusahaan di PPS Cilacap;
- Melaksanakan analisis atas rencana kerja pengusahaan (investasi) di PPS Cilacap;
- Melaksanakan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha di PPS Cilacap;
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan publik terkait pelayanan usaha di PPS Cilacap;
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan pelayanan usaha di PPS Cilacap;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan pelayanan usaha di PPS Cilacap;
- Menyiapkan tagihan pemanfaatan jasa/layanan di PPS Cilacap.

Keragaan Pegawai

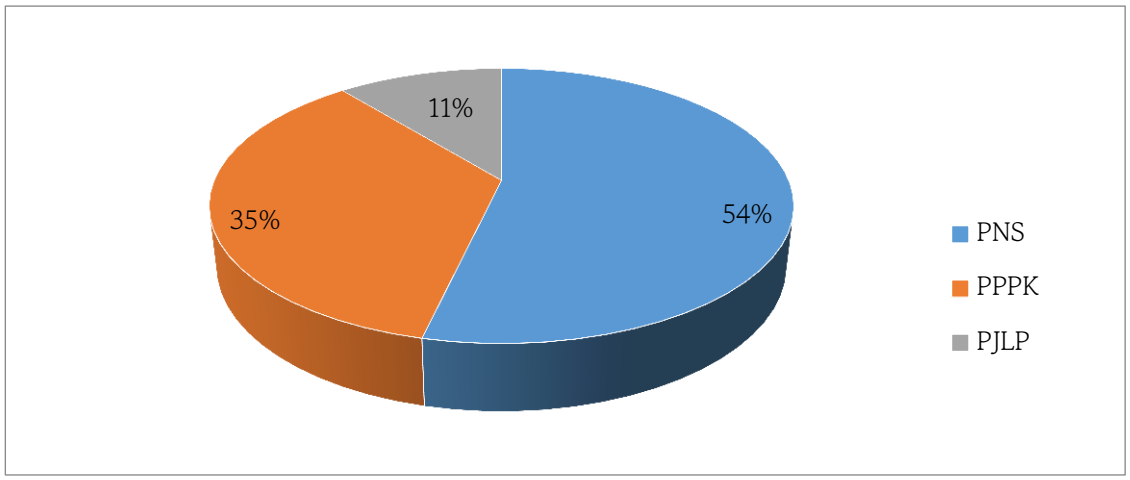

Gambar 2 Diagram Pie Jumlah Pegawai PPS Cilacap

Berdasarkan data pada Gambar 2, jumlah pegawai di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap hingga 1 Oktober 2025 tercatat sebanyak 110 orang, yang terdiri atas 59 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sekitar 54%, 39 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau 35%, serta 12 orang Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) atau 11%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa struktur kepegawaian PPS Cilacap masih didominasi oleh PNS, yang berperan penting dalam menjaga kesinambungan fungsi kelembagaan dan pelaksanaan tugas-tugas strategis pelabuhan.

Sementara itu, proporsi PPPK yang mencapai lebih dari sepertiga total pegawai menggambarkan adanya penguatan sumber daya manusia fungsional dan teknis yang adaptif terhadap kebutuhan operasional pelabuhan. Kondisi ini juga menjadi indikator terjadinya transformasi dalam manajemen kepegawaian yang mengarah pada peningkatan efektivitas kerja serta optimalisasi pelayanan publik.

Adapun keberadaan PJLP sebesar 11% berfungsi sebagai pendukung kegiatan operasional harian, khususnya pada aspek teknis dan administratif yang membutuhkan fleksibilitas tinggi. Dengan komposisi yang beragam tersebut, PPS Cilacap dinilai memiliki struktur sumber daya manusia yang seimbang antara tenaga

tetap, tenaga profesional kontraktual, dan tenaga pendukung, sehingga mampu beradaptasi terhadap dinamika operasional pelabuhan serta mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal.

Berdasarkan Gambar 3, komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di PPS Cilacap menunjukkan bahwa Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) mendominasi dengan proporsi 49%, diikuti oleh Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebesar 38%, Non-ASN sebesar 11%, dan Jabatan Struktural sebesar 2%. Struktur tersebut mengindikasikan bahwa PPS Cilacap memiliki orientasi kinerja yang kuat pada fungsi teknis dan profesional, di mana sebagian besar pegawai berperan langsung dalam mendukung kegiatan operasional pelabuhan serta pelayanan publik di sektor perikanan tangkap.

Dominasi JFT menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas di PPS Cilacap lebih menekankan pada kompetensi keahlian dan kinerja berbasis profesi, sejalan dengan tuntutan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Jabatan Fungsional Tertentu juga berperan penting dalam memastikan penerapan standar teknis dan operasional di lapangan, terutama pada bidang pengelolaan produksi perikanan tangkap. Tercatat terdapat 17 jenis Jabatan Fungsional Tertentu yang aktif di PPS Cilacap, dengan jumlah terbanyak pada jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama, yaitu sebanyak 13 orang, yang menjadi ujung tombak pelaksanaan kegiatan teknis pelabuhan.

Secara keseluruhan, komposisi tersebut mencerminkan bahwa struktur ASN PPS Cilacap telah mengarah pada organisasi yang profesional, fungsional, dan berbasis kinerja, dengan proporsi jabatan struktural yang minimal, namun tetap efektif dalam menjalankan fungsi koordinatif dan manajerial.

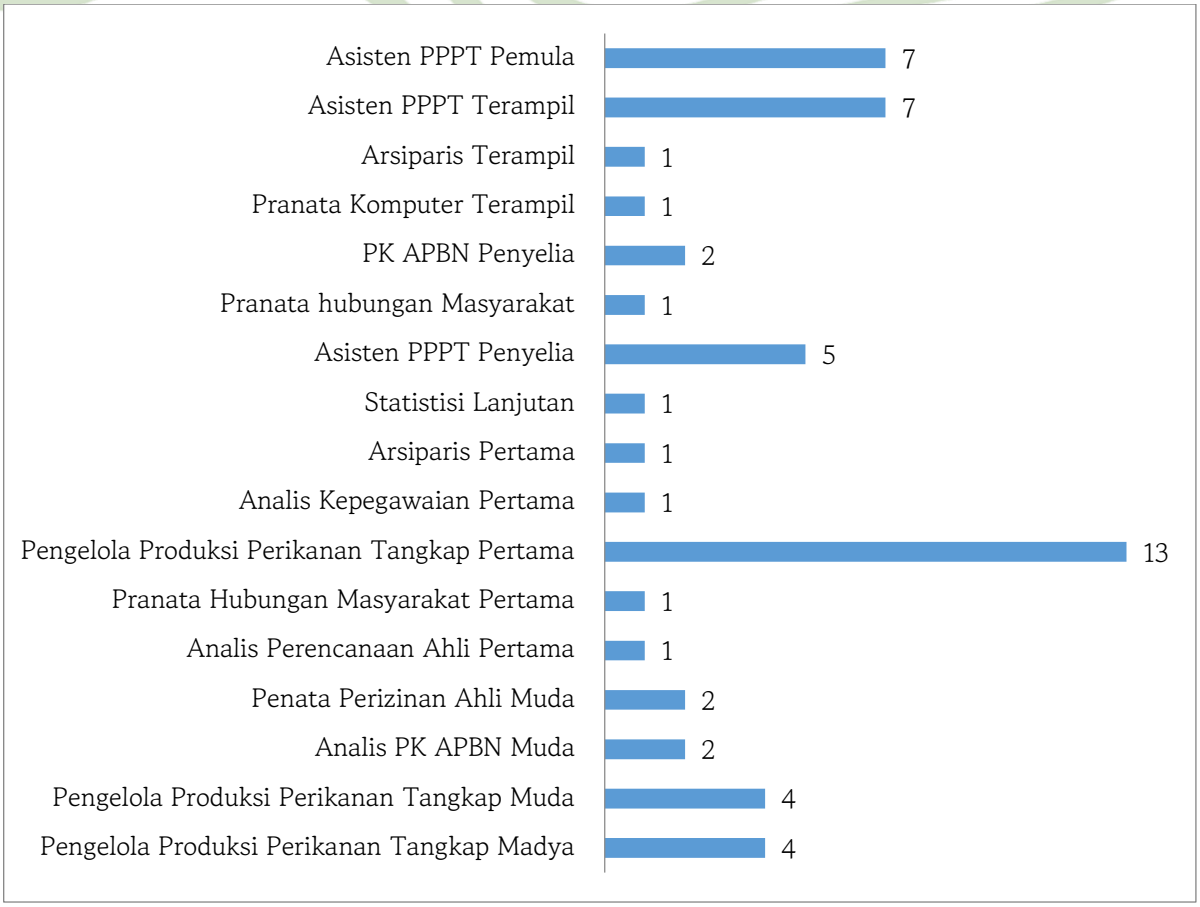

Gambar 3 Diagram Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu di PPS Cilacap

Berdasarkan Gambar 4, komposisi pegawai Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap menunjukkan bahwa mayoritas pegawai telah menempuh pendidikan tinggi, dengan rincian 6 orang berpendidikan S2, 42 orang S1/D4, 14 orang D3, serta 29 orang lulusan SMA/SMK dan 19 orang berpendidikan ≤ SMA. Distribusi tersebut menandakan bahwa tingkat pendidikan pegawai di PPS Cilacap tergolong baik, karena sebagian besar memiliki latar belakang akademik yang relevan untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis dan administratif.

Dominasi pegawai berpendidikan S1/D4 dan D3 menunjukkan bahwa PPS Cilacap memiliki basis sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, serta mampu beradaptasi dengan tuntutan kerja berbasis keahlian dan penerapan sistem pelayanan publik modern. Sementara itu, keberadaan pegawai berpendidikan S2 menjadi potensi strategis dalam memperkuat kemampuan analitis, inovasi kebijakan, serta pengembangan kelembagaan.

Secara keseluruhan, komposisi tingkat pendidikan tersebut mencerminkan bahwa sumber daya manusia PPS Cilacap memiliki kapasitas intelektual yang memadai, sehingga menjadi modal penting dalam peningkatan kinerja organisasi, penguatan tata kelola pelabuhan, serta penerapan inovasi dan teknologi di bidang perikanan tangkap.

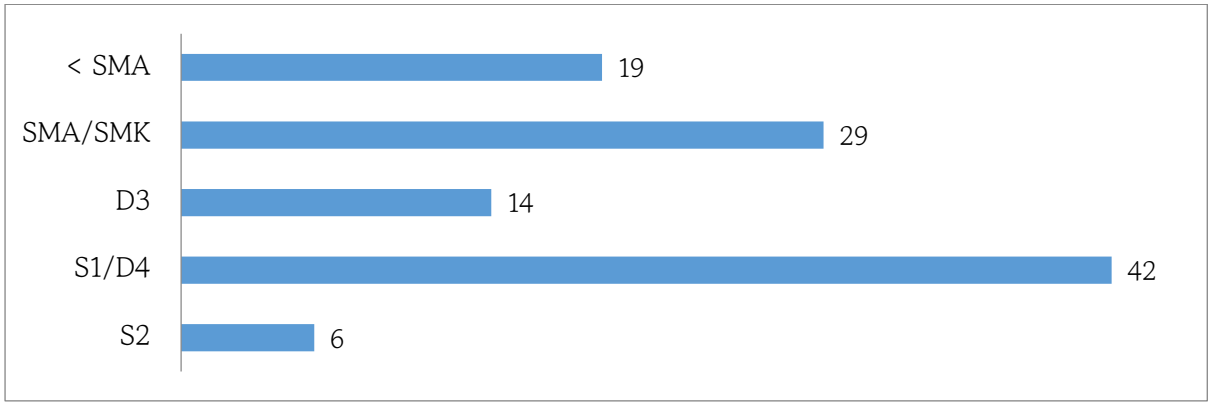

Gambar 4 Diagram Tingkat Pendidikan Pegawai di PPS Cilacap

Dari aspek gender (gambar 5), proporsi pegawai laki-laki masih mendominasi sebesar 78%, sedangkan pegawai perempuan berjumlah 22%. Meskipun terjadi ketimpangan gender, namun peran perempuan tetap signifikan dalam mendukung kegiatan organisasi, baik pada aspek administratif maupun teknis.

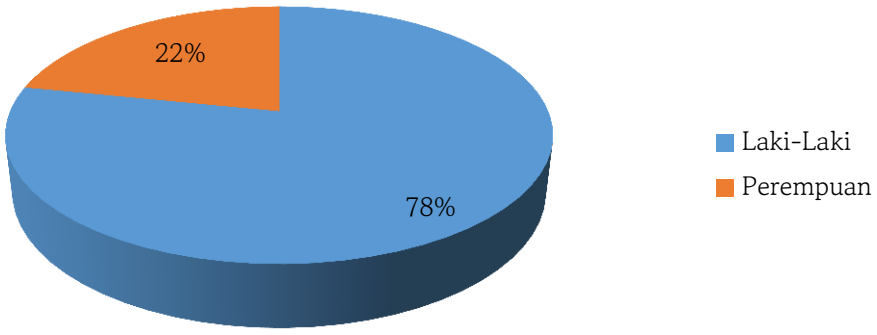

Gambar 5 Diagram perbandingan gender pegawai di PPS Cilacap

Secara keseluruhan, keragaan pegawai di PPS Cilacap mencerminkan struktur SDM yang cukup solid dan berpotensi besar untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan komposisi kepegawaian yang didominasi oleh tenaga

fungsional serta tingkat pendidikan yang relatif tinggi, PPS Cilacap memiliki modal sumber daya manusia yang strategis untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan efektivitas pengelolaan pelabuhan perikanan ke depan. Optimalisasi kapasitas, pemerataan tugas sesuai kompetensi, serta peningkatan profesionalisme pegawai menjadi kunci penting dalam mendorong kemajuan organisasi secara berkelanjutan.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 2025

Sistem penyajian Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah secara jelas dan transparan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik terkait keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 ini berisi pertanggungjawaban kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) ini mengomunikasikan capaian kinerja (*performance results*) Triwulan III Tahun 2025 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis terhadap capaian kinerja dibandingkan dengan rencana atau penetapan kinerja (komitmen kinerja) memungkinkan teridentifikasinya sejumlah kesenjangan kinerja (*performance gap*) sebagai dasar perbaikan kinerja di masa mendatang.

Selain itu, laporan ini juga menyajikan analisis atas penyebab keberhasilan maupun kegagalan, peningkatan atau penurunan kinerja, serta alternatif solusi yang telah diterapkan selama tahun berjalan. Analisis tersebut mencakup pula efisiensi penggunaan sumber daya, serta keterkaitan antara program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian perjanjian kinerja.

Dalam kaitannya dengan aspek anggaran, realisasi keuangan digunakan untuk menjelaskan perwujudan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Adapun sistematika penyajian laporan ini adalah sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Triwulan III Tahun 2025.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang PPS Cilacap seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di PPS Cilacap.
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis PPS Cilacap 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja PPS Cilacap Tahun 2025 serta Pengukuran Kinerja.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.
5. **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.
6. **Lampiran,** berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap penting.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan salah satu kementerian yang berperan dalam bidang ekonomi nasional. Pada hakikatnya, peran tersebut tercermin dari seluruh kebijakan yang diarahkan dalam kerangka pembangunan ekonomi. Komponen utama ekonomi kelautan dan perikanan berkaitan dengan aspek produksi dan pendapatan yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan visi pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu "mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera serta sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan," dan sejalan dengan Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yakni "mewujudkan perikanan tangkap yang maju dan berkelanjutan serta masyarakat perikanan tangkap yang mandiri dan sejahtera," sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) DJPT Tahun 2020–2024, PPS Cilacap menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, dan sasaran strategis yang terukur dan dilaksanakan setiap tahun.

Visi

Dengan mempertimbangkan dan merupakan penjabaran visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka Visi PPS Cilacap sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PPS Cilacap Tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perikanan terpadu".

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan serta peluang perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, maka Misi yang diemban PPS Cilacap adalah:

1. Menyediakan fasilitas dan jasa yang berorientasi pada tingkat pertumbuhan usaha perikanan;
2. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha;
4. Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Tujuan

Kegiatan operasional PPS Cilacap mencakup berbagai aspek baik yang langsung dikelola oleh pelabuhan sendiri maupun dikelola oleh institusi/lembaga lain yang beraktifitas di dalam pelabuhan, sehingga penetapan visi tersebut dengan tujuan/harapan mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelabuhan perikanan dalam memberikan pelayanan yang bermutu, menuju sasaran yang ingin dicapai dan menjadi acuan serta memberikan inspirasi dan motivasi kerja bagi organisasi. Dengan mengacu pada tujuan pembangunan perikanan tangkap, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan;
2. Meningkatnya kesejahteraan nelayan.

Sasaran

PPS Cilacap memiliki sasaran kegiatan (SK) yang akan dicapai Tahun 2025 dengan mengacu pada sasaran program DJPT yang diturunkan dari sasaran strategis KKP yaitu :

SK-1 Nilai PNBP sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

SK-2 Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat

SK-3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab

SK-4 Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

SK-5 Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Rencana Kerja Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja PPS Cilacap Tahun Anggaran 2025 disajikan pada Tabel 1.

No	Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	119.172.546.000
2	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	39.235.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	16.837.604.000
TOTAL		**136.049.385.000**

Tabel 1 Rencana Kerja PPS Cilacap TA 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada Tahun 2025, PPS Cilacap telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Pada perjanjian kinerja tersebut terdapat 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Untuk sasaran kegiatan yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Keseluruhan IKU PPS Cilacap pada Tahun 2025 untuk semua SK berjumlah 18 (delapan belas) IKU. Sebagai alat ukur pencapaian SK, target 18 (delapan belas) IKU PPS Cilacap yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 terlihat pada tabel di bawah ini.

Sasaran		Indikator Kinerja		Target
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Juta)	3.373,57
2	Produktivitas perikanan	2	Volume produksi perikanan tangkap di	35.000

Sasaran		Indikator Kinerja		Target
	tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat		Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton)	
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	85
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	33
		7	Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	30,1
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	700
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	85
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan	87

Sasaran		Indikator Kinerja		Target
			Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)	
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	76
		15	Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	81
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	92
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	71,5
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,5

Tabel 2 Perjanjian Kinerja PPS Cilacap TA 2025

Sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi aktual di lapangan, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap telah mengajukan permohonan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 melalui Surat Kepala PPS Cilacap Nomor B.1243/PPSC/RC.610/IV/2025 tanggal 8 April 2025. Permohonan tersebut diajukan untuk menyesuaikan target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 2, yaitu Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Cilacap.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga agar target kinerja yang ditetapkan tetap realistis, terukur, dan sesuai dengan dinamika operasional di lapangan. Dengan demikian, penyesuaian ini diharapkan dapat memperkuat akurasi perencanaan kinerja serta mendukung pencapaian sasaran organisasi secara efektif. Rincian perubahan indikator dan target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran		Indikator Kinerja		Target
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan	1	Penerimaan PNBP Non SDA di	3.373,57

Sasaran		Indikator Kinerja		Target
	Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap		Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Juta)	
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton)	27.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	85
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	33
		7	Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	30,1
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	700
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan	85

Sasaran		Indikator Kinerja		Target
			Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)	87
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	76
		15	Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	81
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	92
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	71,5
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,5

Tabel 3 Indikator dan Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2025 Revisi April

Pengukuran Kinerja

Nilai kinerja adalah nilai yang menunjukan konsolidasi dari seluruh IKU. Status capaian yang ditunjukan dengan pewarnaan ditentukan dari perbandingan antara capaian dengan target. Untuk menghitung nilai kinerja perlu diperhatikan bobot masing-masing IKU dengan sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKU, terdiri dari *Outcome*, *Output* Kendali Rendah, *Output* Kendali Tinggi, dengan bobot seperti Tabel 4.

No	Validitas IKU	Bobot
1	*Outcome*	5
2	*Output* Kendali Rendah	3
3	*Output* Kendali Tinggi	2

Tabel 4 Bobot validasi IKU

Tingkat validitas diatas memiliki bobot yang berbeda didasarkan oleh karakter indikator kinerja, sebagai berikut :

1. Validitas *Outcome* yaitu hasil/manfaat/dampak yang diharapkan oleh *stakeholder/customer* pemilik indikator dalam jangka pendek, menengah atau panjang.
2. Validitas *Output* Kendali Rendah yaitu yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaianya tidak dipengaruhi secara dominan selain pemilik indikator.
3. Validitas *Output* Kendali Tinggi yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator.

Selanjutnya ditentukan pola perhitungan indikator kinerja. Pola Perhitungan terdiri dari Akumulasi, Rata-rata dan Nilai Posisi Akhir. Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan mensepakati standar status kinerja untuk nilai kinerja dengan klasifikasi polarisasi. Polarisasi terdiri dari *Maximize*, *Minimize*, atau *Stabilize*. *Maximize* yaitu semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik, semakin rendah kinerja semakin buruk. *Minimize* yaitu semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik, semakin tinggi semakin buruk. *Stabilize* yaitu semakin Stabil/sesuai dengan nilai target (tidak naik dan tidak turun) maka kinerja semakin baik. Berikut klasifikasi polarisasi yang ditentukan sesuai Tabel 5.

KLASIFIKASI			STATUS KINERJA (Toleransi 0%)
MAXIMIZE	MINIMIZE	STABILIZE	
X<50%	X>50%	X>50% atau X<50%	Sangat Kurang
X=50%-<70%	X=50%->70%	-	Kurang
X=70%-<90%	X=70%->90%	-	Cukup
X=90%-<120%	X=90%->120%	X=100%	Baik
X≥110%	X≤120%	-	Sangat Baik

Tabel 5 Klasifikasi target indikator kinerja

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah: *Maximixe* adalah semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Minimize* adalah semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Stabilize* adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik. Status capaian nilai kinerja ditentukan oleh nilai indeks pada Tabel 6.

Warna	Keterangan
Istimewa	Nilai 110-120
Baik	Nilai 90-<110
Cukup	Nilai 70-<90
Kurang	Nilai 50-<70
Sangat Kurang	Untuk Nilai <50
Belum Ada Penilaian	

Tabel 6 Status Capaian Nilai Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi

Pada Tahun Anggaran 2025, PPS Cilacap menerima mandat untuk melaksanakan lima (5) Sasaran Kegiatan (SK) dan mencapai target dari delapan belas (18) Indikator Kinerja Utama (IKU). SK dan IKU tersebut menjadi pedoman utama dalam menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja di lingkungan PPS Cilacap.

Memasuki akhir Triwulan III Tahun 2025, pencapaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Seluruh sasaran dan indikator tidak hanya berhasil dicapai, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan. Kondisi ini membuktikan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap berjalan optimal, meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan secara nasional.

Capaian tersebut tercermin secara kuantitatif melalui sistem pemantauan resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu aplikasi kinerjaku.kkp.go.id. Berdasarkan data sistem tersebut, PPS Cilacap mencatat nilai capaian sebesar 118,23% pada Triwulan III, sementara akumulasi capaian kinerja hingga akhir Triwulan III tercatat sebesar 117,79%. Dengan nilai tersebut, PPS Cilacap berhasil masuk dalam kategori “Istimewa” (rentang nilai 110–120), yang ditandai dengan indikator berwarna biru, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 6 berikut ini.

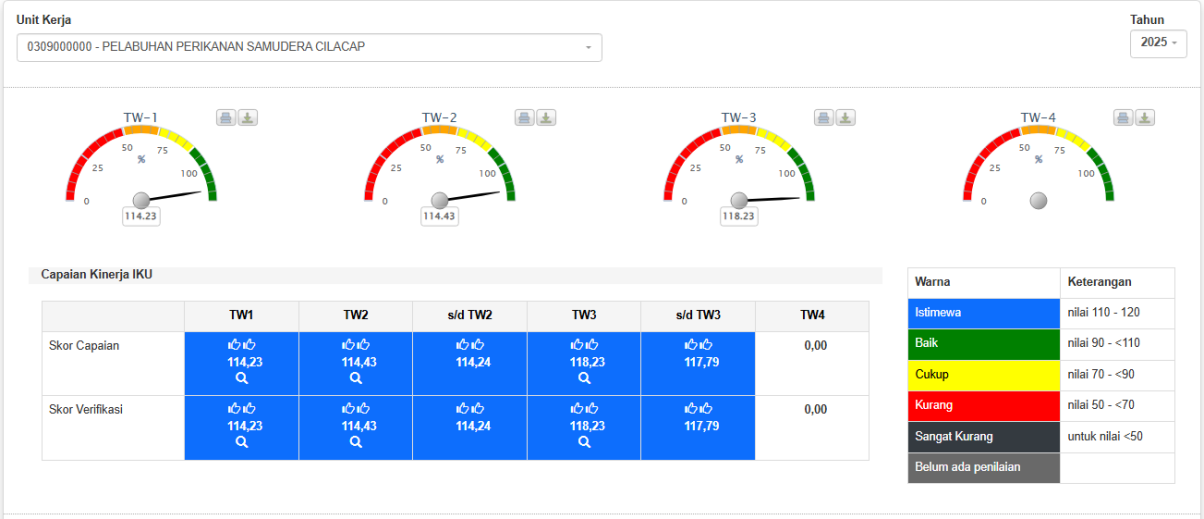

Gambar 6 Nilai NKO PPS Cilacap Aplikasi Kinerjaku Periode Triwulan III Tahun 2025

Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari kerja keras dan kontribusi seluruh pegawai PPS Cilacap yang terus berkomitmen untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kolaborasi tim yang solid, tata kelola yang baik, serta penguatan pengawasan dan evaluasi internal menjadi faktor kunci dalam mendukung tercapainya kinerja yang unggul.

Pencapaian ini diharapkan tidak hanya menjadi indikator keberhasilan semata, tetapi juga menjadi motivasi untuk menjaga konsistensi kinerja hingga akhir tahun anggaran. Dengan semangat kerja kolektif dan orientasi pada hasil, PPS Cilacap siap menjawab tantangan sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor perikanan tangkap yang berkelanjutan.

Evaluasi dan Analisis Kinerja

PPS Cilacap berhasil meraih skor sempurna 100 dan predikat “AA” dalam Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025. Capaian ini menempatkan PPS Cilacap sebagai satuan kerja dengan nilai tertinggi di antara 29 satuan kerja yang dinilai, terdiri atas enam satuan kerja pusat dan 23 unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Penilaian dilaksanakan melalui Forum Pengelolaan Kinerja pada 17–19 September 2025, yang menilai empat komponen utama manajemen kinerja, yaitu

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja internal. PPS Cilacap menunjukkan performa yang sangat baik di seluruh aspek tersebut, dengan nilai sempurna pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja, serta capaian maksimal pada aspek pelaporan dan evaluasi internal.

Capaian ini merupakan bukti nyata konsistensi PPS Cilacap dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja, manajemen berbasis hasil (result-based management), serta pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif dan terukur. Pencapaian skor sempurna tersebut menggambarkan kemampuan PPS Cilacap dalam menyusun dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant*, dan *Time-bound*), melaksanakan pengukuran kinerja secara sistematis dan berjenjang, serta menyajikan pelaporan yang informatif, transparan, dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan.

Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa proses pengelolaan kinerja di PPS Cilacap telah terintegrasi dengan baik antara perencanaan strategis, indikator kinerja utama (IKU), serta pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan. Dalam pelaksanaannya, PPS Cilacap mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjadi dasar pelaksanaan pengukuran kinerja secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui regulasi tersebut, PPS Cilacap memastikan bahwa proses evaluasi kinerja dilakukan dengan pendekatan berbasis data dan hasil, bukan sekadar administratif atau formalitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan formulir dan sistem evaluasi yang disusun secara komprehensif berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi sejak tahap awal perencanaan. IKU tersebut menjadi acuan dalam menilai sejauh mana sasaran strategis, tujuan organisasi, dan kontrak kinerja dapat dicapai pada Triwulan III Tahun 2025.

Selain berpedoman pada regulasi nasional, PPS Cilacap juga mengoptimalkan penggunaan aplikasi Kinerjaku, sistem berbasis digital yang dikembangkan untuk memantau, mencatat, dan menganalisis capaian kinerja secara real time. Pemanfaatan sistem ini memungkinkan pengawasan internal berjalan lebih efektif

dan efisien, sekaligus memudahkan proses evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program kerja. Melalui integrasi teknologi tersebut, PPS Cilacap mampu mempercepat alur pelaporan, meminimalkan potensi kesalahan input data, serta meningkatkan akurasi dan transparansi hasil evaluasi. Dengan demikian, pengukuran kinerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pengambilan keputusan berbasis bukti *(evidence-based decision making*).

Hasil evaluasi PM SAKIP Tahun 2025 juga menjadi refleksi keberhasilan manajemen PPS Cilacap dalam membangun budaya kerja berorientasi hasil (*performance-oriented culture*). Mayoritas pegawai telah memahami pentingnya penyusunan perencanaan yang realistis, pelaksanaan yang disiplin, serta pelaporan yang akuntabel. Komitmen pimpinan dalam mengawal pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja turut memperkuat tata kelola organisasi, menciptakan lingkungan kerja yang transparan, dan mendorong peningkatan kinerja di seluruh lini. Pendekatan kolaboratif antara pimpinan, tim perencana, pelaksana kegiatan, dan bagian keuangan juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di lapangan.

Meskipun PPS Cilacap telah berhasil mencapai hasil optimal, evaluasi terhadap keseluruhan pelaksanaan PM SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menunjukkan masih adanya ruang untuk perbaikan. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap secara umum perlu melakukan penyempurnaan terhadap Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, khususnya dalam penyusunan indikator yang lebih terukur dan penyesuaian target berdasarkan hasil evaluasi capaian sebelumnya. Selain itu, perlu diperkuat mekanisme umpan balik (feedback) antara hasil pengukuran kinerja dan perencanaan program agar setiap tindak lanjut yang diambil berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas kinerja organisasi.

Sebagai tindak lanjut hasil penilaian, PPS Cilacap bersama seluruh satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap diharapkan terus berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan terhadap perencanaan strategis pembangunan perikanan tangkap, mengidentifikasi inovasi yang berpotensi meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja, serta melaksanakan sosialisasi pengukuran kinerja secara

berkala di lingkungan internal. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kinerja juga menjadi aspek penting, termasuk pelatihan teknis terkait penyusunan IKU, analisis capaian, dan pelaporan berbasis hasil.

Secara keseluruhan, hasil PM SAKIP Tahun 2025 menjadi bukti nyata keberhasilan PPS Cilacap dalam menerapkan tata kelola kinerja yang unggul, transparan, dan berorientasi hasil. Predikat "AA" dengan skor sempurna 100 tidak hanya mencerminkan keberhasilan administratif, tetapi juga menunjukkan komitmen organisasi terhadap reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas publik. PPS Cilacap kini layak menjadi model percontohan (*role model*) bagi satuan kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang efektif, efisien, dan berintegritas tinggi.

Capaian IKU PPS Cilacap

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi, agar sasaran dan tujuan strategis yang tercantum dalam Penetapan Kinerja PPS Cilacap Tahun 2025 dapat tercapai secara optimal. Pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TW III	CAPAIAN TW III	PERSENTASE %
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Juta)	2,530.18	3,996.61	120

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TW III	CAPAIAN TW III	PERSENTASE %	
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton)	20,000.00	26.063,95	120	
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)				
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	84	96,5	114,88	
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)				
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)				
		7	Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan	30.1	94,66	120	

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TW III	CAPAIAN TW III	PERSENTASE %	
			Samudera Cilacap (Nilai)				
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	680	1.283	120	
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)				
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK) (Nilai)				
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	85	100	117,65	
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)				
		13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)				

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TW III	CAPAIAN TW III	PERSENTASE %	
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	76	100	120	
		15	Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)				
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)				
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)				
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88.5	92,91	104,98	

Tabel 7 Capaian IKU PPS Cilacap Triwulan III Tahun 2025

Sumber : Kinerjaku PPS Cilacap

SASARAN KEGIATAN 1

Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Sasaran kegiatan I dalam Triwulan III Tahun 2025 adalah meningkatnya Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Perikanan Tangkap di PPS Cilacap. Sasaran tersebut didukung oleh 1 indikator kinerja yang telah ditetapkan dan ditargetkan pada periode ini. Adapun rincian capaian indikator kinerja dapat dilihat pada uraian berikut.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1

Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Juta)

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan pungutan yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan usaha atas manfaat langsung maupun tidak langsung yang diperoleh dari layanan, pemanfaatan sumber daya, atau hak yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PNBP tersebut menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah, serta dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor kelautan dan perikanan.

Indikator Penerimaan PNBP di PPS Cilacap mengacu pada nilai pungutan dari berbagai layanan dan pemanfaatan fasilitas pelabuhan yang diberikan kepada pengguna jasa. Penerimaan ini mencerminkan kontribusi langsung PPS Cilacap terhadap pendapatan negara dari sektor kelautan dan perikanan, baik melalui layanan kapal perikanan, pemanfaatan sarana dan prasarana, maupun kegiatan usaha perikanan yang beroperasi di kawasan pelabuhan.

Dasar hukum pelaksanaan pungutan PNBP di PPS Cilacap merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku sejak 18 September 2021, serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan PNBP di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan.

Kegiatan pelayanan jasa yang menjadi sumber PNBP Non-Sumber Daya Alam (Non-SDA) di PPS Cilacap meliputi berbagai jenis layanan yang berkaitan dengan aktivitas operasional kapal, pemanfaatan lahan dan bangunan, serta fasilitas pendukung kegiatan perikanan tangkap, sebagaimana dijabarkan pada uraian berikut:

- pelayanan jasa tambat labuh;
- pelayanan jasa air;
- pelayanan jasa *cold room* dan *freezer*;
- pelayanan jasa kendaraan (*crane, truck refrigerator, dump truck* dll);
- pelayanan jasa alat (gerobak, penghancur es, dll);
- pelayanan jasa penggunaan tanah dan/atau bangunan;
- pelayanan jasa penumpukan barang/penjemuran jaring/ikan;
- pelayanan jasa pas masuk;
- pelayanan jasa kebersihan pelabuhan;
- pelayanan jasa penggunaan sarana dan prasarana;
- pelayanan jasa listrik;
- pelayanan jasa dock.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini, sebagaimana tercantum dalam target Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2025, ditetapkan dengan target sebesar Rp2.530,18 juta. Adapun capaian Nilai PNBP Non-Sumber Daya Alam (Non-SDA) di PPS Cilacap pada Triwulan III Tahun 2025 mencapai Rp3.996,61 juta, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 8.

Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2025

Nama IKU	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Capaian
Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Rp Juta)	2.530,18	3.996,61	157,96

Tabel 8 Capaian IKU 1 Triwulan III Tahun 2025

Penerimaan PNBP Non-Sumber Daya Alam PPS Cilacap terbesar masih berasal dari layanan tambat labuh, dengan nilai sebesar Rp2.557.523.924,00. Sumber

penerimaan terbesar kedua berasal dari penggunaan tanah dan/atau bangunan, dengan nilai sebesar Rp475.534.626,00.

Capaian Triwulan III Tahun 2024 dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2025

Nama IKU	Realisasi TW III 2024	Realisasi TW III 2025	Naik/Turun (%)
Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Rp.Juta)	4.975,23	3.996,61	(19,67)

Tabel 9 Perbandingan capaian realisasi IKU 1 Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 9, apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PNBP Non-Sumber Daya Alam Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp4.975,23 juta, maka pada Triwulan III Tahun 2025 terjadi penurunan penerimaan sebesar 19,67%, dengan nilai realisasi sebesar Rp3.996,61 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya nilai PNBP dari beberapa sektor layanan, antara lain pelayanan tambat labuh, penggunaan tanah dan/atau bangunan, *cold storage*, penggunaan alat transportasi, serta pelayanan jasa dock.

Penurunan penerimaan dari pelayanan tambat labuh dipengaruhi oleh kondisi kolam pelabuhan yang semakin dangkal, sehingga sebagian kapal perikanan khususnya yang berukuran di atas 60 GT harus melakukan olah gerak ke lokasi lain yang memiliki kedalaman lebih memadai untuk mendukung operasionalnya. Sementara itu, penurunan penerimaan dari layanan penggunaan tanah dan/atau bangunan, *cold storage*, dan dock disebabkan oleh perubahan mekanisme pembayaran yang sebelumnya dilakukan secara tahunan menjadi pembayaran sekaligus sebelum penandatanganan perjanjian. Selain itu, terdapat pula perubahan mekanisme pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dari yang semula menggunakan mekanisme penggunaan menjadi pemanfaatan/sewa.

Secara keseluruhan, dinamika tersebut menunjukkan bahwa penurunan penerimaan PNBP Non-Sumber Daya Alam (Non-SDA) pada Triwulan III Tahun 2025 lebih disebabkan oleh faktor teknis dan administratif, bukan oleh penurunan aktivitas

pelabuhan secara keseluruhan. Kondisi ini menjadi perhatian penting bagi PPS Cilacap dalam menjaga stabilitas penerimaan pada triwulan berikutnya.

Capaian Triwulan III Tahun 2025 terhadap Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan III	% Capaian thd Target Tahun 2025
Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Rp.Juta)	3.373,57	3.996,61	118,47

Tabel 10 Capaian Realisasi IKU 1 Triwulan III terhadap target Tahun 2025

Target Penerimaan PNBP Non-Sumber Daya Alam di PPS Cilacap pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp3.373,57 juta. Hingga Triwulan III Tahun 2025, capaian terhadap target tahunan tersebut telah mencapai 118,47%.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Penurunan penerimaan PNBP Non-Sumber Daya Alam pada Triwulan III Tahun 2025 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor yang bersifat teknis dan administratif. Dari sisi capaian, PPS Cilacap masih mampu mempertahankan stabilitas operasional pelabuhan serta menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi baru terkait pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan mekanisme pembayaran PNBP. Kondisi ini mencerminkan tata kelola yang transparan serta koordinasi yang baik antarunit layanan, seperti tambat labuh, cold storage, dan pemanfaatan lahan, sehingga aktivitas pelayanan tetap berjalan meskipun nilai penerimaan mengalami penurunan.

Namun demikian, terdapat sejumlah kendala yang menjadi penyebab utama turunnya kinerja PNBP. Faktor fisik berupa pendangkalan kolam pelabuhan menyebabkan sebagian kapal perikanan berukuran di atas 60 GT berpindah ke lokasi lain yang memiliki kedalaman lebih memadai, sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan dari layanan tambat labuh. Selain itu, perubahan mekanisme pembayaran dan pemanfaatan BMN dari sistem pembayaran tahunan menjadi pembayaran sekaligus sebelum penandatanganan perjanjian, serta dari

mekanisme penggunaan menjadi pemanfaatan/sewa—turut menurunkan nilai penerimaan pada periode berjalan. Penurunan permintaan terhadap layanan cold storage dan jasa *dock* juga menjadi faktor tambahan yang memengaruhi penurunan PNBP.

Secara keseluruhan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penurunan penerimaan bukan disebabkan oleh berkurangnya aktivitas pelabuhan, melainkan oleh faktor teknis dan administratif yang memengaruhi pola penerimaan. Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi perhatian penting bagi PPS Cilacap dalam menjaga stabilitas pendapatan pada periode selanjutnya.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran sd TW III	Capaian Realisasi (%)
Pelaksanaan tata kelola dan operasional pengusahaan di pelabuhan perikanan (2338.BGA.002.054)				
PU	C. Sosialisasi Pemanfaatan Tanah dan Bangunan di Pelabuhan	13,960,000	0	0
PU	G. Kepatuhan Usaha dan Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan	10,720,000	0	0
Cikidang	D. Pelayanan Pengusahaan pelabuhan perikanan di PP Cikidang Guna Mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasca Produksi	43,900,000	2,600,000	5,92
Cadangan (2338.999.999)				
Cikidang	FA. Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan Pelabuhan Perikanan di PP CIKIDANG Guna Mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasca Produksi	34,580,000	0	0

OP	D. Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan/Penerapan PNBP Pasca Produksi	8,073,000	1,040,000	12,88
TOTAL		111.233.000	3.640.000	3,27

Tabel 11 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 1

SASARAN KEGIATAN 2

Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat

Sasaran kegiatan "Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap meningkat" merupakan salah satu fokus utama dalam pelaksanaan program kinerja Tahun 2025. Sasaran ini didukung oleh 1 indikator kinerja yang telah ditetapkan dan ditargetkan untuk dicapai pada Triwulan III Tahun 2025. Adapun capaian indikator kinerja pada periode tersebut dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2

Volume produksi perikanan tangkap di PPS Cilacap (Ton)

Indikator ini menggambarkan jumlah produksi perikanan tangkap dari laut yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap dalam bentuk ikan basah. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki periode pengukuran triwulanan, dengan pelaporan produksi dilakukan secara berkala setiap bulan maupun harian oleh unit terkait. Capaian realisasi volume produksi perikanan tangkap hingga Triwulan III Tahun 2025 tercatat sebesar 26.063,95 ton, melampaui target yang ditetapkan sebesar 20.000 ton.

Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2025

Nama IKU	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	Capaian (%)
Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (ton)	20.000	26.063,95	130,32

Tabel 12 Capaian IKU 2 Triwulan III Tahun 2025

Pada Triwulan III Tahun 2025, kinerja Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Cilacap menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Berdasarkan data yang tercatat, realisasi produksi mencapai 26.063,95 ton, atau 130,32% dari target yang telah ditetapkan sebesar 20.000 ton. Pencapaian ini mencerminkan kinerja operasional yang sangat baik serta efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan.

Produksi pada triwulan ini didominasi oleh komoditas unggulan, antara lain cumi karet, tuna mata besar, madidihang, cakalang, dan layur. Capaian kumulatif yang tinggi tersebut tidak hanya menggambarkan keberhasilan PPS Cilacap dalam memenuhi target kinerja, tetapi juga menandakan adanya peningkatan produksi yang nyata dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II Tahun 2025.

Lonjakan positif ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor utama, antara lain masa musim penangkapan (*fishing season*) yang berlangsung optimal, peningkatan jumlah usaha penangkapan ikan, serta bertambahnya volume hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa produktivitas perikanan tangkap di PPS Cilacap terus mengalami tren peningkatan yang positif dan berkelanjutan.

Capaian Triwulan III Tahun 2024 dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2025

Nama IKU	Realisasi Triwulan III 2024	Realisasi Triwulan III 2025	Naik/Turun (%)
Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (ton)	29.892.15	26.063,95	(12,81)

Tabel 13 Perbandingan capaian realisasi IKU 2 Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2025

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, volume produksi perikanan tangkap di PPS Cilacap pada Triwulan III Tahun 2025 tercatat sebesar 26.063,95 ton, atau menurun 12,81% dibandingkan capaian Triwulan III Tahun 2024 yang mencapai 29.892,15 ton. Penurunan ini menunjukkan adanya tren

perlambatan aktivitas produksi yang cukup signifikan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perubahan musim penangkapan yang menyebabkan ketersediaan ikan pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, serta kondisi cuaca dan oseanografi yang kurang mendukung aktivitas penangkapan ikan di laut.

Selain itu, penundaan keberangkatan kapal setelah beberapa momen besar, seperti perayaan Idulfitri, Tahun Baru Imlek, dan tradisi Sedekah Laut, turut berkontribusi terhadap berkurangnya volume tangkapan. Faktor lain yang memperburuk kondisi tersebut adalah penurunan intensitas usaha penangkapan akibat meningkatnya biaya operasional, terutama untuk bahan bakar dan logistik, sehingga sebagian nelayan memilih untuk mengurangi frekuensi melaut.

Tidak hanya itu, fluktuasi sumber daya ikan akibat siklus alami maupun perubahan lingkungan juga berdampak pada menurunnya hasil tangkapan per kapal. Dengan demikian, meskipun secara internal target kinerja Triwulan III Tahun 2025 berhasil dicapai bahkan melampaui rencana, secara komparatif terhadap periode yang sama tahun 2024, volume produksi menunjukkan penurunan sebesar 12,81%. Kondisi ini mencerminkan adanya dinamika kompleks antara faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi aktivitas perikanan tangkap di PPS Cilacap.

Capaian Triwulan III Tahun 2025 terhadap Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (ton)	27.000	26.063,95	96,53

Tabel 14 Capaian Realisasi IKU 2 Triwulan III terhadap target Tahun 2025

Pada Triwulan III Tahun 2025, volume produksi perikanan tangkap di PPS Cilacap tercatat sebesar 26.063,95 ton. Jika dibandingkan dengan target Triwulan III sebesar 20.000 ton, capaian tersebut melampaui target dengan persentase 130,32%. Namun demikian, bila dibandingkan dengan realisasi Triwulan III Tahun 2024 yang mencapai 29.892,15 ton, terjadi penurunan produksi sebesar 12,81%.

Selain itu, jika dikaitkan dengan target tahunan Tahun 2025 sebesar 27.000 ton, capaian produksi hingga Triwulan III baru mencapai 96,53%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun capaian produksi pada tingkat triwulanan tergolong tinggi, secara tahunan masih terdapat selisih sekitar 936 ton yang perlu dipenuhi untuk mencapai target tahunan secara keseluruhan.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Capaian produksi perikanan tangkap di PPS Cilacap pada Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik, dengan total produksi mencapai 26.063,95 ton. Hasil tersebut didukung oleh musim penangkapan yang relatif optimal, peningkatan jumlah usaha penangkapan, serta dominasinya komoditas unggulan seperti cumi karet, tuna mata besar, madidihang, cakalang, dan layur, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap total produksi. Kondisi ini mencerminkan bahwa secara operasional, kegiatan penangkapan telah berjalan efektif dan produktif, sehingga mampu melampaui target triwulanan yang telah ditetapkan.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2024, terjadi penurunan volume produksi sebesar 12,81%, dari 29.892,15 ton menjadi 26.063,95 ton. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi cuaca dan oseanografi yang kurang mendukung, penundaan keberangkatan kapal setelah perayaan Idulfitri, Tahun Baru Imlek, dan tradisi Sedekah Laut, serta meningkatnya biaya operasional, terutama untuk bahan bakar dan logistik, yang menyebabkan sebagian nelayan mengurangi intensitas melaut. Selain itu, fluktuasi ketersediaan sumber daya ikan akibat siklus alami dan perubahan lingkungan juga berdampak terhadap penurunan hasil tangkapan per kapal.

Secara keseluruhan, capaian terhadap target tahunan Tahun 2025 telah mencapai 96,53%, dengan selisih sekitar 936 ton yang belum terpenuhi. Dengan demikian, meskipun kinerja produksi pada Triwulan III Tahun 2025 dapat dikatakan berhasil secara periodik, hasil ini juga menjadi indikasi adanya tantangan yang perlu diantisipasi pada triwulan berikutnya, khususnya terkait stabilitas upaya penangkapan, efisiensi biaya operasional, dan adaptasi terhadap kondisi oseanografi,

agar target tahunan Tahun 2025 dapat tercapai sepenuhnya serta menjaga tren produktivitas perikanan tangkap di PPS Cilacap tetap stabil dan berkelanjutan.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran sd TW III	Capaian Realisasi (%)
Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur (2341.QGA.001.051)				
OP	B. Operasional Unit Pengelola Perikanan LPP WPPNRI 573 dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur di Zona Industri Perikanan	28.726.000	2.900.000	10,10
	C. Bimbingan Teknis/Sosialisasi Cara Penanganan Ikan Yang BaikBagi Awak Kapal	8,523,000	7,653,500	89,80
Pengumpulan dan Verifikasi Data Log Book penangkapan Ikan (2341.QKB.001.051)				
KS	A. Pembinaan Nahkoda Dalam Pengisian Logbook	10.509.000	0	0
Cadangan (2338.999.999)				
KS	HA. Rapat Evaluasi dalam rangka implementasi EPIT dan PNBP Pasca Produksi	80,796,000	0	0
	IA. Rapat Evaluasi PIPP dan Harga Acuan Ikan	26,344,000	0	0
Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar (2338.BGA.002)				
DK	Penyiapan Tenaga Pendataan dalam Menunjang Pelaksanaan PNBP Pasca Produksi	145,600,000	75,358,200	51,75
TOTAL		**300.498.000**	**85.911.700**	**28,59**

Tabel 15 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 2

SASARAN KEGIATAN 3

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab

Sasaran kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan PPS Cilacap yang profesional, efisien, dan berorientasi pada prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Sasaran tersebut didukung oleh beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan dan ditargetkan pada Triwulan III Tahun 2025. Adapun capaian indikator kinerja pada periode tersebut disajikan dari uraian sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4

Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Indikator kinerja ini merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional pelabuhan perikanan yang didasarkan pada ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, yang merupakan perubahan atas Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008.

Penilaian ini merupakan bagian dari kegiatan manajemen pelabuhan yang bertujuan untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap, sekaligus menjadi acuan dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat perikanan.Ruang lingkup meliputi :

1. administrasi dan sistem informasi;
2. fasilitas pelabuhan perikanan;
3. pelayanan umum; dan
4. investasi dan industri.

Berdasarkan Tabel 16 dapat diketahui capaian kinerja operasional PPS Cilacap pada Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan nilai 96,50 berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja (EVKIN) yang mencakup 27 komponen penilaian. Pencapaian ini mencerminkan adanya peningkatan kinerja pelabuhan di berbagai aspek operasional, yang didorong oleh meningkatnya frekuensi kunjungan kapal, tingginya volume produksi perikanan yang didaratkan, serta optimalnya

pelayanan tambat labuh kapal.

Selain itu, konsistensi dalam pengiriman data melalui Sistem PIPP dan peningkatan efektivitas distribusi BBM kepada pelaku usaha perikanan turut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan nilai kinerja secara keseluruhan. Dengan demikian, capaian nilai EVKIN sebesar 96,50 ini tidak hanya menegaskan efektivitas pengelolaan operasional pelabuhan, tetapi juga mencerminkan adanya sinergi yang baik antara pelayanan, produktivitas, dan sistem informasi dalam mendukung kelancaran aktivitas perikanan tangkap di PPS Cilacap.

Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2025

Nama IKU	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	Capaian (%)
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	84	96,50	114,88

Tabel 16 Capaian IKU 4 Triwulan III Tahun 2025

Capaian Triwulan III Tahun 2024 dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2025

Nama IKU	Realisasi Triwulan III 2024	Realisasi Triwulan III 2025	Naik/ Turun (%)
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	93.67	96,50	3,02

Tabel 17 Perbandingan capaian realisasi IKU 4 Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2025

Jika dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2024 sesuia dengan yang ditampilkan pada tabel 17, capaian kinerja operasional PPS Cilacap pada Triwulan III Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 3,02%. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan yang signifikan dalam kualitas pelayanan dan efektivitas operasional pelabuhan, yang merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan standar pelayanan, memperkuat koordinasi antartim kerja, serta mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan tangkap.

Peningkatan tersebut juga menunjukkan keberhasilan PPS Cilacap dalam menjaga konsistensi kinerja serta meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan pengguna jasa, baik nelayan maupun pelaku usaha perikanan.

Capaian Triwulan III Tahun 2025 terhadap Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	84	96,50	114,88

Tabel 18 Realisasi IKU 4 Triwulan III terhadap target Tahun 2025

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Capaian Indikator Tingkat Operasional Pelabuhan pada Triwulan III Tahun 2025 tercatat sebesar 96,50, yang termasuk dalam kategori kinerja sangat baik. Nilai ini diperoleh berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Pelabuhan (EVKIN), yang menilai kinerja melalui 27 (dua puluh tujuh) komponen utama. Setiap komponen merepresentasikan aspek penting dalam operasional pelabuhan, mulai dari pelayanan kapal hingga distribusi logistik perikanan.

Tingginya capaian tersebut menunjukkan bahwa operasional pelabuhan berjalan optimal, dengan sejumlah indikator kunci yang mengalami peningkatan signifikan. Faktor-faktor yang mendorong capaian ini meliputi meningkatnya frekuensi kunjungan kapal, bertambahnya volume produksi hasil perikanan, peningkatan efisiensi layanan tambat labuh, frekuensi pengiriman data melalui Sistem PIPP yang lebih konsisten, serta kelancaran penyaluran BBM kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan. Peningkatan di berbagai sektor ini tidak hanya mencerminkan kenaikan aktivitas pelabuhan, tetapi juga menunjukkan perbaikan tata kelola layanan yang semakin terintegrasi dan responsif.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Triwulan III Tahun 2024, capaian kinerja operasional pelabuhan mengalami peningkatan sebesar 3,02%. Kenaikan ini menggambarkan adanya tren kinerja yang positif dan berkelanjutan di PPS Cilacap, yang mampu menjaga sekaligus meningkatkan efektivitas operasional dari tahun ke tahun. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa langkah-langkah

perbaikan yang dilakukan, baik dari sisi teknis maupun manajerial, telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja pelabuhan secara keseluruhan.

Dengan capaian tersebut, PPS Cilacap tidak hanya menunjukkan kemampuan dalam memenuhi target operasional, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung kelancaran rantai pasok perikanan tangkap secara nasional. Ke depan, konsistensi dalam penguatan layanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta sinergi antarpemangku kepentingan akan menjadi kunci utama dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelabuhan secara berkelanjutan.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran sd TW III	Capaian Realisasi (%)
Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar (2338.BGA.002)				
OP	A. Pengelolaan dan Operasional Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) dan Inspeksi Pembongkaran Ikan di Pelabuhan Perikanan	7.400.000	0	0
	B. Pelaksanaan pelayanan CPIB	24.720.000	0	0
Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan (2338.BGA.002.055)				
DK	C. Operasional Pelabuhan Perikanan	192.240.000	14.550.055	7,57
	J. Peningkatan Kecakapan Komunikasi bagi Petugas PTSA dalam mendukung Penerapan Budaya Pelayanan Prima di PPS Cilacap	12.147.000	0	0
	P. Pelaksanaan ISO 9001:2015 dan ISO14001:2015	77.647.000	0	0
	R. Pelaksanaan Pengamanan Terpadu PNBP Pascaproduksi di	51.370.000	0	0

Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran sd TW III	Capaian Realisasi (%)
	PPS Cilacap			
PU	BA. Penguatan Sistem Pembongkaran Hasil Tangkapan sebagai bagian dari Peningkatan Pelayanan Usaha di PPS Cilacap	47,740,000	19,900,000	41,68
Cikidang	K. Pelaksanaan K5 di PP Cikidang	92.282.000	6.850.000	7,42
	L. Pelaksanaan Pengamanan Terpadu dalam rangka mendukung K5 di PP Cikidang	23.100.00	0	0
Cadangan (2338.999.999)				
DK	BA. Video Profil Pelabuhan (RO Cadangan)	118.100.000	0	0
	IA. Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka mendukung implementasi EPIT dan PNBP Pasca Produksi	231,838,000	159,978,000	69
Cikidang	S. Peningkatan Kapasitas SDM PP Cikidang dalam rangka mendukung implementasi EPIT dan PNBP Pasca Produksi	16,375,000	4,026,000	24,59
Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar (2338.BGA.002.054)				
PU	A. Pelayanan Pengusahaan pelabuhan perikanan	29,612,000	8,529,233	28,80
Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan (2338.BGA.002.057)				
OP	A. Pembinaan Operator PIPP Bagi PP Binaan	17.520.00	0	0
	F. Dukungan Pengelolaan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan	164,492,000	4,466,500	2,71

Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran sd TW III	Capaian Realisasi (%)
DK	B. Video Profil Pelabuhan	62.921.000	0	0
	C. Penyusunan Laporan Tahunan Operasional Pelabuhan Perikanan	800.000	0	0
	D. Pameran/Promosi Pelabuhan Perikanan/Publikasi	44.132.000	0	0
Operasional dan Pemeliharaan Kantor (2342.EBA.994.002)				
DK	A. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.462.625.000	1.921.110.631	55,48
	B. Langganan Daya Dan Jasa	1.187.659.000	817.031.049	68,79
	D. Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	231.624.000	132.240.000	57,09
TKSP	C. Pemeliharaan Kantor	1.402.462.000	424.368.176	30,26
TOTAL		**7.498.806.000**	**3.513.049.644**	**46,85**

Tabel 19 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 4

INDIKATOR KINERJA UTAMA 7

Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggara pelabuhan perikanan yang mengoperasikan pelabuhan perikanan wajib:

1. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan
2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan hidup.

Dalam rangka mendukung ketentuan tersebut, PPS Cilacap memanfaatkan aplikasi SELARASKAN, yaitu sistem informasi berbasis web yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan. Aplikasi ini memuat program-program lingkungan beserta hasil pencapaian kualitas lingkungan yang

diperbarui secara berkala dan ditampilkan dalam bentuk skor pelabuhan sebagai ukuran kinerja pengelolaan lingkungan.

Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2025

Nama IKU	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	Capaian (%)
Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	30,1	94.66	314,49

Tabel 20 Capaian IKU 7 Triwulan III Tahun 2025

Berdasarkan Surat Direktur Kepelabuhanan Perikanan Nomor B.3258/DJPT.4/PI.310/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025 perihal Capaian dan Hasil Evaluasi Implementasi SELARASKAN Triwulan III Tahun Anggaran 2025 di Pelabuhan Perikanan UPT Pusat, diketahui bahwa capaian kinerja PPS Cilacap dalam pelaksanaan Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN) pada Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan sesuai dengan yang nilai yang dicantumkan pada tabel 20.

Dengan perolehan skor rata-rata sebesar 94,66, PPS Cilacap berhasil menempati peringkat kedua di antara 22 pelabuhan perikanan UPT Pusat, serta mempertahankan predikat “Sangat Baik”. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap indikator penilaian, tetapi juga menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam pengelolaan kebersihan, penataan lingkungan, dan peningkatan kualitas pelaporan, yang semakin baik dan konsisten dari waktu ke waktu.

Capaian Triwulan III Tahun 2024 dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2025

Nama IKU	Realisasi Triwulan III 2024	Realisasi Triwulan III 2025	Naik/ Turun (%)
Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	94.72	94.66	(0,06)

Tabel 21 Perbandingan capaian realisasi IKU 7 Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 21, apabila dibandingkan dengan realisasi SELARASKAN Triwulan III Tahun 2024 mencatat nilai 94.72, maka pada Triwulan III Tahun 2025 terjadi penurunan nilai menjadi 94,66, dengan nilai penurunan 0,02% Meskipun demikian, capaian tinggi yang diraih PPS Cilacap masih menyimpan sejumlah potensi tantangan yang perlu diantisipasi agar keberhasilan tersebut dapat dipertahankan pada periode berikutnya. Pelaksanaan SELARASKAN saat ini masih bergantung pada beberapa personel kunci yang memiliki pemahaman teknis mendalam mengenai indikator dan sistem pelaporan. Kondisi ini berisiko terhadap keberlanjutan pelaporan apabila terjadi rotasi pegawai atau peningkatan beban kerja. Selain itu, meskipun dokumentasi *evidence* telah sangat baik, pemeliharaan kondisi fisik di lapangan harus terus dijaga agar tetap sejalan dengan laporan administratif yang disampaikan. Peningkatan intensitas aktivitas pelabuhan pada musim puncak juga berpotensi memengaruhi kebersihan dan keteraturan lingkungan jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan dukungan sumber daya yang memadai.

Faktor lain yang juga perlu diperhatikan adalah keberlanjutan dukungan anggaran untuk pemeliharaan fasilitas dan sarana kebersihan. Tanpa dukungan pembiayaan yang konsisten, efektivitas kegiatan operasional lapangan dapat menurun, terutama dalam hal pengelolaan sampah dan perawatan infrastruktur lingkungan. Selain itu, sistem evaluasi SELARASKAN yang menekankan ketepatan dan kelengkapan dokumen digital menuntut PPS Cilacap untuk terus menjaga disiplin administrasi, karena keterlambatan atau kesalahan format pelaporan dapat berimplikasi langsung terhadap penurunan nilai, meskipun kondisi riil di lapangan sudah baik.

Capaian Triwulan III Tahun 2025 terhadap Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	30,1	94.66	314,49

Tabel 22 Capaian Realisasi IKU 7 Triwulan III terhadap target Tahun 2025

Pada Triwulan III Tahun 2025, hasil realisasi penilaian SELARASKAN mencapai angka 314,49%, yang termasuk dalam kategori "Sangat Baik". Pencapaian ini mencerminkan kinerja yang sangat optimal, terutama karena sebagian besar dokumen pendukung (*evidence*) berhasil dikumpulkan dengan lengkap dan memenuhi kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Hasil tersebut menunjukkan adanya komitmen dan konsistensi PPS Cilacap dalam pengelolaan dokumen serta pelaksanaan program yang sesuai dengan standar akuntabilitas kinerja, sehingga mampu mempertahankan kualitas tata kelola lingkungan pelabuhan secara berkelanjutan.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa PPS Cilacap mampu menindaklanjuti hasil evaluasi sebelumnya secara efektif. Komitmen pimpinan dan koordinasi lintas bidang berperan besar dalam keberhasilan tersebut. Kepemimpinan yang responsif, dukungan penuh dari seluruh tim kerja, serta budaya kerja kolaboratif di lingkungan pelabuhan menjadikan setiap temuan maupun rekomendasi dari evaluator dapat segera ditindaklanjuti dengan baik.

Perbaikan terhadap fasilitas lingkungan, seperti penataan area terbuka di sisi timur pelabuhan, penyediaan air bersih di musala, dan peningkatan sarana kebersihan, turut memperkuat kinerja pada indikator kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Langkah-langkah tersebut tidak hanya memenuhi aspek administratif

dalam pelaporan, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kenyamanan dan efisiensi aktivitas pelabuhan.

Kualitas pelaporan *evidence* juga menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan PPS Cilacap. Tim pelaksana SELARASKAN menunjukkan peningkatan dalam ketepatan waktu pengunggahan data, kelengkapan dokumen, serta kesesuaian format dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Penggunaan template *evidence* yang seragam, disertai koordinasi lintas bidang yang solid, membuat proses validasi data berjalan lebih cepat dan akurat. Hasil koreksi dari tim evaluator pusat menunjukkan bahwa PPS Cilacap berhasil memperbaiki sejumlah kekurangan administratif dari periode sebelumnya dan meningkatkan konsistensi antarindikator, sehingga meraih nilai tertinggi pada akhir triwulan.

Selain itu, keberhasilan PPS Cilacap juga didukung oleh meningkatnya kesadaran dan kedisiplinan pegawai serta pemangku kepentingan di lingkungan pelabuhan. Kegiatan rutin seperti "Jumat Bersih", kerja bakti bersama, dan edukasi pengelolaan limbah memperkuat budaya kerja yang peduli terhadap lingkungan. Kesadaran kolektif ini menjadi modal sosial penting yang menjadikan pelaksanaan SELARASKAN tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menciptakan pelabuhan yang bersih, tertib, dan ramah lingkungan.

Secara keseluruhan, keberhasilan PPS Cilacap dalam pelaksanaan SELARASKAN Triwulan III Tahun 2025 merupakan hasil sinergi antara komitmen manajemen, peningkatan sarana lingkungan, kedisiplinan pelaporan, serta budaya kerja yang solid di seluruh unit. Namun demikian, keberhasilan tersebut perlu terus dijaga melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan monitoring lapangan, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dengan upaya yang konsisten, PPS Cilacap berpotensi mempertahankan bahkan meningkatkan skor evaluasi pada triwulan berikutnya, serta terus menjadi salah satu pelabuhan perikanan dengan tata kelola lingkungan terbaik di Indonesia.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran sd TW III	Capaian Realisasi (%)
Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan (2338.BGA.002.055)				
DK	A. Gerakan Bersih Pantai	29.576.000	0	0
TKSP	F. Pelaksanan Tata Kelola Lingkungan di Pelabuhan Perikanan	36,225,000	5,250,000	14,49
Cadangan (2338.999.999)				
TKSP	TA. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pelabuhan dan Bandar Usaha Sehat (PBUS)	4.000.000	0	0
TOTAL		**69.801.000**	**5.250.000**	**7,52**

Tabel 23 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 7

SASARAN KEGIATAN 4

Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Sasaran kegiatan ini berfokus pada penguatan tata kelola sumber daya manusia dan sarana penangkapan ikan secara berkelanjutan di lingkungan PPS Cilacap. Upaya ini mencakup peningkatan kualitas dan keselamatan awak kapal perikanan, optimalisasi pengawasan terhadap kapal perikanan, serta penertiban dan pembinaan penggunaan alat penangkapan ikan (API) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut mencerminkan tingkat keberhasilan PPS Cilacap dalam melaksanakan pengelolaan kapal, awak kapal, dan alat penangkapan ikan secara efektif, tertib, serta ramah lingkungan. Pada Tahun 2025, indikator ini ditargetkan untuk mencapai peningkatan yang signifikan sejalan dengan program kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengenai pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan.

Capaian indikator kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut, yang menggambarkan hasil pelaksanaan kegiatan secara kuantitatif dan menunjukkan sejauh mana PPS Cilacap mampu merealisasikan target yang telah ditetapkan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 8

Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan

Indikator ini merupakan indikator yang menggambarkan jumlah dokumen kapal perikanan, berupa sertifikat kelaikan kapal, yang diterbitkan oleh PPS Cilacap.

Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dilakukan dengan menghitung jumlah dokumen kapal perikanan, baik surat ukur maupun sertifikat kelaikan kapal, yang diterbitkan oleh PPS Cilacap dalam periode tertentu. IKU ini merupakan indikator dengan periode pengukuran triwulanan, yang digunakan untuk menilai efektivitas layanan administrasi kapal perikanan serta tingkat kepatuhan terhadap ketentuan teknis kelaikan kapal.

Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2025

Nama IKU	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian
Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	680	1.283	188,68

Tabel 24 Capaian IKU 8 Triwulan III Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, indikator Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan menunjukkan hasil yang sangat baik. Target kinerja yang ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 680 kapal berhasil dilampaui dengan realisasi sebanyak 1.283 kapal, atau mencapai 188,68% dari target yang telah ditentukan. Capaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan penerbitan dokumen kapal perikanan, khususnya Surat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP), telah berjalan secara optimal dan tepat waktu di PPS Cilacap.

Indikator ini mengukur jumlah dokumen kapal perikanan, meliputi surat ukur dan/atau sertifikat kelaikan kapal, yang diterbitkan oleh PPS Cilacap sebagai bentuk pemenuhan terhadap ketentuan keselamatan dan kelayakan operasional kapal.

Sebagai indikator dengan periode pengukuran triwulanan, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan signifikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan perbandingan antara Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2025, jumlah kapal yang memenuhi ketentuan meningkat dari 751 kapal menjadi 1.283 kapal, atau mengalami kenaikan sebesar 70,84%, seperti yang digambarkan pada tabel 25.

Capaian Triwulan III Tahun 2024 dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2025

Nama IKU	Realisasi Triwulan III 2024	Realisasi Triwulan III 2025	Naik/Turun (%)
Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	751	1.283	70,84

Tabel 25 Perbandingan capaian realisasi IKU 8 Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2025

Peningkatan ini menandakan adanya efektivitas dalam proses pelayanan dan pemeriksaan kelaikan kapal, serta meningkatnya kesadaran pemilik kapal terhadap pentingnya kepemilikan dokumen perizinan yang sah. Selain itu, kinerja yang optimal ini juga tidak lepas dari peran aktif petugas pemeriksa kelaikan kapal dalam mempercepat proses verifikasi dan penerbitan dokumen, serta dukungan kebijakan internal PPS Cilacap yang mendorong percepatan layanan berbasis digital. Dengan demikian, capaian IKU tersebut mencerminkan kinerja yang efisien, terukur, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kepatuhan dan keselamatan operasional kapal perikanan di wilayah kerja PPS Cilacap.

Capaian Triwulan III Tahun 2025 terhadap Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	700	1.283	183,28

Tabel 26 Capaian Realisasi IKU 8 Triwulan III terhadap target Tahun 2025

Terhadap target Tahun 2025, jumlah Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan telah melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 183,28%. Capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan pelayanan perizinan dan pemeriksaan kelaikan kapal yang semakin optimal di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap. Tingginya tingkat kepatuhan pemilik kapal terhadap kewajiban perizinan juga mencerminkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya aspek keselamatan dan legalitas dalam kegiatan operasional kapal perikanan. Selain itu, peningkatan kinerja ini turut didukung oleh penerapan sistem pelayanan digital yang mempercepat proses administrasi, koordinasi yang solid antarunit teknis, serta pengawasan lapangan yang lebih intensif terhadap pemenuhan standar kelaikan kapal. Dengan demikian, hasil ini tidak hanya menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian target kinerja, tetapi juga memperkuat tata kelola keselamatan dan kepatuhan regulasi di lingkungan PPS Cilacap.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Pelaksanaan penerbitan Surat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) untuk kapal berizin daerah pada Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat optimal. Keberhasilan ini didukung oleh kebijakan penerbitan melalui mekanisme pembaruan tanpa pemeriksaan fisik kelaikan kapal, yang berkontribusi terhadap percepatan proses pelayanan serta peningkatan efisiensi waktu dan sumber daya.

Seluruh proses penerbitan SKKP telah dilaksanakan secara daring melalui aplikasi SICEFI, sehingga memberikan kemudahan bagi pemilik kapal dalam mengajukan permohonan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan. Selain itu, Pejabat Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan (PPKKP) melaksanakan pemeriksaan secara bergiliran berdasarkan beban kerja, sehingga setiap permohonan dapat diproses tepat waktu dan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan data capaian kinerja, terjadi peningkatan sebesar 183,28% dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas kebijakan digitalisasi layanan dan penyederhanaan prosedur penerbitan

SKKP, yang berdampak langsung pada meningkatnya kepatuhan pemilik kapal terhadap ketentuan perizinan dan kelaikan operasional.

Secara keseluruhan, capaian ini menggambarkan bahwa PPS Cilacap telah berhasil mengoptimalkan fungsi pelayanan kesyahbandaran serta memperkuat peran pengawasan terhadap armada perikanan berizin daerah melalui sistem pelayanan yang modern, cepat, efisien, dan berorientasi pada akuntabilitas publik.

SASARAN KEGIATAN 5

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Sasaran kegiatan ini berfokus pada peningkatan kualitas dan efektivitas layanan dukungan manajerial di lingkungan PPS Cilacap, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut telah ditetapkan dan diukur pada Triwulan III Tahun 2025, dengan capaian indikator kinerja yang disajikan pada uraian berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA 11

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)

Indikator ini merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang meliputi LHP Audit, Reviu, maupun Evaluasi, baik dalam bentuk surat maupun bab laporan, yang diterbitkan pada tahun 2019 hingga tahun 2023, dan telah ditindaklanjuti (berstatus dalam proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap selaku objek pengawasan.

Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2025

Nama IKU	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	Capaian (%)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	85	100	117,65

Tabel 27 Capaian IKU 11 Triwulan III Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPS Cilacap mencapai 100%. Seluruh rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal KKP telah ditindaklanjuti secara penuh, sebagaimana tercatat dalam aplikasi SIDAK KKP, seperti terlihat pada gambar berikut.

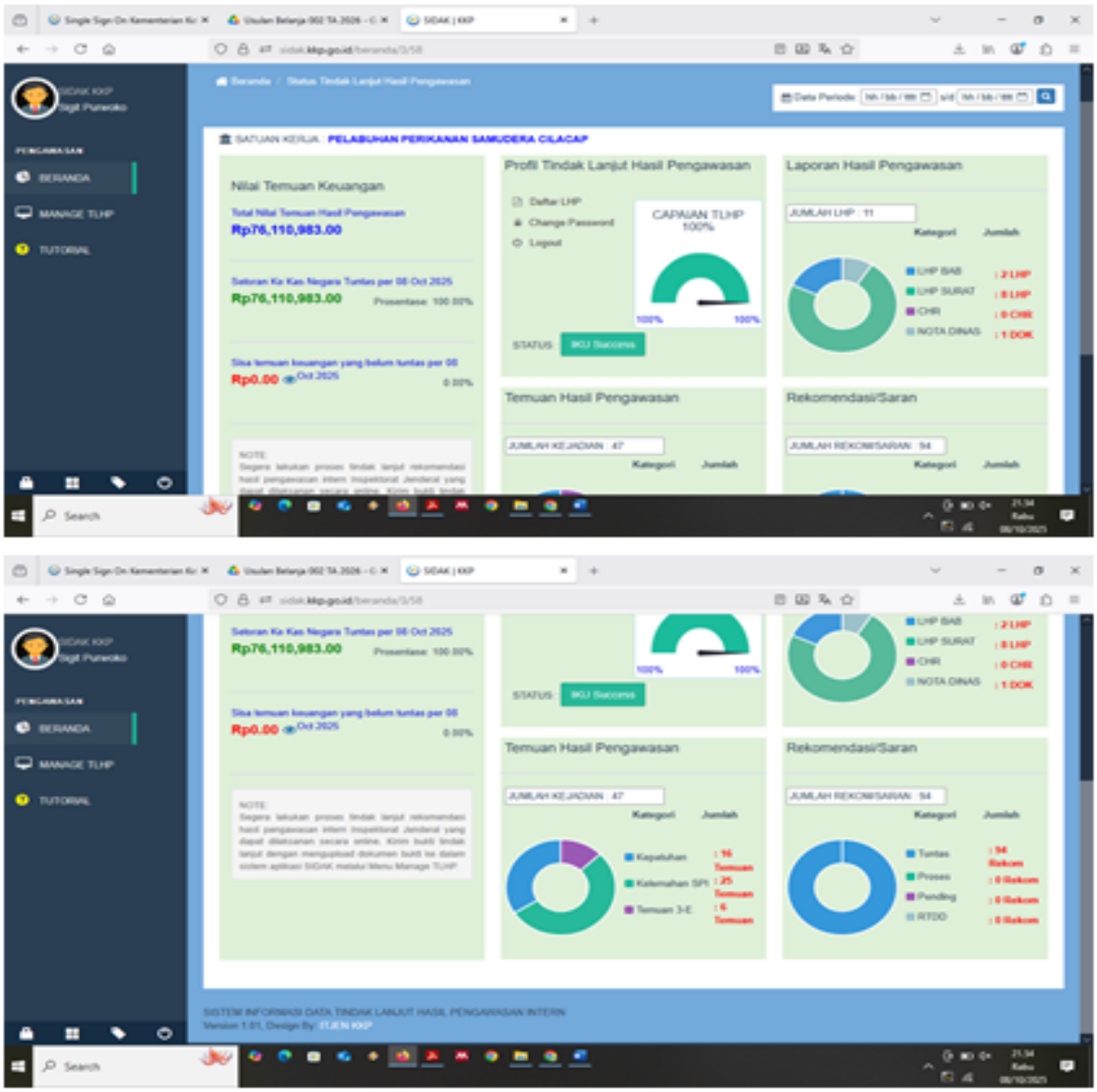

Gambar 7 *Screen shot* Aplikasi SIDAK per 8 Oktober 2025

Capaian Triwulan III Tahun 2024 dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2025

Nama IKU	Realisasi Triwulan III 2024	Realisasi Triwulan III 2025	Naik/Turun (%)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	100	100	-

Tabel 28 Perbandingan capaian realisasi IKU 11 Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2025

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tetap mencapai nilai maksimal, yaitu 100%, dan seluruh hasil evaluasi dari Inspektorat Jenderal KKP telah ditindaklanjuti.

Capaian Triwulan III Tahun 2025 terhadap Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	85	100	117,65

Tabel 29 Capaian Realisasi IKU 11 Triwulan III terhadap target Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPS Cilacap berhasil melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 117,65%.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Seluruh rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal KKP telah ditindaklanjuti sepenuhnya oleh PPS Cilacap. Tindak lanjut ini mencerminkan komitmen PPS Cilacap dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Respons cepat terhadap rekomendasi

pengawasan menunjukkan bahwa mekanisme kontrol internal dan koordinasi antar tim kerja di PPS Cilacap berjalan efektif, sehingga setiap temuan atau potensi perbaikan dapat segera ditangani secara tuntas.

Penyelesaian seluruh rekomendasi pengawasan juga menjadi indikator bahwa PPS Cilacap memiliki sistem manajemen kinerja dan tata kelola yang responsif, yang tidak hanya berfokus pada pencapaian *output*, tetapi juga memperhatikan proses sesuai prinsip-prinsip good governance. Dengan demikian, tindak lanjut atas hasil pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan integritas kelembagaan. Konsistensi dalam merespons pengawasan dan melakukan perbaikan menjadi kekuatan penting bagi PPS Cilacap dalam mendukung reformasi birokrasi serta peningkatan kinerja sektor perikanan tangkap secara menyeluruh.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran sd TW III	Capaian Realisasi (%)
Evaluasi dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Lingkup DJPT (2342.EBD.955.053)				
DK	A. Evaluasi dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit	16.980.000	-	-
Pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (2342.EBD.955.054)				
DK	A. Laporan Keuangan dan BMN	28.280.000	2.544.000	8.99
TOTAL		**45.260.000**	**2.544.000**	**5,62**

Tabel 30 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 11

INDIKATOR KINERJA UTAMA 14

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah melalui proses pengadaan barang/jasa, di mana pemerintah secara terbuka mengumumkan

pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pengukuran persentase RUP yang diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) mencerminkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa (PBJ), yang dihitung dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri, yaitu pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu nonpengadaan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1), PPS Cilacap telah beberapa kali melakukan revisi dan penyesuaian dalam perencanaan anggaran. Seluruh revisi tersebut ditindaklanjuti dengan perubahan RUP, dan seluruh nilai pengadaan sebesar Rp4.130.340.800,00 telah diumumkan secara penuh di SiRUP, sehingga capaian persentase RUP terumumkan mencapai 100%.

Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2025

Nama IKU	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Capaian
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	76	100	131,58

Tabel 31 Capaian IKU 14 Triwulan III Tahun 2025

Capaian Triwulan III terhadap Target Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini belum dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian tahun sebelumnya karena terdapat perubahan periode pengukuran. Pada Tahun 2024, IKU ini diukur secara tahunan, sedangkan pada Tahun 2025 mulai diterapkan pengukuran triwulanan. Perubahan mekanisme ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan pemantauan kinerja serta memastikan proses evaluasi berlangsung lebih terukur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, capaian pada Tahun

2025 berfungsi sebagai dasar awal *(baseline)* untuk menilai perkembangan kinerja secara periodik pada tahun berjalan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan melalui Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Nomor 381/SJ.7/PL.410/X/2025 tanggal 8 Oktober 2025, perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan III Tahun Anggaran 2025, diketahui bahwa capaian pengumuman RUP pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) telah dievaluasi secara menyeluruh.

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana satuan kerja di lingkungan KKP telah menyusun dan mengumumkan rencana pengadaannya secara transparan dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian indikator kinerja ini menjadi bagian penting dalam mengukur kepatuhan terhadap proses perencanaan pengadaan barang/jasa, sekaligus berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas dalam tata kelola anggaran.

Hasil evaluasi memberikan gambaran tentang keseriusan dan kesiapan unit kerja dalam merencanakan pengadaan, serta menjadi dasar untuk pembinaan dan perbaikan berkelanjutan. Dengan pengumuman RUP yang semakin terintegrasi melalui SIRUP, diharapkan proses pengadaan barang/jasa dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan KKP.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran sd TW III	Capaian Realisasi (%)
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (2342.CAN.955.051)				
DK	A. Pengadaan peralatan pengolah data dan komunikasi	394.000.000	0	0

Pengadaan sarana perkantoran (2342.EBB.951.051)				
DK	A. Pengadaan sarana penunjang perkantoran	30.000.000	0	0
Pengadaan dan Rehabilitasi prasarana perkantoran (2342.EBB.971.051)				
DK	A. Pengadaan Prasarana Perkantoran	100.000.000	0	0
TOTAL		**524.000.000**	**0**	**0**

Tabel 32 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 11

INDIKATOR KINERJA UTAMA 18

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif terhadap tingkat kepuasan masyarakat atas kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kegiatan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pelaksanaan SKM di PPS Cilacap dilakukan secara periodik setiap triwulan oleh Petugas Pelayanan Publik PPS Cilacap dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang diukur melalui skala Likert. Skala Likert digunakan untuk menilai sikap, pendapat, dan persepsi responden terhadap jenis layanan publik tertentu, di mana responden diminta menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan yang disajikan melalui beberapa pilihan jawaban. Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner menggunakan aplikasi SKM serta wawancara tatap muka dengan pengguna layanan.

Variabel pengukuran dalam SKM mengacu pada sembilan unsur yang ditetapkan dalam Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017, yaitu: (1) persyaratan, (2) prosedur, (3) waktu pelayanan, (4) biaya atau tarif, (5) produk layanan, (6) kompetensi pelaksana, (7) perilaku pelaksana, (8) sarana dan prasarana, serta (9) penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2025

Nama IKU	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Capaian
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,5	92,91	104,98

Tabel 33 Capaian IKU 18 Triwulan III Tahun 2025

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PPS Cilacap mencapai 92,91, dengan kriteria "A" dan kinerja unit pelayanan dinilai Sangat Baik. Indeks tersebut diperoleh dari pengolahan data sebanyak 118 responden yang memberikan penilaian terhadap 12 jenis pelayanan.

Capaian Triwulan III Tahun 2024 dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2025

Nama IKU	Realisasi Triwulan III 2024	Realisasi Triwulan III 2025	Naik/Turun (%)
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	90,68	92,91	2,46

Tabel 34 Perbandingan capaian realisasi IKU 18 Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data SKM sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap Nomor 2576/DJPT.1/OT.710/X/2025 Tanggal 9 Oktober 2025 Hal Penyampaian Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Periode Triwulan III tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa:

- Seluruh unsur pelayanan mendapatkan nilai dengan mutu kategori A (Sangat Baik), menandakan konsistensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- Unsur terbaik adalah U6 (Kecepatan Respon dan Kompetensi Petugas) dengan skor 3,807, menunjukkan kinerja petugas yang cepat dan kompeten dalam memberikan layanan.

- Unsur dengan nilai terendah terdapat pada U8 (Layanan Konsultansi) sebesar 3,647, dan U7 (Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas) sebesar 3,664.

Capaian Triwulan III terhadap Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,5	92,91	104,98

Tabel 35 Capaian Realisasi IKU 18 Triwulan III terhadap target Tahun 2025

Pada Tahun 2025, nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkup PPS Cilacap berhasil melampaui target, dengan capaian sebesar 104,98%.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di PPS Cilacap mencapai skor 92,91, yang termasuk dalam kategori mutu pelayanan Sangat Baik. Capaian ini mencerminkan kinerja pelayanan publik yang prima, berdasarkan penilaian 118 responden terhadap sembilan jenis layanan yang tersedia. Keberhasilan ini menunjukkan keandalan petugas dan efektivitas proses pelayanan, meskipun peningkatan pada aspek konsultasi dan kemudahan fitur tetap menjadi fokus untuk mencapai nilai optimal pada triwulan berikutnya.

Dalam mendukung capaian IKM, PPS Cilacap telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis, salah satunya melalui Surat Tugas Kepala Pelabuhan Nomor B.102/PPSC/KP.440/I/2025 tentang Penunjukan Tim Pelayanan Publik. Dalam surat tugas tersebut, petugas pelayanan diberikan mandat untuk melakukan survei secara langsung kepada pengguna layanan segera setelah pelayanan diberikan. Strategi ini bertujuan untuk memperoleh umpan balik yang aktual dan objektif sebagai dasar evaluasi dan peningkatan layanan.

Langkah tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan pentingnya pelaksanaan survei kepuasan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pelayanan kepada publik. Dengan pelaksanaan survei yang terstruktur dan responsif, PPS Cilacap terus berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan publik, sekaligus mengidentifikasi area yang masih perlu ditingkatkan agar kepuasan masyarakat dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada periode-periode berikutnya.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran sd TW III	Capaian Realisasi (%)
Cadangan (2338.999.999)				
KS	HA. Koordinasi lintas sektor monitoring dan evaluasi pelayanan terpadu satu atap	11.337.000	0	0
TOTAL		**11.337.000**	**0**	**0**

Tabel 36 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 18

Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, PPS Cilacap memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp136.049.385.000 untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan strategis. Anggaran tersebut dialokasikan ke dalam tiga kegiatan utama, yakni Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pengelolaan Sumber Daya Ikan, serta Dukungan Manajemen Internal di bawah lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Berdasarkan data realisasi anggaran hingga Triwulan III Tahun 2025, pelaksanaan anggaran pada komponen belanja pegawai menunjukkan capaian yang tinggi, namun juga mengindikasikan potensi ketidaksesuaian antara kebutuhan riil dengan pagu yang telah ditetapkan. Total pagu belanja gaji dan tunjangan PNS tercatat sebesar Rp3.597.580.000, dengan realisasi hingga akhir Triwulan III

mencapai Rp3.521.920.279 atau sekitar 97,9% dari total pagu. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh alokasi anggaran untuk belanja pegawai telah terserap secara efektif. Meskipun demikian, masih terdapat rencana realisasi tambahan pada Triwulan IV sebesar Rp997.099.221, sehingga total proyeksi realisasi mencapai Rp4.519.019.500. Dengan demikian, terdapat selisih terhadap pagu sebesar Rp921.439.500, yang menunjukkan bahwa kebutuhan belanja melebihi alokasi awal.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena menunjukkan potensi kelebihan realisasi anggaran (*overbudgeting*), yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penyesuaian gaji dan tunjangan PNS, penambahan formasi pegawai baru, serta keterlambatan pencairan anggaran pada periode sebelumnya yang baru direalisasikan pada Triwulan IV. Secara umum, capaian realisasi yang tinggi pada belanja pegawai menggambarkan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional dan pemenuhan hak pegawai telah berjalan baik. Namun, deviasi terhadap pagu perlu diantisipasi melalui penguatan mekanisme perencanaan dan penganggaran agar lebih akurat dan realistis. Evaluasi menyeluruh terhadap proyeksi kebutuhan belanja pegawai, termasuk pembaruan data kepegawaian dan perhitungan tunjangan, perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga kesesuaian antara kebutuhan aktual dan kemampuan keuangan yang tersedia.

Sementara itu, total realisasi belanja barang, modal, dan bantuan sosial (bansos) baru mencapai Rp12.061.217.635 atau sekitar 8,87% dari total pagu anggaran. Persentase ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran masih jauh di bawah target ideal (<70%), menandakan adanya keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan hambatan administratif. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah blokir anggaran pada belanja modal yang belum dapat direalisasikan hingga akhir Triwulan III. Dana yang terblokir direncanakan dibuka dan direalisasikan pada Triwulan IV Tahun 2025 dengan estimasi tambahan realisasi sebesar Rp20.021.709.078. Apabila blokir tersebut belum dibuka hingga akhir tahun, pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran berpotensi tertunda hingga tahun anggaran berikutnya.

Selain itu, terdapat anggaran Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk pekerjaan konstruksi sebesar Rp96.014.158.000 yang hingga akhir tahun belum

dapat diserap. Hal ini disebabkan oleh penjadwalan ulang pekerjaan konstruksi yang semula direncanakan pada Triwulan IV, namun tertunda dan baru akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dengan demikian, total realisasi anggaran hingga akhir Tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp20.021.709.078, sedangkan sisa pagu yang belum terealisasi mencapai Rp116.037.675.822. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi teknis, administratif, maupun kesiapan pelaksanaan di lapangan.

Oleh karena itu, langkah-langkah percepatan perlu segera dilakukan, terutama terkait pembukaan blokir anggaran, penyelesaian proses administrasi, serta koordinasi antarunit pelaksana dan lembaga terkait agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal. Optimalisasi waktu pelaksanaan pada Triwulan IV menjadi kunci untuk meningkatkan serapan anggaran sekaligus memastikan bahwa *output* dan *outcome* program dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan.

Secara keseluruhan, meskipun kinerja realisasi anggaran menunjukkan capaian yang bervariasi antarjenis belanja, hal ini menegaskan perlunya peningkatan akurasi perencanaan, penguatan koordinasi pelaksanaan, dan pengendalian keuangan yang lebih adaptif. Upaya tersebut penting untuk menjaga disiplin fiskal, efektivitas program, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sehingga pelaksanaan anggaran di masa mendatang dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah menetapkan target kinerja yang dituangkan dalam kontrak kinerja. Dalam kontrak kinerja tersebut, terdapat peta strategi yang mencakup lima Sasaran Kinerja (SK) yang ingin dicapai melalui 18 Indikator Kinerja Utama (IKU). Setiap Sasaran Kinerja memiliki ukuran pencapaian yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama.

Memasuki akhir Triwulan III Tahun 2025, pencapaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat positif. Seluruh SK dan IKU berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan efisien. Hal ini menjadi bukti bahwa kegiatan tetap optimal meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran di tingkat nasional.

Capaian kinerja tersebut tercermin melalui hasil pengukuran menggunakan aplikasi resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id), di mana PPS Cilacap mencatatkan capaian sebesar 118,23% pada Triwulan III. Sementara itu, akumulasi capaian hingga akhir Triwulan III mencapai 117,79%. Kedua nilai tersebut berada dalam kategori “Istimewa” (rentang nilai 110–120) dan ditandai dengan indikator berwarna biru, dengan rincian sebagai berikut:

1. IKU 1 - Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebanyak Rp. 3.996,61 Juta atau 157,96% dari target Triwulan III yaitu Rp. 2.530,18 Juta;
2. IKU 2 - Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebanyak 26.063,95 Ton atau 130.32% dari target Triwulan III yaitu 20.000 Ton;

3. IKU 4 - Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai dengan Nilai 96,5 atau sebesar 114,88% dari target Triwulan III yaitu Nilai 84;
4. IKU 7 - Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai Nilai 94,66 atau sebesar 314,49% dari target Triwulan III yaitu Nilai 30,1;
5. IKU 8 - Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan tercapai sebanyak 1.283 Kapal atau 188,68% dari target Triwulan III yaitu 680 Kapal;
6. IKU 11 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebesar 100% atau 117,65% dari target Triwulan III yaitu 85%;
7. IKU 14 - Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai 100 Persen atau 131,58% dari target Triwulan III yaitu 76%; dan
8. IKU 18 - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap mendapatkan Nilai 92,91 atau 104,98% dari target Triwulan III yaitu Nilai 88,5.

Dengan demikian, meskipun secara umum capaian kinerja PPS Cilacap selama Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat tantangan yang perlu segera ditindaklanjuti. Pemetaan tantangan dan langkah korektif yang tepat, PPS Cilacap diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya.

Permasalahan dan Tindaklanjut

Meskipun capaian kinerja PPS Cilacap pada Triwulan III Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik dan berada pada kategori "Istimewa", terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius dan penanganan segera agar tidak berdampak terhadap keberlanjutan capaian kinerja di periode selanjutnya. Berikut adalah beberapa tantangan beserta langkah tindak lanjut yang telah dan akan diambil:

1. **Penurunan Penerimaan PNBP (IKU 1 - Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap)**

   Penerimaan PNBP mengalami penurunan sebesar 19,67% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan sistem pembayaran dan berkurangnya kontribusi beberapa jenis layanan, seperti penggunaan tanah dan bangunan, *cold storage*, serta jasa pelabuhan lainnya. Meskipun target triwulan tercapai, kondisi ini menjadi indikator adanya dinamika dalam pola pelayanan.

   Tindak Lanjut: PPS Cilacap akan mengevaluasi layanan yang mengalami penurunan kontribusi dan menyusun strategi penyesuaian model penerimaan guna menjaga stabilitas arus kas serta mengantisipasi fluktuasi pada periode berikutnya.

2. **Penurunan Produksi Perikanan Akibat Cuaca (IKU 2 - Volume Produksi Perikanan Tangkap)**

   Volume produksi perikanan mengalami penurunan sebesar 12,8% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Faktor penyebabnya meliputi penundaan keberangkatan kapal setelah hari besar seperti Idul Fitri, Tahun Baru Imlek, dan Sedekah Laut, serta kondisi cuaca buruk selama periode tersebut. Penurunan ini bersifat eksternal dan musiman, sehingga tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pelaku usaha maupun pihak pelabuhan.

   Tindak Lanjut: PPS Cilacap memperkuat koordinasi dengan nelayan dan kelompok usaha perikanan untuk mengoptimalkan waktu melaut di luar periode hari besar dan musim buruk. Selain itu, peningkatan layanan informasi cuaca dan potensi daerah penangkapan ikan (DPI), serta pengembangan kegiatan alternatif seperti perawatan kapal atau pengolahan hasil perikanan saat cuaca buruk, dilakukan untuk menjaga produktivitas. Evaluasi berkala terhadap pola musim dan kalender operasional juga diterapkan untuk meminimalkan dampak faktor eksternal.

3. **Tingginya Konsumsi Listrik dan Air (IKU 7 - Nilai Pengendalian Lingkungan)**

   Nilai pengendalian lingkungan belum mencapai hasil maksimal (40), ditandai

dengan meningkatnya konsumsi listrik dan air berlebih pada bulan Juli dan September. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi pemanfaatan sumber daya perlu ditingkatkan.

Tindak Lanjut: Dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola konsumsi energi dan air, serta penerapan kebijakan penghematan yang lebih disiplin. Kampanye internal dan sistem pemantauan berkala diperkuat untuk mendorong efisiensi penggunaan sumber daya.

4. **Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (IKU 18 - Survei Kepuasan Masyarakat)**

   Secara keseluruhan, masyarakat memberikan apresiasi terhadap pelayanan yang cepat, ramah, dan responsif, namun mendorong peningkatan kenyamanan dan fasilitas fisik pelabuhan.

   Tindak Lanjut: PPS Cilacap melaksanakan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, antara lain:

   - Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan melalui pemeliharaan dan perbaikan fasilitas, termasuk area terbuka di sisi timur pelabuhan serta sarana kebersihan dan ketersediaan air bersih di mushola.
   - Optimalisasi layanan konsultasi dan pengaduan dengan memperkuat sosialisasi kanal daring dan luring.
   - Sosialisasi standar waktu pelayanan (SLA) untuk meningkatkan efisiensi proses administratif.
   - Pengusulan pengembangan sistem integrasi aplikasi EPIT dan PKL agar proses administrasi kapal dan awak kapal lebih cepat dan efisien.
   - Penanganan isu pendangkalan kolam tambat labuh melalui proyek kerja sama dengan *Agence Française de Développement* (AFD).
   - Pengadaan kembali formulir pelayanan yang sempat ditiadakan karena efisiensi anggaran akan diusulkan pada Tahun Anggaran 2026.

5. **Realisasi Anggaran Masih Rendah**

   Hingga akhir Triwulan III, realisasi penyerapan anggaran baru mencapai 8,87%, jauh di bawah target ideal (<70%). Hal ini disebabkan keterlambatan

pelaksanaan kegiatan dan hambatan administratif, termasuk blokir anggaran pada belanja modal yang belum dapat direalisasikan.

Tindak Lanjut: Perlu percepatan proses administrasi, penyelesaian kontrak kegiatan tepat waktu, serta peningkatan koordinasi antarunit pelaksana agar realisasi anggaran pada triwulan berikutnya lebih optimal.

Dengan mengidentifikasi permasalahan sejak dini dan mengambil langkah korektif yang terarah, PPS Cilacap optimis dapat mempertahankan serta meningkatkan kinerja di Triwulan IV. Keterlibatan aktif seluruh tim kerja, sinergi antar tim kerja, serta penguatan tata kelola menjadi kunci utama dalam menjawab tantangan dan mencapai target tahunan secara menyeluruh.

Penutup

Sejalan dengan capaian terhadap Target Sasaran Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan upaya penyelesaian kendala agar terkendali, kinerja pada dasarnya mencerminkan komitmen, konsistensi, dan konsekuensi dalam merencanakan, melaksanakan, mencapai, serta menghasilkan *output* yang berkualitas. Output tersebut akan berdampak pada kualitas hasil yang diharapkan. Untuk mencapainya, diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh pihak dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Komitmen harus direncanakan secara cermat, intuitif, solutif, konstruktif, dan inovatif untuk mengemban amanah yang tercermin dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

Hasil kinerja yang dicapai tidak hanya menjadi laporan yang didokumentasikan dan diarsipkan, tetapi juga menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan ke depan serta dapat memberikan dampak nyata dalam penerapan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, termasuk pemenuhan komitmen dalam RPJMN, Visi KKP, Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, serta Rencana Strategis PPS Cilacap.

Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian indikator kinerja harus dilakukan secara cermat dan matang, dengan mempertimbangkan sasaran dan tujuan organisasi, kemampuan sumber daya yang

tersedia, serta faktor-faktor yang memengaruhi manajemen perubahan. Strategi dan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran, serta pemantauan perkembangan isu dan permasalahan terkini, harus selalu diupayakan untuk memulai langkah pada periode mendatang.

Dengan demikian, Laporan Kinerja (LKj) PPS Cilacap Periode Triwulan III Tahun 2025 diharapkan menjadi "cermin" sekaligus pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang. LKj ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan langkah dan tindakan di masa mendatang, mendukung tercapainya prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selain itu, LKj ini berkontribusi dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada periode berikutnya.

LAMPIRAN DAN DATA DUKUNG

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN *www.kkp.go.id*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Imas Masriah**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 April 2025

Pihak Kedua, Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap	Pihak Pertama, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Lotharia Latif	**Imas Masriah**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Juta)	3.373,57
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton)	27.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	85
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	33
		7	Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	30,1
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	700
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	85
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)	87
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	76
		15	Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	81
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	92
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	71,5
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,5

NO	KEGIATAN	PAGU
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	119.172.546.000
2	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	39.235.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	16.837.604.000
TOTAL		**136.049.385.000**

Jakarta, 15 April 2025

Pihak Kedua, Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap	Pihak Pertama, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Lotharia Latif	**Imas Masriah**

MANUAL INDIKATOR KINERJA 2025

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

Kata Pengantar

Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia serta kesehatan sehingga Manual IKU Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2025 dapat tersusun. Manual IKU ini disusun sebagai pedoman dalam mengukur Indikator Kinerja Utama PPS Cilacap, sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat dipantau pencapaiannya.

Cilacap, 16 April 2025
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Cilacap

Imas Masriah, S.Pi

Daftar Isi

1. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
2. Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
3. Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
4. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
7. Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
8. Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan
9. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan
10. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK)
11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
12. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
13. IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
15. Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
16. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
17. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
18. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap

1. Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Cilacap

Sasaran Kegiatan	:	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPS Cilacap
Nama IKU	:	Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Cilacap
Definisi	:	• Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. • Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan non Sumber Daya Alam (SDA) diantaranya pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, pendapatan jasa layanan (BLU) dan hak negara lainnya (TGR dan denda tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi)
Formula Perhitungan	:	Merupakan nilai PNBP non SDA dari sektor PT di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Keterangan: Nilai TW I = capaian TW I; Nilai TW II = capaian TW I + TW II; Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III; Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV
Satuan	:	Juta Rupiah
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
Sumber Data	:	PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	3.373,57 Juta

2. Volume produksi perikanan tangkap di PPS Cilacap

Sasaran Kegiatan	:	Produktivitas perikanan tangkap di PPS Cilacap meningkat
Nama IKU	:	Volume produksi perikanan tangkap di PPS Cilacap
Definisi	:	Jumlah produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) di seluruh provinsi di Indonesia dalam bentuk basah.
Formula Perhitungan	:	$Prod_{Perikanan\ Tangkap} = Prod_{PTL} + Prod_{PTPD}$

Keterangan:
$Prod_{PTL}$ = Produksi Perikanan Tangkap Laut
$Prod_{PTPD}$ = Produksi Perikanan Tangkap Perairan Darat

Keterangan:
Nilai TW I = capaian TW I
Nilai TW II = capaian TW I + TW II
Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III
Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV

Satuan	:	Ton
Tingkat Validitas	:	Outcome
Sumber Data	:	PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	Komponen Pembentuk
Target	:	27.000 Ton

3. Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPS Cilacap

Sasaran Kegiatan	:	Pengelolaan PPS Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab
Nama IKU	:	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPS Cilacap
Definisi	:	• Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan. Fungsi pengusahaan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan perikanan. • Sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 jenis PNBP yang berlaku di KKP diantaranya meliputi penerimaan dari Pelabuhan Perikanan, diantaranya melalui sewa laha/gedung/bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisas atau evaluasi permohonan pengusahaan.
Formula Perhitungan	:	Indikator I : $\frac{Hasil\ Analisis\ Kesesuaian\ Permohonan\ Pengusahaan\ terhadap\ usulan\ pengusahaan\ baru/perpanjangan\ yang\ dianalisa\ dan/atau\ dievaluasi}{Total\ jumlah\ usulan\ pengusahaan\ yang\ masuk\ di\ (nama\ satker)}\ x\ 80\%$ Indikator II : Ruang lingkup pelayanan pengusahaan yang terstandarisasi (SOP/ISO/Standar Pelaksanaan Lainnya) = 20 % Persentase Pengusahaan = Indikator I + Indikator 2
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Hasil Analisis Kesusaian Permohonan Pengusahaan
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	100 %

4. Tingkat Kinerja PPS Cilacap

Sasaran Kegiatan	:	Pengelolaan PPS Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab
Nama IKU	:	Tingkat Kinerja PPS Cilacap
Definisi	:	Merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) administrasi dan sistem informasi; 2) fasilitas pelabuhan perikanan; 3) pelayanan umum; 4) investasi dan industri.
Formula Perhitungan	:	$NK = \frac{Bobot(A) \times Skala\ (S)}{4}$

Keterangan :
1. Sangat baik jika NK = (86 - 100)
2. Baik jika NK = (66 - 85)
3. Sedang jika NK : (46- 65)
4. Kurang jika NK = (0 - 45)

Parameter penilaian meliputi:
Administrasi dan Sistem Informasi (9 parameter), fasilitas pelabuhan perikanan (6 parameter), pelayanan publik (9 parameter), investasi dan industri (3 parameter).

Keterangan:
Nilai TW I = capaian TW I; Nilai TW II = capaian TW II; Nilai TW III = capaian TW III; Nilai TW IV = capaian TW IV

Satuan	:	Nilai	Polarisasi	:	Maximize
Tingkat Validitas	:	Output kendali rendah	Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Sumber Data	:	PPS Cilacap	Metode Cascading	:	Buat Baru
Pola Perhitungan	:	Rata-rata	Target	:	84

*Penentuan target berdasarkan capaian tahun sebelumnya
Jika tercapai kategori Sangat Baik, maka target min. 87
Jika tercapai kategori Baik, maka target min. 66

5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPS Cilacap

Sasaran Kegiatan	:	Pengelolaan PPS Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab
Nama IKU	:	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPS Cilacap
Definisi	:	Merupakan indikator yang menunjukkan: 1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%) 2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%) 3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%)
Formula Perhitungan	:	1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan = jumlah persetujuan berlayar / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 …… (x1) 2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan yang diterbitkan = jumlah kapal yang diterbitkan STBLK / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 …… (x2) 3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan = 100 - [(jumlah permintaan verifikasi SHTI/ jumlah SHTI yang diterbitkan) x 100]…… (x3) Tingkat Pelayanan = x1 + x2 + x3
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	85

6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPS Cilacap

Sasaran Kegiatan	:	Pengelolaan PPS Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab
Nama IKU	:	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPS Cilacap
Definisi	:	Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Pengembangan fasilitas eksisting (ha)}}{\text{Luas pelabuhan perikanan sesuai masterplan (ha)}}$ X 100%
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali rendah
Sumber Data	:	PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	33

7. Nilai Pengendalian Lingkungan di PPS Cilacap

Sasaran Kegiatan	:	Pengelolaan PPS Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab
Nama IKU	:	Nilai Pengendalian Lingkungan di PPS Cilacap
Definisi	:	• Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formular UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL. • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan perikanan yang mengoperasikan Pelabuhan perikanan harus: 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan. • SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skore Pelabuhan.
Formula Perhitungan	:	Skor Indikator Program (60%) + Skor Indikator Hasil (40%) Penilaian berdasarkan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN) **Kategori** Kurang : 0-30 Baik : >61 - 80 Cukup : >30-60 Sangat Baik : >81 – 100

Keterangan:
Indikator Program : Mandatori (Program Wajib yang diupdate) dan Voluntary (Program tidak wajib yang berjalan di Pelabuhan Perikanan)
Indikator Hasil : Kebersihan Pelabuhan, pengelolaan sampah, kualitas udara, kualitas air, penggunaan listrik, penggunaan air, pengelolaan limbah B3 dan kepatuhan regulasi.

Keterangan:
Nilai TW I = capaian TW I; Nilai TW II = capaian TW II; Nilai TW III = capaian TW III; Nilai TW IV = capaian TW IV

Satuan	:	Nilai	Polarisasi	:	Maximize
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi	Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Sumber Data	:	PPS Cilacap	Metode Cascading	:	Buat Baru
Pola Perhitungan	:	Rata-rata	Target	:	30,1

8. Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan

Sasaran Kegiatan	:	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPS Cilacap
Nama IKU	:	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan
Definisi	:	Merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh (nama satker)
Formula Perhitungan	:	Jumlah kapal yang diterbitkan dokumen kapal perikanannya (sertifikat kelaikan kapal) oleh (nama satker) Keterangan: Nilai TW I = capaian 2023 + 2024 + TW I; Nilai TW II = capaian 2023 + 2024 + TW I + TW II; Nilai TW III = capaian 2023 + 2024 + TW I + TW II + TW III; Nilai TW IV = capaian 2023 + 2024 + TW I + TW II + TW III + TW IV
Satuan	:	Kapal
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	700 Kapal

9. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

Sasaran Kegiatan : Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPS Cilacap

Nama IKU : Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

Definisi :

- Merupakan indikator yang menunjukan pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024.
- Tujuan implementasi indikator ini adalah untuk menjamin kepatuhan regulasi serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan awak kapal perikanan.
- Tingkat pemenuhan dibagi kedalam 4 kategori sebagai berikut:
  Nilai ≤ 0,25 kategori "Kurang";
  Nilai > 0,25 s.d. < 0,50 kategori "Cukup";
  Nilai > 0,50 s.d. < 0,75 kategori "Baik";
  Nilai > 0,75 s.d. 1,00 kategori "Sangat Baik";

Formula Perhitungan : Jumlah SPB terbit dikalikan dengan koefisien kondisi pemenuhan persyaratan bekerja dibagi dengan jumlah SPB terbit sesuai dengan range GT kapal. Total nilai adalah jumlah nilai masing-masing kepatuhan di setiap range GT Kapal dibagi dengan jumlah kategori range GT Kapal yang terdapat di Pelabuhan.

(1) Kepatuhan s.d. 5 GT $= \frac{(e \times 0{,}25) + (f \times 0{,}50) + (g \times 0{,}75) + (h \times 1{,}00)}{\text{Jumlah SPB s.d. 5 GT}}$

(2) Kepatuhan > 5 s.d. 30 GT $= \frac{(e \times 0{,}25) + (f \times 0{,}50) + (g \times 0{,}75) + (h \times 1{,}00)}{\text{Jumlah SPB > 5 s.d. 30 GT}}$

(3) Kepatuhan >30 s.d. 100 GT $= \frac{(e \times 0{,}25) + (f \times 0{,}50) + (g \times 0{,}75) + (h \times 1{,}00)}{\text{Jumlah SPB >30 s.d. 100 GT}}$

(4) Kepatuhan ≥100 GT $= \frac{(e \times 0{,}25) + (f \times 0{,}50) + (g \times 0{,}75) + (h \times 1{,}00)}{\text{Jumlah SPB ≥100 GT}}$

(5) Kepatuhan ≥100 GT Laut Lepas $= \frac{(e \times 0{,}25) + (f \times 0{,}50) + (g \times 0{,}75) + (h \times 1{,}00)}{\text{Jumlah SPB ≥100 GT Laut Lepas}}$

(6) Kepatuhan ≥300 GT $= \frac{(e \times 0{,}25) + (f \times 0{,}50) + (g \times 0{,}75) + (h \times 1{,}00)}{\text{Jumlah SPB ≥300 GT}}$

Total Nilai $= \frac{(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)}{\text{6 (sesuai range ukuran kapal yg ada di pelabuhan)}}$

Keterangan :
(a) Chek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB
(b) Chek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (sesuai SE)
(c) Chek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (Wajib lengkap 0.75 untuk kapal >100 Laut Lepas)
(d) Chek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (wajib 1,00 dilengkapi untuk kapal >300GT)
(e) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (a)
(f) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (b)
(g) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (c)
(h) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (d)

9. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	Output kendali rendah
Sumber Data	:	Timja Kesyahbandaran
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Semesteran
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	0,26 (Kategori Cukup)

10. Nilai PM Pembangunan ZI PPS Cilacap (yang telah dinilai WBK)

Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	:	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan PPS Cilacap
Definisi	:	Merupakan penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK di (nama satker) yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik
Formula Perhitungan	:	Merupakan indikator dari nilai hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang mencakup 6 Area Pengungkit dan 2 Area Komponen Hasil serta mengacu kepada Juknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Data dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Unit Kerja
Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	75,5

11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPS Cilacap

Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPS Cilacap
Definisi	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan
Formula Perhitungan	:	$\boldsymbol{RHP = \frac{\sum N_t}{\sum N}\ x\ 100\%}$ Keterangan: RHP = Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan ΣNt = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh DJPT ΣN = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada DJPT
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	Dipersempit
Target	:	85

12.Nilai PM SAKIP PPS Cilacap

Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	:	Nilai PM SAKIP PPS Cilacap
Definisi	:	Indikator Penilaian Mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.
Formula Perhitungan	:	Nilai PM SAKIP (nama satker) dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di (nama satker).

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Dipersempit
Target	:	88

13.Indeks Profesionalitas ASN di PPS Cilacap

Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	:	Indeks Profesionalitas ASN di PPS Cilacap
Definisi	:	Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
Formula Perhitungan	:	Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni : Kualifikasi (diukur dari riwayat Pendidikan); Kompetensi (diukur dari riwayat pengembangan kompetensi); Kinerja (diukur dari penilaian prestasi kerja PNS); dan Disiplin Pegawai (diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami).
Satuan	:	Indeks
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Biro Kepegawaian
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Semesteran
Metode Cascading	:	Dipersempit
Target	:	87

14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di PPS Cilacap

Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	:	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di PPS Cilacap
Definisi	:	Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di (nama satker). Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).
Formula Perhitungan	:	$\frac{Nilai\ Rencana\ Umum\ PBJ\ yang\ diumumkan\ pada\ SIRUP}{Pagu\ Pengadaan\ Barang/Jasa}\ x\ 100\%$
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	Komponen Pembentuk
Target	:	76

15.Persentase Pengelolaan BMN di PPS Cilacap

Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	:	Persentase Pengelolaan BMN di PPS Cilacap
Definisi	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Formula Perhitungan	:	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di (nama satker) diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur: • Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 12,5%); • Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST (bobot 25%); • Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); • Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%); • Penyusunan/Penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Dipersempit
Target	:	81

16. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPS Cilacap

Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	:	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPS Cilacap
Definisi	:	Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Formula Perhitungan	:	Peraturan DJPB per-4/PB/2021 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA belanja K/L Menggunakan PMK No.195/PMK 05 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L, dengan bobot penilaian sebagai berikut: 1) Penyerapan Anggaran; 2) Data Kontrak; 3) Penyelesaian Tagihan; 4) Konfirmasi Capaian Output; 5) Pengelolaan UP dan TUP ; 6) Revisi DIPA; 7) Deviasi Hal.3 DIPA; 8) LPJ Bendahara; 9) Renkas; 10) Kesalahan SPM; 11) Retur SP2D; 12) Pagu Minus ; 13) Dispensasi
Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Semesteran
Metode Cascading	:	Dipersempit
Target	:	92

17.Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) PPS Cilacap

Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) PPS Cilacap
Definisi	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.
Formula Perhitungan	:	NKPA (nama satker) didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian RO, Penggunaan SBK, dan Efisiensi dengan sesuai bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75
Efisiensi (25)	1. Penggunaan SBK	10
	2. Efisiensi SBK	15

Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	Output kendali rendah
Sumber Data	:	PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Komponen Pembentuk
Target	:	71,5

18.Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPS Cilacap

Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	:	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPS Cilacap
Definisi	:	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
Formula Perhitungan	:	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/ diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindaklanjut pengisian SKM di lingkup KKP
Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	Dipersempit
Target	:	88,5

Terima Kasih

EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN III
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
TAHUN 2025

SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	Unit PJ	KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD TW III 2025	Target Kegiatan	Satuan target Kegiatan	TARGET			REALISASI			TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
									Jul	Aug	Sep	Jul	Aug	Sep			
Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Juta)	Timja PU	Pelaksanaan tata kelola dan operasional pengusahaan di pelabuhan perikanan (2338.BGA.002.054)			2	Lembaga									
			PU	C Sosialisasi Pemanfaatan Tanah dan Bangunan di Pelabuhan	13,960,000	0									menunggu penetapan nilai sewa terbit, dan koordinasi dg narasumber	akan direvisi untuk dialihkan ke kegiatan sosialisasi PP 28 karena kegiatan ini memiliki substansinya sama,	
			PU	G Kepatuhan Usaha dan Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan	10,720,000	0									pelaksanaan kegiatan menunggu arahan dari Eselon 1	anggaran masuk dalam blokir	
			Cikidang	D Pelayanan Pengusahaan pelabuhan perikanan di PP Cikidang Guna Mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasca Produksi	43,900,000	2,600,000				V	V					terkendala ketersediaan uang cash di bendahara	
				Cadangan (2338.999.999)													
			Cikidang	FA Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan Pelabuhan Perikanan di PP CIKIDANG Guna Mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasca Produksi	34,580,000	0				V	V					terkendala ketersediaan uang cash di bendahara	
			OP	D Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan/Penerapan PNBP Pasca Produksi	8,073,000	1,040,000			V	V		V			untuk kegiatan rapat masih akan dilakukan koordinasi dengan tim Kesyahbandaran karena ketua tim PNBP adalah Kesyahbandaran		
Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton)	Timja OP	Operasionalisasi Lembaga		-	1	Lembaga									
			OP	B Operasional Unit Pengelola Perikanan LPP WPPNRI 573 dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur di Zona Industri Perikanan	28,726,000	2,900,000					V		V		lebih cepat dari target yang ditentukan sehingga sdh dilaksanakan di bulan agustus	sebagian anggaran masuk dalam blokir dan kegiatan menunggu arahan dari Eselon 1	
				C Bimbingan Tekni/Sosialisasi Cara Penanganan Ikan Yang BaikBagi Awak Kapal	8,523,000	7,653,500			v			v					
				Pengumpulan dan Verifikasi		-	710	Laporan									
			Kesyahbandaran	A Pembinaan Nahkoda Dalam Pengisian Logbook	10,509,000	0			V						akan dilaksanakan TW4	belum bisa mensikronkan waktu nahkoda untuk bisa berkumpul saat sdh melakukan bongkar	
				Cadangan (2338.999.999)													
			Kesyahbandaran	HA Rapat Evaluasi dalam rangka implementasi EPIT dan PNBP Pasca Produksi	80,796,000	0										anggaran masuk dalam blokir	
			Kesyahbandaran	IA RAPAT EVALUASI PIPP DAN HARGA ACUAN IKAN	26,344,000	0										anggaran masuk dalam blokir	

SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	Unit PJ	KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD TW III 2025	Target Kegiatan	Satuan target Kegiatan	TARGET			REALISASI			TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
									Jul	Aug	Sep	Jul	Aug	Sep			
				Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar (2338.BGA.002)													
			dukman	J PENYIAPAN TENAGA PENDATAAN DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PNBP PASCA PRODUKSI	145,600,000	75,358,200			V	V	V	V	V	V			
	4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)		Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar (2338.BGA.002)			2	Lembaga									
			OP	A Pengelolaan dan Operasional Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) dan Inspeksi Pembongkaran Ikan di Pelabuhan Perikanan	7,400,000	0										anggaran kegiatan masuk dalam anggaran yang di blokir Tahap 2	
			OP	B PELAKSANAAN PELAYANAN SCPIB	24,720,000	0										anggaran kegiatan masuk dalam anggaran yang di blokir Tahap 2	
				Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan (2338.BGA.002.055)													
			Dukman	C OPERASIONAL PELABUHAN PERIKANAN	192,240,000	14,550,055										sebagian anggaran kegiatan masuk dalam anggaran yang di blokir dalam rangka tindak lanjut dari Inpres 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran	
			Dukman	J Peningkatan Kecakapan Komunikasi bagi Petugas PTSA dalam mendukung Penerapan Budaya Pelayanan Prima di PPS Cilacap	12,147,000	-			V	V	V				dilaksanakan di TW 4	belum disa dilaksanakan karena belum tahu bentuk kegiatan seperti apa dan siapa narasumbernya	
			Cikidang	K Pelaksanaan K5 di Pelabuhan Perikanan CIKIDANG	92,282,000	6,850,000			V		V					anggaran kegiatan masuk dalam anggaran yang di blokir Tahap 2	
				L Pelaksanaan Pengamanan Terpadu dalam rangka mendukung K5 di PP Cikidang	23,100,000	0										anggaran kegiatan masuk dalam anggaran yang di blokir Tahap 2	
			Dukman	P Pelaksanaan ISO 9001:2015 dan ISO14001:2015	77,647,000	0										anggaran kegiatan masuk dalam anggaran yang di blokir Tahap 3	
			Dukman	R Pelaksanaan Pengamanan Terpadu PNBP Pascaproduksi di PPS Cilacap	51,370,000	0										anggaran kegiatan masuk dalam anggaran yang di blokir dalam rangka tindak lanjut dari Inpres 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran	
			PU	BA Penguatan Sistem Pembongkaran Hasil Tangkapan sebagai bagian dari Peningkatan Pelayanan Usaha di PPS Cilacap	47,740,000	19,900,000			V	V	V		V	V			
				Cadangan (2338.999.999)													
			Dukman	BA Video Profil Pelabuhan (RO Cadangan)	118,100,000	0										anggaran kegiatan masuk dalam anggaran yang di blokir dalam rangka tindak lanjut dari Inpres 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran	

SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	Unit PJ	KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD TW III 2025	Target Kegiatan	Satuan target Kegiatan	TARGET			REALISASI			TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
									Jul	Aug	Sep	Jul	Aug	Sep			
			Dukman	IA Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka mendukung implementasi EPIT dan PNBP Pasca Produksi	231,838,000	159,978,000										sebagian anggaran kegiatan masuk dalam anggaran yang di blokir dalam rangka tindak lanjut dari Inpres 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran	
			Cikidang	S Peningkatan Kapasitas SDM PP Cikidang dalam rangka mendukung implementasi EPIT dan PNBP Pasca Produksi	16,375,000	4,026,000			v			v				sebagian anggaran kegiatan masuk dalam anggaran yang di blokir dalam rangka tindak lanjut dari Inpres 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran	
				Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar (2338.BGA.002.054)													
			PU	A Pelayanan Pengusahaan pelabuhan perikanan	29,612,000	8,529,233			V			V	V	V		sebagian anggaran kegiatan masuk dalam anggaran yang di blokir dalam rangka tindak lanjut dari Inpres 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran hanya tersedia anggaran perjalanan dan belum ada kegiatan yang membutuhkan	
				Pelaksanaan tata kelola dan			2	Lembaga									
			OP	A PEMBINAAN OPERATOR PIPP BAGI PP BINAAN	17,520,000	0										anggaran kegiatan masuk dalam anggaran yang di blokir dalam rangka tindak lanjut dari Inpres 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran	
			Dukman	B Video Profil Pelabuhan	62,921,000	0										anggaran kegiatan masuk dalam anggaran yang di blokir dalam rangka tindak lanjut dari Inpres 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran	
			Dukman	C Penyusunan Laporan Tahunan Operasional Pelabuhan Perikanan	800,000	0				v					akan di laksanakan Oktober	terkendala teknis pencetakan	
			Dukman	D Pameran/Promosi Pelabuhan Perikanan/Publikasi	44,132,000	0										anggaran kegiatan masuk dalam anggaran yang di blokir dalam rangka tindak lanjut dari Inpres 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran	
			OP	F DUKUNGAN PENGELOLAAN PUSAT INFORMASI PELABUHAN PERIKANAN	164,492,000	4,466,500			V			V					
				Operasional dan Pemeliharaan Kantor (2342.EBA.994.002)			1	Layanan									
			Dukman	A Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3,462,625,000	1,921,110,631			V	V	V	V	V	V			
				B Langganan Daya Dan Jasa	1,187,659,000	817,031,049			V	V	V	V	V	V			
			TKSP	C Pemeliharaan Kantor	1,402,462,000	424,368,176			V	V	V	V	V	V			
			Dukman	D Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	231,624,000	132,240,000			V	V	V	V	V	V			
	5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	Timja Kesyahbandaran	Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan (2338.BGA.002.052)			2	Lembaga									
			Kesyahbandaran	A Diseminasi Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan	21,272,000	7,200,000			V		V						

SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	Unit PJ	KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD TW III 2025	Target Kegiatan	Satuan target Kegiatan	TARGET			REALISASI			TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
									Jul	Aug	Sep	Jul	Aug	Sep			
				Pelaksanaan Tata kelola dan Operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan (2338.BGA.002.051)			2	Lembaga									
			Kesyahbandaran	A FGD Operasional Syahbandar di PPS Cilacap Mendukung Kebijakan Penangkapan	39,640,000	10,700,000				V		V					
				B FGD Monev Operasional Kesyahbandaran di wilayah Binaan	18,110,000	5,389,500			V		V	V			akan dilaksanakan TW4	ada kegiatan prioritas kampung nelayan merah putih sehingga anggaran diseptember akan dilakukan untuk kegiatan tersebut	
				E Penanganan kebakaran, keselamatan dan keamanan kapal di Pelabuhan Perikanan Bagi Tim Internal dan Stakeholder	34,602,000	0			V						akan direvisi menjadi kegiatan pelatihan	belum bisa dilaksanakan karena stok APAR masih penuh	
				I Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Di Atas Kapal	1,896,000	900,000											
			Cikidang	G Tata Kelola dan Operasional Kesyahbandaran PP CIKIDANG Guna Mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasca Produksi	33,374,000	1,500,000											
				H Operasional Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sesuai SK.Dirjen di PP CIKIDANG Guna Mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasca Produksi	18,340,000	3,500,000			V		V	V				sebagian anggaran kegiatan masuk dalam anggaran yang di blokir dalam rangka tindak lanjut dari Inpres 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran	
				Cadangan (2338.999.999)													
			Kesyahbandaran	DA Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kesyahbandaran di Wilayah Binaan	25,570,000	1,500,000			V		V		V				
Pengembangan dan peningkatan fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	Timja TKSP	Pelaksanaan pengembangan Pelabuhan Perikanan Terluar dan/atau berwawasan lingkungan (2338.RBQ.004.052)			1	Rekomendasi kebijakan									
			TKSP	A Civil Works (Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi/Sipil)	96,014,158,000	0											
				B Project Implementing Unit di PPS Cilacap (Kesekretariatan Pelaksanaan Proyek di PIU)	20,884,495,000	0										anggaran kegiatan masuk dalam anggaran yang di blokir dalam rangka tindak lanjut dari Inpres 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran	
				C Project Implementing di PPS Cilacap	250,347,000	86,999,408			V	V	V	V	V	V			
				Rekomendasi kebijakan/perencanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang disusun (2338.ABR.001.051)													

SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	Unit PJ	KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD TW III 2025	Target Kegiatan	Satuan target Kegiatan	TARGET			REALISASI			TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
									Jul	Aug	Sep	Jul	Aug	Sep			
			TKSP	A Rekomendasi kebijakan/perencanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang disusun	50,000,000	0			V		V				menunggu hasil output dari TAO	kegiatan blm bs dilaksanakan mengingat kegiatan ini merupakan TL dari hasil TAO	
	7	Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	Timja TKSP	Cadangan (2338.999.999)			1	Unit									
			TKSP	TA Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pelabuhan dan Bandar Usaha Sehat (PBUS)	4,000,000	0			V		V				kegiatan dilaksanakan di november	menunggu SK tim, karena menunggu penugasan personil dari instansi mitra dimana instansi mitra terkendala efisiensi anggaran krn kegiatan di instansi mitra sebagai dukungan output kegiatan ini	
				Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan (2338.BGA.002.055)													
			Dukman	A Gerakan Bersih Pantai	29,576,000	0											
			TKSP	F Pelaksanan Tata Kelola Lingkungan di Pelabuhan Perikanan	36,225,000	5,250,000			V	V		V			melakukan koordinasi lebih lanjut kepada laboratorium mitra, agar kegiatan bs di SPJ kan	terkendala pertanggung jawaban keuangan, karena laboratorium mitra belum memiliki NPWP	menggunakan jasa ekspedisi agar sampel air bisa dikirim ke alamat pengujian
Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan (Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	Dukman	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP (2342.EBA.960.053)			1	Layanan									
			Dukman	A Forum Konsultasi Publik dan KPI	19,000,000	5,524,000						v					
				Pelaksanaan tata kelola dan operasional pengusahaan di pelabuhan perikanan (2338.BGA.002.054)													
			Cikidang	K Forum Konsultasi Publik dan KPI di Cikidang	27,200,000	2,655,000				v	v					sebagian anggaran kegiatan masuk dalam anggaran yang di blokir dalam rangka tindak lanjut	
	11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	Dukman	Evaluasi dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Lingkup DJPT (2342.EBD.955.053)		-	1	Layanan									
			Dukman	A Evaluasi dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit	16,980,000	0											
				Pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (2342.EBD.955.054)													
				A Laporan Keuangan dan BMN	28,280,000	2,544,000			V							belum ada kegiatan yang memerlukan perjalanan, karena sisa anggaran adalah anggaran perjalanan	
	12	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)		Pemantauan dan evaluasi			1	Layanan									
			OP	A Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	16,000,000	840,000					V					anggaran kegiatan masuk dalam anggaran yang di blokir dalam rangka tindak lanjut dari Inpres 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran	
				Gaji dan Tunjangan			1	Layanan									
			Dukman	A Pembayaran gaji dan tunjangan	7,424,933,000	6,370,601,942			V	V	V	V	V	V			
				B PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PPPK	2,334,961,000	1,927,730,516			V	V	V	V	V	V			

SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	Unit PJ	KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD TW III 2025	Target Kegiatan	Satuan target Kegiatan	TARGET			REALISASI			TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
									Jul	Aug	Sep	Jul	Aug	Sep			
	13	IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (indeks)	Dukman	Pengembangan, pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional (2342.EBC.954.053)			1	Layanan									
			Dukman	A Dukungan Pengembangan, pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional	30,000,000	0				V	V					belum ada pengumuman oleh instansi pembina jabatan fungsional	
	14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang di umumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap		Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (2342.CAN.955.051)		-											
			Dukman	A Pengadaan peralatan pengolah data dan komunikasi	394,000,000	0										anggaran kegiatan masuk dalam anggaran yang di blokir dalam rangka tindak lanjut dari Inpres 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran	
				Pengadaan sarana perkantoran (2342.EBB.951.051)													
			dukman	A Pengadaan sarana penunjang perkantoran	30,000,000	0										anggaran kegiatan masuk dalam anggaran yang di blokir dalam rangka tindak lanjut dari Inpres 1	
				Pengadaan dan Rehabilitasi prasarana perkantoran (2342.EBB.971.051)													
				A Pengadaan Prasarana Perkantoran	100,000,000	0										anggaran kegiatan masuk dalam anggaran yang di blokir dalam rangka tindak lanjut dari Inpres 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran	
	15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)		Pelaksanaan tata kelola dan operasional pengusahaan di pelabuhan perikanan (2338.BGA.002.054)	-	-											
			Cikidang	J Koordinasi Instansi Pusat dan Daerah Dalam Rangka Proses Sertifikasi Tanah di Cikidang	43,520,000	4,339,000			v	v	v	v	v				
				Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan (2338.BGA.002.055)													
			PU	N Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 terkait Pengelolaan Barang Milik Negara	41,952,000	0			V						akan dilaksanakan di september	akan dikomunikasikan dg KPKNL dulu dan jika tdk memungkinkan akan di mundurkan pelaksanaannya	
	16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	Dukman	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran (2342.EBD.953.052)			1	Layanan									
				A Laporan Program dan Kegiatan	40,000,000	1,720,000			V	V						belum ada kegiatan yang membutuhkan perjalanan, karena sisa anggaran blokir adalah anggaran perjalanan	

SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	Unit PJ	KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD TW III 2025	Target Kegiatan	Satuan target Kegiatan	TARGET Jul	TARGET Aug	TARGET Sep	REALISASI Jul	REALISASI Aug	REALISASI Sep	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
				Perencanaan dan Penyelenggaraan Sistem Akutansi Instansi serta Sosialisasi ketentuan Pengelolaan Keuangan Lingkup			1	Layanan									
				A Sosialisasi Ketentuan dan Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan dan BMN	45,080,000	2,166,000			V							sebagian anggaran kegiatan masuk dalam anggaran yang di blokir dalam rangka tindak lanjut dari Inpres 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran	
	17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (nilai)	Dukman	Penyusunan dokumen perencaanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap (2342.EBD.952.052)	-	-	1	Layanan									
				A Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	74,000,000	0			V					V			
	18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	Kesyahbandaran	Cadangan (2338.999.999)		-											
				HA Koordinasi lintas sektor monitoring dan evaluasi pelayanan terpadu satu atap	11,337,000	0											

136,049,385,000
-

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Cilacap

Imas Masriah

MATRIKS CAPAIAN TARGET IKU PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
TRIWULAN III TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025 (PENYESUAIAN APRIL)				REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP		REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP		REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP	
				TW I	TW II	TW III	2025	TW I	TARGET TW I	TARGET 2025	TW II	TARGET TW II	TARGET 2025	TW III	TARGET TW III	TARGET 2025
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	843.39	1,686.78	2,530.18	3,373.57	1,334.95	158.28%	39.57%	2,766.04	163.98%	81.99%	3,996.61	157.96%	118.47%
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	5,000	11,000	20,000	27,000	5,242.35	104.85%	19.42%	11,926.84	108.43%	44.17%	26,063.95	130.32%	96.53%
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang berdaya saing	3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap				100									
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	84	84	84	84	89.08	106.05%	106.05%	91.75	109.23%	109.23%	96.5	114.88%	114.88%
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap				85									
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap				33									
		7	Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	30.1	30.1	30.1	30.1	90.99	302.29%	302.29%	96.24	319.73%	319.73%	94.66	314.49%	314.49%
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan	660	670	680	700	1184	179.39%	169.14%	1259	187.91%	179.86%	1,283	188.68%	183.29%
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan		0.26		0.26				0.36	138.46%	138.46%			
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK)				75.5									
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	85	85	85	85	100	117.65%	117.65%	100	117.65%	117.65%	100	117.65%	117.65%
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap				88									
		13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap		82		87				83.42	101.73%	95.89%			
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	76	76	76	76	100	131.58%	131.58%	100	131.58%	131.58%	100	131.58%	131.58%
		15	Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap				81									
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap		85		92				91.11	107.19%	99.03%			
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap				71.5									
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap	88.5	88.5	88.5	88.5	94.15	106.38%	106.38%	92.35	104.35%	104.35%	92.91	104.98%	104.98%

KERTAS KERJA VERIFIKASI

Unit Kerja : PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
Bulan : September - 2025
NKO Awal : 118.23
NKO Verifikasi : 118.23

No	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Polaritas	Target 2025	Target September	Capaian September	Capaian Data Dukung	Status Verifikasi	Catatan Verifikasi
1	IKSK.01.01	Penerimaan PNBP Non SDA di PelabuhanPerikanan Samudera Cilacap Data Dukung1	Juta	Maximize	3.373,57	2.530,18	3.996,61	3.996,61	Valid	Sesuai Nodin Katimja TKPU Nomor 763/PPSC/TU.140/X/2025 tanggal 3 Oktober 2025 perihal Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan III Tahun 2025
2	IKSK.02.02	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Data Dukung1	Ton	Maximize	27.000,00	20.000,00	26.063,95	26.063,95	Valid	Sesuai Nodin Katimja OP Nomor 785/PPSC/TU.140/X/2025 tanggal 7 Oktober 2025 perihal Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan III Tahun 2025
3	IKSK.03.03	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Persen	Maximize	100,00	0,00		0,00	Valid	Indikator Kinerja dihitung Tahunan
4	IKSK.03.04	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Data Dukung1	Nilai	Maximize	84,00	84,00	96,50	96,50	Valid	Sesuai Nodin Katimja OP Nomor 785/PPSC/TU.140/X/2025 tanggal 7 Oktober 2025 perihal Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan III Tahun 2025
5	IKSK.03.05	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Persen	Maximize	85,00	0,00		0,00	Valid	Indikator Kinerja dihitung Tahunan
6	IKSK.03.06	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Persen	Maximize	33,00	0,00		0,00	Valid	Indikator Kinerja dihitung Tahunan
7	IKSK.03.07	Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Data Dukung1	Nilai	Maximize	30,10	30,10	94,66	94,66	Valid	Sesuai dengan surat Direktur Kepelabuhanan Perikanan Nomor B.3258/DJPT.4/PI.310/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025 perihal Capaian dan Hasil Evaluasi Implementasi SELARASKAN Triwulan II TA. 2025 di Pelabuhan Perikanan UPT Pusat
8	IKSK.04.08	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan Data Dukung1	Kapal	Maximize	700,00	680,00	1.283,00	1.283,00	Valid	Sesuai Nodin Katimja Kesyahbandaran Nomor 762/PPSC/TU.140/X/2025 tanggal 2 Oktober 2025 perihal Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama lingkup Tim Kerja Kesyahbandaran Triwulan III Tahun 2025
9	IKSK.04.09	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan	Nilai	Maximize	0,26	0,00		0,00	Valid	Indikator Kinerja dihitung Semesteran
10	IKSK.05.10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Nilai	Maximize	75,50	0,00		0,00	Valid	Indikator Kinerja dihitung Tahunan
11	IKSK.05.11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Data Dukung1	Persen	Maximize	85,00	85,00	100,00	100,00	Valid	Sesuai lembar kerja persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal pada PPS Cilacap
12	IKSK.05.12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Nilai	Maximize	88,00	0,00		0,00	Valid	Indikator Kinerja dihitung Tahunan
13	IKSK.05.13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Indeks	Maximize	87,00	0,00		0,00	Valid	Indikator Kinerja dihitung Semesteran

No	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Polaritas	Target 2025	Target September	Capaian September	Capaian Data Dukung	Status Verifikasi	Catatan Verifikasi
14	IKSK.05.14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Data Dukung1	Persen	Maximize	76,00	76,00	100,00	100,00	Valid	Sesuai dengan Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Nomor 381/SJ.7/PL.410/X/2025 tanggal 8 Oktober 2025 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 3 Tahun Anggaran 2025
15	IKSK.05.15	Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Persen	Maximize	81,00	0,00		0,00	Valid	Indikator Kinerja dihitung Tahunan
16	IKSK.05.16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Nilai	Maximize	92,00	0,00		0,00	Valid	Indikator Kinerja dihitung Semesteran
17	IKSK.05.17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Nilai	Maximize	71,50	0,00		0,00	Valid	Indikator Kinerja dihitung Tahunan
18	IKSK.05.18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap Data Dukung1	Nilai	Maximize	88,50	88,50	92,91	92,91	Valid	Sesuai Nota Dinas Sesditjen Perikanan Tangkap Nomor 2576/DJPT.1/OT.710/X/2025 tanggal 9 Oktober 2025 perihal Penyampaian Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Periode Triwulan III tahun 2025
Kesimpulan										

Perwakilan Unit Kerja	Nama	Email	
	Lidya Desmaniar	lydiadesmaniarirwan@gmail.com	Setuju
Tim Verifikasi	**Nama**	**Email**	
	Aldino Rahadiyan Wicaksono	aldino.wicaksono@kkp.go.id	

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

NOTA DINAS
NOMOR : 763/PPSC/TU.140/X/2025

Yth. : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Dari : Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan III Tahun 2025
Tanggal : 3 Oktober 2025

Sehubungan dengan Pelaksanaan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2025, terlampir kami laporkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melekat pada Tim Kerja Pelayanan Usaha dengan periode pengukuran triwulanan sebagai berikut :

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Rp.Juta)
   - Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Non SDA di PPS Cilacap adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan dengan target dan capaian Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut :

IKU	TARGET TW III (Rp. Juta)	REALISASI TW III (Rp. Juta)	CAPAIAN (%)
Nilai PNBP Non SDA di PPS Cilacap (Rp. Juta)	2.530,17	3.996,61	157,96

Penerimaan PNBP PPS Cilacap terbesar masih berasal dari penerimaan tambat sebesar Rp. 2.557.523.924,- dan penerimaan terbesar kedua berasal dari Penerimaan Penggunaan Tanah dan/ atau Bangunan yaitu sebesar Rp. 475.534.626,-.

- Perbandingan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKU	REALISASI TW III Tahun 2024 (Rp. Juta)	REALISASI TW III Tahun 2025 (Rp. Juta)	NAIK/TURUN (%)
Nilai PNBP Non SDA di PPS Cilacap (Rp. Juta)	4.975,23	3.996,61	(19,67)

Apabila dibandingkan dengan penerimaan PNBP Triwulan III Tahun 2024, penerimaan PNBP di Triwulan III Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 19,67 %. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai PNBP dari sektor pelayanan tambat labuh, pelayanan penggunaan tanah dan/atau bangunan, pelayanan cold storage, penggunaan alat transportasi, dan pelayanan jasa dock.

Penerimaan pelayanan tambat labuh menurun dikarenakan pada Triwulan ini kondisi kolam pelabuhan yang semakin dangkal sehingga ada sebagain kapal melakukan olah gerak ke lokasi lain dengan draft yang memadai untuk operasional kapal perikanan di atas 60 GT.

Penerimaan pelayanan penggunaan tanah dan/atau bangunan, layanan cold storage serta dock mengalami penurunan dikarenakan adanya perubahan mekanisme pembayaran atas penggunaan tanah dan/atau bangunan yang semula dibayar tiap tahun menjadi pembayaran sekaligus sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian, serta adanya perubahan mekanisme untuk pemanfaatan BMN yang semula melalui mekanisme penggunaan berubah ke mekanisme pemanfaatan /sewa.

2. Terkait dengan capaian IKU di atas, terlampir kami sampaikan data dukungnya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih dan mohon arahan lebih lanjut

Ditandatangani Secara Elektronik

Daniel Wahyu Setyawan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PENERIMAAN PNBP NON SDA S.D. SEPTEMBER 2025

Akun	Uraian	S.d. bulan Agustus 2025	September 2025	Jml Kumulatif
425151	**Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi**	**442.207.483**	**74.886.125**	**517.093.608**
	Penggunaan tanah dalam rangka tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan sesuai klaster	283.110.825	40.695.001	323.805.826
	Pemeliharaan Prasarana	70.096.513	10.173.749	80.270.262
	Bangunan	50.595.663	20.862.875	71.458.538
	Pelayanan Penggunaan Tanah untuk Penumpukan Barang	0		0
	Pelayanan Penggunaan Tanah untuk Penjemuran jaring / ikan	0		0
	Pelayanan Jasa Cold Room dan Freezer	24.714.982		24.714.982
	Pelayanan Jasa Penggunaan Transportasi	11.600.000	2.400.000	14.000.000
	Pelayanan Jasa Peralatan dan Gerobak Dorong	2.089.500	754.500	2.844.000
425621	**Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan**	**3.076.594.106**	**279.722.053**	**3.356.316.159**
	Pelayanan Jasa Tambat dan Labuh	2.367.933.504	189.590.420	2.557.523.924
	Pelayanan Jasa Pas Masuk Harian	192.419.000	23.721.000	216.140.000
	Pelayanan Jasa Pas Langganan	113.880.000	14.235.000	128.115.000
	Pelayanan Jasa Kebersihan Kawasan	57.405.684	19.340.381	76.746.065
	Pelayanan Jasa Kebersihan Kolam	165.943.400	14.506.350	180.449.750
	Pelayanan Jasa Air	3.572.950	528.160	4.101.110
	Pelayanan Jasa Dock	46.160.000	2.280.000	48.440.000
	Pelayanan Jasa Listrik	129.279.568	15.520.742	144.800.310
	JUMLAH PNBP FUNGSIONAL	**3.518.801.589**	**354.608.178**	**3.873.409.767**
425151	**Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan**	**37.462.110**	**85.745.824**	**123.207.934**
	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	37.462.110	85.745.824	123.207.934
	JUMLAH PNBP	**3.556.263.699**	**440.354.002**	**3.996.617.701**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERBANDINGAN PENERIMAAN PNBP NON SDA
TRIWULAN III TAHUN 205 DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2024

Akun	Uraian	Triwulan III Tahun 2024	Triwulan III Tahun 2025	Kenaikan / Penurunan
425151	**Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi**	**1.400.402.859**	**517.093.608**	**(883.309.251)**
	Penggunaan tanah dalam rangka tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan sesuai klaster	780.539.300	323.805.826	(456.733.474)
	Pemeliharaan Prasarana	198.414.825	80.270.262	(118.144.563)
	Bangunan	200.554.500	71.458.538	(129.095.962)
	Pelayanan Penggunaan Tanah untuk Penumpukan Barang	82.610.000	0	(82.610.000)
	Pelayanan Penggunaan Tanah untuk Penjemuran jaring / ikan	0	0	0
	Pelayanan Jasa Cold Room dan Freezer	96.454.234	24.714.982	(71.739.252)
	Pelayanan Jasa Penggunaan Transportasi	37.250.000	14.000.000	(23.250.000)
	Pelayanan Jasa Peralatan dan Gerobak Dorong	3.880.000	2.844.000	(1.036.000)
	Ruang Pertemuan	700.000		(700.000)
425621	**Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan**	**3.574.829.572**	**3.356.316.159**	**(218.513.413)**
	Pelayanan Jasa Tambat dan Labuh	2.706.357.949	2.557.523.924	(148.834.025)
	Pelayanan Jasa Pas Masuk Harian	213.614.000	216.140.000	2.526.000
	Pelayanan Jasa Pas Langganan	120.765.000	128.115.000	7.350.000
	Pelayanan Jasa Kebersihan Kawasan	121.415.136	76.746.065	(44.669.071)
	Pelayanan Jasa Kebersihan Kolam	196.917.300	180.449.750	(16.467.550)
	Pelayanan Jasa Air	2.463.480	4.101.110	1.637.630
	Pelayanan Jasa Dock	53.240.000	48.440.000	(4.800.000)
	Pelayanan Jasa Listrik	160.056.707	144.800.310	(15.256.397)
425151	**Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan**		**123.207.934**	**123.207.934**
	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan		123.207.934	123.207.934
	JUMLAH PNBP	**4.975.232.431**	**3.996.617.701**	(978.614.730)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

NOTA DINAS
NOMOR 785/PPSC/TU.140/X/2025

Yth. : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Dari : Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan III Tahun 2025
Tanggal : 7 Oktober 2025

Sehubungan dengan Pelaksanaan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2025, terlampir kami laporkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan di Tim Kerja Operasional Pelabuhan dengan periode pengukuran triwulanan sebagai berikut:

1. Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap (Ton)
   - Indikator ini merupakan jumlah produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) dalam bentuk basah yang tercatat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (ton)	20.000	26.063,95	130,32

Volume produksi pada Triwulan III Tahun 2025 didominasi oleh jenis ikan seperti Cumi Karet, Tuna Mata Besar, Madidihang, Cakalang, dan Layur. Meski capaian kumulatif mencapai 130,32 %, terjadi peningkatan produksi pada Triwulan III dibandingkan dengan triwulan II karena terjadinya musim penangkapan, peningkatan jumlah usaha penangkapan dan jumlah hasil tangkapan yang didaratkan.

   - Perbandingan dengan capaian pada Triwulan III Tahun 2024:

IKU	REALISASI TW III 2024	REALISASI TW III 2025	NAIK/ TURUN (%)
Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (ton)	29.892,15	26.063,95	(12,81)

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, Volume produksi yang didaratkan mengelami penurunan yang cukup signifikan sebesar 12,81 %. karena terjadinya adanya penundaan kapal yang melakukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

keberangkatan kapal setelah perayaan Idul Fitri, Tahun Baru Imlek dan Sedekah Laut serta adanya cuaca yang buruk yang menyebabkan produksi setiap kapal mengalami penurunan jika dibandingkan pada periode sebelumnya.

2. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)
   - Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja operasional pelabuhan berdasarkan kriteria teknis dan operasional sesuai dengan Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap No. 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan. Penilaian meliputi aspek administrasi dan sistem informasi, fasilitas pelabuhan, pelayanan umum, serta investasi dan industri.

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	84	96,50	114,88

Capaian kinerja operasional pelabuhan pada Triwulan III tahun 2025 mencapai nilai 96,50, yang termasuk dalam kategori *sangat baik*. Nilai tersebut merupakan hasil dari Evaluasi Kinerja (EVKIN) yang mencakup 27 komponen penilaian. Capaian ini didorong oleh meningkatnya frekuensi kunjungan kapal, volume produksi, pelayanan tambat-labuh, frekuensi pengiriman data (PIPP), dan distribusi BBM.

   - Perbandingan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024

NO	IKU	REALISASI TW III 2024	REALISASI TW III 2025	NAIK/ TURUN (%)
1	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	93,67	96,50	3, 02

Jika dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2024, terjadi peningkatan sebesar 3,02 %. Kenaikan ini merupakan hasil dari upaya peningkatan pelayanan dan operasional pelabuhan secara berkelanjutan.

Terkait dengan capain IKU di atas, terlampir kami sampaikan data dukung kedua IKU tersebut untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.

Ditandatangani Secara Elektronik

Yatim Kurniadi

Tembusan:
Kepala Subbagian Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran
Nomor : 785/PPSC/TU.140/X/2025
Tanggal : 7 Oktober 2025

DATA DUKUNG IKU 4
TINGKAT OPERASIONAL PELABUHAN PERIKANAN (EVKIN SAMUDERA CILACAP (PERSEN) EVKIN) TRIWULAN III (JULI sd SEPTEMBER) TAHUN 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap antara pihak pertama, kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan pihak kedua,Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tanggal 24 Januari tahun 2025, sesuai dengan permen KP No.68/PERMEN-KP/2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan hal tersebut maka untuk Tim Kerja Operasional Pelabuhan akan menyampaikan :

a. Sasaran Program : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang berdaya saing dan berkelanjutan ;
b. IKU 4 : Tingkat Oprasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen);
c. Deskripsi : Tingkat capaian Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap ;
d. Formula perhitungan : Prosentase rata rata capaian Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap melalui Aplikasi Evaluasi Kinerja (EVKIN) ;
e. Data Dukung berupa : Laporan Evkin .

2. Lokasi

Lokasi monitoring dan evaluasi terkait tingkat kinerja pelabuhan adalah Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

B. METODE KERJA DAN ALAT YANG DIGUNAKAN

1. Metode Kerja

Melakukan entri data kedalam Aplikasi PIPP.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peralatan

Jumlah SDM yang ada dalam kegiatan Tingkat Operasional Pelabuhan (EVKIN) terdiri dari 12 orang yaitu penginputan PIPP untuk kapal < 5 GT dan penginputan dalam aplikasi PIPP untuk kapal > 5 GT. Alat bantu untuk pendataan di lapangan adalah form SL 3.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Hasil Kegiatan

Hasil Kegiatan Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen) pada triwulan III (Juli s.d September 2025).

No	Bulan	Nilai EVKIN (%)	Keterangan
1.	Juli	95,50	Sangat Baik
2.	Agustus	97,00	Sangat Baik
3.	September	97,00	Sangat Baik
	Jumlah rata-rata Tri Wulan III	**96,50**	**Sangat Baik**

Demikian laporan data dukung IKU 4, Capaian Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap untuk Tri Wulan III (Juli s.d September 2025) adalah sebesar **96,50 % (Kategori : Sangat Baik).**

An. Kepala Pelabuhan
Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan

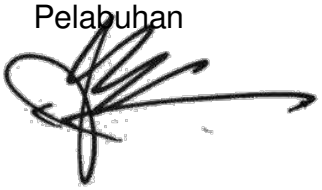

Yatim Kurniadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Evaluasi Kinerja (Evkin)

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Bulan : Juli 2025

No.	Kriteria	Satuan	July			
			95.5 = SANGAT BAIK			
			Realisasi	Nilai	Ket.	
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	30	5	Lebih dari 20 kali	
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2	---	
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2	---	
4	SHTI	Ya/Tidak	Ya	2	---	
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	124,39	4	Antara 75 - 100%	
6	Pendapatan Pelabuhan	%	157,99	4	Diatas 90% dari target	
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4	---	
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	13.767,00	4	Diatas 6000 GT	
9	Panjang Dermaga	m	1.726,00	4	Diatas 300m	
10	Kedalaman Kolam	cm	300	4	Diatas 3 m	
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2	---	
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2	---	
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	30,7	4	Diatas 20 ha	
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	347	5	Lebih dari 60 GT	
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	89,98	5	Lebih dari 50 ton	
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	1.371,00	5	Lebih dari 14 unit	
17	STBLKK	%	20,86	1,25	Kapal yang masuk kurang dari 50%	
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	4	4	Diatas 3 kali	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	5	4	Diatas 4 kali	
20	Pelaksanaan K5	Hasil	Baik	4	---	
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	100	4	Sesuai kebutuhan (100%)	
22	Penyaluran Es (kapal)	%	100	4	Sesuai kebutuhan (100%)	
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	100	5	Sesuai kebutuhan (100%)	
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit	81	4	Diatas 30 unit	
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	91,97	3	Sangat Optimal (80 - 100%)	
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	2.271,05	2,25	Antara 2000 - 3000 orang	
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	3 (152)	2	---	
Jumlah				95.5		
Kesimpulan dan Rekomendasi				SANGAT BAIK		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Evaluasi Kinerja (Evkin)

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Bulan : Agustus 2025

No.	Kriteria	Satuan	Agustus		
			97 = SANGAT BAIK		
			Realisasi	Nilai	Ket.
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	29	5	Lebih dari 20 kali
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2	---
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2	---
4	SHTI	Ya/Tidak	Ya	2	---
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	123,98	4	Antara 75 - 100%
6	Pendapatan Pelabuhan	%	126,51	4	Diatas 90% dari target
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4	---
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	17.218,00	4	Diatas 6000 GT
9	Panjang Dermaga	m	1.726,00	4	Diatas 300m
10	Kedalaman Kolam	cm	300	4	Diatas 3 m
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2	---
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2	---
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	30,7	4	Diatas 20 ha
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	923	5	Lebih dari 60 GT
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	135,24	5	Lebih dari 50 ton
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	1.457,00	5	Lebih dari 14 unit
17	STBLKK	%	87,4	3,75	Kapal yang masuk antara 75 - 99%
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	4	4	Diatas 3 kali
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	3	3	Antara 3 - 4 kali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

20	Pelaksanaan K5	Hasil	Baik	4	---
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	100	4	Sesuai kebutuhan (100%)
22	Penyaluran Es (kapal)	%	100	4	Sesuai kebutuhan (100%)
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	100	5	Sesuai kebutuhan (100%)
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit	80	4	Diatas 30 unit
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	91,97	3	Sangat Optimal (80 - 100%)
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	2.284,25	2,25	Antara 2000 - 3000 orang
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	3 (151)	2	---
Jumlah				97	
Kesimpulan dan Rekomendasi				SANGAT BAIK	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Evaluasi Kinerja (Evkin)

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Bulan : September 2025

No.	Kriteria	Satuan	September		
			97 = SANGAT BAIK		
			Realisasi	Nilai	Ket.
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	30	5	Lebih dari 20 kali
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2	---
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2	---
4	SHTI	Ya/Tidak	Ya	2	---
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	132,8	4	Antara 75 - 100%
6	Pendapatan Pelabuhan	%	156,63	4	Diatas 90% dari target
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4	---
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	14.379,00	4	Diatas 6000 GT
9	Panjang Dermaga	m	1.726,00	4	Diatas 300m
10	Kedalaman Kolam	cm	300	4	Diatas 3 m
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2	---
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2	---
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	30,7	4	Diatas 20 ha
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	627	5	Lebih dari 60 GT
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	132,06	5	Lebih dari 50 ton
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	1.242,00	5	Lebih dari 14 unit
17	STBLKK	%	109,03	5	Kapal yang masuk 100%
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	4	4	Diatas 3 kali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	4	3	Antara 3 - 4 kali
20	Pelaksanaan K5	Hasil	Baik	4	---
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	100	4	Sesuai kebutuhan (100%)
22	Penyaluran Es (kapal)	%	100	4	Sesuai kebutuhan (100%)
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	86,98	3,75	Antara 75 - 99% dari kebutuhan
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit	81	4	Diatas 30 unit
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	91,97	3	Sangat Optimal (80 - 100%)
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	2.297,80	2,25	Antara 2000 - 3000 orang
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	2 (151)	2	---
Jumlah				**97**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DATA DUKUNG IKU 2
VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
TRIWULAN III
(BULAN JANUARI S.D SEPTEMBER)
TAHUN 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2025

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap antara pihak pertama, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan Pihak kedua, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tanggal 24 Januari 2025, sesuai dengan permen KP No.68/PERMEN-KP/2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan hal tersebut maka untuk Tim Kerja Operasional Pelabuhan akan menyampaikan :

a. Sasaran Program : Produksi Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
b. IKU 2 : Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton);
c. Deskripsi : Merupakan indikator volume produksi perikanan tangkap yang berasal dari laut dan produksi perikanan tangkap yang berasal dari perairan pedalaman yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
d. Formula perhitungan : Penjumlahan volume produksi perikanan di laut dan di perairan pedalaman yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
e. Data Dukung berupa : Rekapitulasi data jumlah produksi di PPS Cilacap.
f. Produksi Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap terdiri dari ikan yang didaratkan dari kapal-kapal yang bongkar di PPS Cilacap maupun ikan yang berasal dari luar Cilacap yang diangkut ke PPS Cilacap dengan angkutan darat untuk dipasarkan ke konsumen di Cilacap.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Lokasi

Lokasi pendataan terkait data produksi adalah Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

B. METODE KERJA DAN ALAT YANG DIGUNAKAN

1. Metode Kerja

Pelaksanaan kegiatan pengambilan data produksi di lakukan dengan metode Sampling dan Sensus.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peralatan

Jumlah SDM yang ada dalam kegiatan pendataan produksi perikanan tangkap di PPS Cilacap sebanyak 11 orang, untuk pendataan kapal > 5 GT sebanyak 10 orang dan untuk pendataan kapal < 5 GT sebanyak 1 orang. Dalam Kegiatan pendataan produksi, form yang digunakan sebagai alat bantu untuk pendataan di lapangan adalah form SL3;

3. HASIL KEGIATAN

Hasil Kegiatan Pendataan ini dilakukan proses pengolahan data, kemudian dituangkan dalam laporan harian, berupa laporan produksi harian, yang akan dibuat sebagai dasar laporan mingguan dan bulanan, dapat kita lihat data volume produksi sampai dengan triwulan III, Sampai dengan bulan September 2025 dan Jenis ikan yang didaratkan di Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap :

No	Bulan	Volume (Ton)	Nilai (Rp)
1	Januari	1.306,27	28.994.199.000
2	Februari	935,71	24.094.214.000
3	Maret	3.000,37	79.282.409.000
4	April	1.193,95	33.914.437.000
5	Mei	2.442,46	69.522.135.000
6	Juni	3.734,99	107.922.424.640
7	Juli	3.588,23	95.081.888.100
8	Agustus	5.483,71	158.838.272.000
9	September	4.378,19	125.868.993.000
10	Oktober		
11	November		
12	Desember		
	Jumlah	**26.063.947**	**723.519.971.740**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perbandingan Volume dan Nilai Produksi hasil tangkapan ikan yang didaratkan antara tahun 2025 dengan 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah. Dari tabel dapat dilihat bahwa untuk volume produksi pada tahun 2025 mengalami penurunan meskipun jumlah kapal yang mendaratkan mengalami peningkatan. Namun untuk nilai produksi pada peroide Triwulan III tahun 2025 mengalami peningkatan/kenaikan yang cukup signifikan dari nilai produksi pada Triwulan III tahun 2024. Hal tersebut disebabkan penundaan kapal yang melakukan keberangkatan kapal setelah perayaan Idhul Fitri, Tahun Baru Imlek dan Sedekah Laut serta adanya cuaca yang buruk yang menyebabkan harga ikan lebih tinggi jika dibandingkan dengan volume dan nilai produksi pada tahun sebelumnya.

BULAN	VOLUME(Kg)		NILAI PRODUKSI (Rp)	
	2024	2025	2024	2025
JANUARI	3.172.338	1.306.271	52.855.122.000	28.994.199.000
FEBRUARI	2.098.375	935.705	37.456.810.000	24.094.214.000
MARET	1.998.137	3.000.368	36.469.275.000	79.282.409.000
APRIL	2.173.253	1.193.954	37.442.789.000	33.914.437.000
MEI	2.396.563	2.442.462	43.106.840.000	69.522.135.000
JUNI	6.209.098	3.734.995	108.083.211.000	107.922.424.640
JULI	3.195.304	3.588.293	61.659.394.000	95.081.888.100
AGUSTUS	4.495.091	5.483.711	91.366.307.000	158.838.272.000
SEPTEMBER	4.153.987	4.378.188	82.905.810.000	125.868.993.000
JUMLAH	**29.892.146**	**26.063.947**	**551.345.558.000**	**723.518.971.740**

4. **Jenis Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap antara lain adalah :**

Tuna Mata Besar, Madidihang, Cakalang, Lemadang, Layur, Albakora, Ikan Pedang (meka), Ikan Setan (Gindara), Setuhuk hitam, Setuhuk Loreng, Nyunglas, Hiu Lalaek (Cucut Selendang), Hiu Lanjam (Cucut lanjaman), Hiu Tikus (Cucut pahitan), Cumi Karet, Layang Benggol, Manyung, Tongkol Pisang Cerutu (Lisong), Hiu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Anjing (Cucut Cakilan), Hiu Monyet (Cucut Tikusan), Ikan Layaran, Sunglir, dan lain-lain.

Demikian laporan data produksi dan nilai produksi yang dapat kami laporkan dan sebagai bahan kepentingan lebih lanjut.

An. Kepala Pelabuhan
Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan

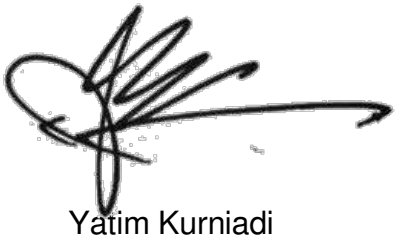

Yatim Kurniadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	PELABUHAN PERIKANAN	TAHUN		
		2024	2025	
		VOLUME (Kg)	VOLUME (Kg)	TON
4	**PPS CILACAP**	**29.892.146**	**26,063.947**	**26.063,95**
JANUARI		3.172.338	1.306.271	
FEBRUARI		2.098.375	935.705	
MARET		1.998.137	3.000.368	
APRIL		2.173.253	1.193.954	
MEI		2.396.563	2.442.462	
JUNI		6.209.098	3.048.076	
JULI		3.195.304	3.588.293	
AGUSTUS		4.495.091	5.483.711	
SEPTEMBER		4.153.987	4.378.188	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	PELABUHAN PERIKANAN	TAHUN		Milyar
		2024	2025	
		NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	
4	**PPS CILACAP**	**551.345.558.000**	**723.518.971.740**	**723,52**
JANUARI		52.855.122.000	28.994.199.000	
FEBRUARI		37.456.810.000	24.094.214.000	
MARET		36.469.275.000	79.282.409.0005	
APRIL		37.442.789.000	33.914.437.000	
MEI		43.106.840.000	69.522.135.000	
JUNI		108.083.211.000	88.066.303.640	
JULI		61.659.394.000	95.081.888.100	
AGUSTUS		91.366.307.000	158.838.272.000	
SEPTEMBER		82.905.810.000	125.868.993.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DATA BULAN JANUARI 2025

No	JENIS IKAN	JANUARI		
		PRODUKSI	NILAI PRODUKSI	HARGA RATA-RATA
1	ALBAKORA	1.698	50.940.000	30.000
2	ALU-ALU	32	768.000	24.000
3	BARAKUDA	16	384.000	24.000
4	BAWAL HITAM	213	9.585.000	45.000
5	BAWAL PUTIH	536	101.840.000	190.000
6	BAWAL SABIT (CASPER)	8	144.000	18.000
7	BELO/SELANGET	3.783	11.349.000	3.000
8	BILIS	7.714	23.142.000	3.000
9	CAKALANG	261.941	4.191.056.000	16.000
10	CUMI KARET	420.052	10.501.300.000	25.000
11	GABUS LAUT	439	7.902.000	18.000
12	GULAMAH	2.941	44.115.000	15.000
13	HIU ANJING (C. CAKILAN)	284	3.408.000	12.000
14	HIU LALAEK (C. SELENDANG)	1.907	15.256.000	8.000
15	HIU LANJAM (C. LANJAMAN)	2.509	35.126.000	14.000
16	HIU MONYET (C. TIKUSAN)	1.852	22.224.000	12.000
17	HIU TIKUS (C. PAITAN)	1.701	20.412.000	12.000
18	IKAN AYAM-AYAM	100	1.800.000	18.000
19	IKAN LIDAH	162	4.050.000	25.000
20	IKAN PEDANG	20.133	601.749.000	29.889
21	IKAN SEBELAH	53	1.325.000	25.000
22	IKAN SETAN (GINDARA)	501	10.521.000	21.000
23	JAMBRET	5.729	114.580.000	20.000
24	KEMBUNG	2.325	58.125.000	25.000
25	KERONG	1.116	33.480.000	30.000
26	KEROSOK	2.641	92.435.000	35.000
27	KUWE	408	12.240.000	30.000
28	LAYANG BENGGOL	39.972	559.608.000	14.000
29	LAYARAN	3.450	75.900.000	22.000
30	LEMADANG	80.391	1.286.256.000	16.000
31	MADIDIHANG	114.137	3.880.658.000	34.000
32	MANYUNG/JAHAN	6.810	102.150.000	15.000
33	NYUNGLAS (TENGGIRI)	2.337	70.162.000	30.022
34	OPAH (SEMAR)	50	500.000	10.000
35	PARI KELAPA	294	2.058.000	7.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

36	PARI KELELAWAR (PLAMPANGAN)	89	1.068.000	12.000
37	REMANG	2.132	59.696.000	28.000
38	SELAR BENTONG	1.140	17.100.000	15.000
39	SETUHUK HITAM (MARLIN)	6.374	203.910.000	31.991
40	SETUHUK LORENG (GEPENG)	1.583	44.324.000	28.000
41	SUNGLIR	440	7.920.000	18.000
42	TETENGKEK	147	1.911.000	13.000
43	TIGAWAJA	865	21.625.000	25.000
44	TK. MADIDIHANG	28.497	541.443.000	19.000
45	TK. MATA BESAR	178.698	3.395.262.000	19.000
46	TONGKOL PISANG CERUTU (LISONG)	26.899	292.220.000	10.864
47	TUNA MATA BESAR	68.531	2.192.992.000	32.000
48	TUNA SIRIP BIRU SELATAN	340	11.560.000	34.000
49	UDANG DOGOL	1.389	83.340.000	60.000
50	UDANG JERBUNG	912	173.280.000	190.000
TOTAL		**1.306.271**	**28.994.199.000**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DATA BULAN PEBRUARI 2025

No	JENIS IKAN	FEBRUARI		
		PRODUKSI	NILAI PRODUKSI	HARGA RATA-RATA
1	ALBAKORA	5.768	184.502.000	31.987
2	ALU-ALU	39	969.000	24.846
3	BARAKUDA	63	1.890.000	30.000
4	BAWAL PUTIH	397	79.400.000	200.000
5	BAWAL SABIT (CASPER)	2.893	66.539.000	23.000
6	BELO/SELANGET	3.414	10.242.000	3.000
7	BILIS	7.448	22.344.000	3.000
8	CAKALANG	68.400	1.075.966.000	15.730
9	COBIA	311	5.598.000	18.000
10	CUCUT BASTER (C. CAKILAN AIR)	255	2.805.000	11.000
11	CUMI KARET	233.128	6.870.900.000	29.473
12	DOGOL	627	37.620.000	60.000
13	GABUS LAUT	22	396.000	18.000
14	GULAMAH	1.640	24.600.000	15.000
15	HIU ANJING (C. CAKILAN)	308	3.589.000	11.653
16	HIU KODOK	395	4.495.000	11.380
17	HIU LALAEK (C. SELENDANG)	3.891	38.768.000	9.964
18	HIU LANJAM (C. LANJAMAN)	3.997	63.653.000	15.925
19	HIU MACAN (C. BUAS)	616	7.392.000	12.000
20	HIU MONYET (C. TIKUSAN)	739	10.202.000	13.805
21	HIU TAJI	1.005	4.020.000	4.000
22	HIU TIKUS (C. PAITAN)	1.920	26.880.000	14.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

23	IKAN LIDAH	136	3.400.000	25.000
24	IKAN PEDANG	21.311	680.578.000	31.936
25	IKAN SEBELAH	176	4.400.000	25.000
26	IKAN SETAN (GINDARA)	6.746	161.814.000	23.987
27	JAMBRET	5.239	104.780.000	20.000
28	JERBUNG	357	67.830.000	190.000
29	KEMBUNG	1.559	38.975.000	25.000
30	KERONG	1.525	45.750.000	30.000
31	KEROSOK	2.309	80.815.000	35.000
32	LAYANG BENGGOL	47.836	861.048.000	18.000
33	LAYARAN	2.210	52.658.000	23.827
34	LEMADANG	78.076	1.521.588.000	19.489
35	LAYUR	9.198	275.940.000	30.000
36	MADIDIHANG	135.389	5.365.862.000	39.633
37	MANYUNG/JAHAN	9.670	145.050.000	15.000
38	NYUNGLAS (TENGGIRI)	4.013	127.944.000	31.882
39	OPAH (SEMAR)	770	7.700.000	10.000
40	PARI BURUNG	30	210.000	7.000
41	PARI KAMPRET	12	144.000	12.000
42	PARI KEKEH	38	380.000	10.000
43	PARI KELAPA	310	2.170.000	7.000
44	PARI KELELAWAR (PLAMPANGAN)	322	3.426.000	10.640
45	REMANG	603	16.884.000	28.000
46	SELAR BENTONG	11.655	174.825.000	15.000
47	SETUHUK HITAM (MARLIN)	7.124	234.062.000	32.855

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

48	SETUHUK LORENG (GEPENG)	1.316	43.344.000	32.936
49	SUNGLIR	1.494	31.524.000	21.100
50	TIGAWAJA	883	22.075.000	25.000
51	TK. MADIDIHANG	26.064	495.216.000	19.000
52	TK. MATA BESAR	172.348	3.274.612.000	19.000
53	TONGKOL BANYAR	88	880.000	10.000
54	TONGKOL PISANG CERUTU (LISONG)	2.472	20.594.000	8.331
55	TUNA MATA BESAR	45.625	1.624.536.000	35.606
56	TUNA SIRIP BIRU SELATAN	1.525	60.430.000	39.626
TOTAL		**935.705**	**24.094.214.000**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DATA BULAN MARET 2025

No	JENIS IKAN	MARET		
		PRODUKSI	NILAI PRODUKSI	HARGA RATA-RATA
1	ALBAKORA	5.080	157.656.000	31.035
2	ALU-ALU	315	6.101.000	19.368
3	BARAKUDA	164	4.646.000	28.329
4	BAWAL HITAM	200	8.000.000	40.000
5	BAWAL PUTIH	293	58.600.000	200.000
6	BAWAL SABIT (CASPER)	694	13.904.000	20.035
7	BELO/SELANGET	5.663	16.989.000	3.000
8	BIJI NANGKA	9	135.000	15.000
9	BILIS	10.452	31.356.000	3.000
10	CAKALANG	343.981	4.973.800.000	14.460
11	CUCUT BASTER (C. CAKILAN AIR)	790	9.402.000	11.901
12	CUMI KARET	544.009	16.320.270.000	30.000
13	GULAMAH	1.872	28.770.000	15.369
14	HIU ANJING (C. CAKILAN)	4.865	55.065.000	11.319
15	HIU KODOK	11	99.000	9.000
16	HIU LALAEK (C. SELENDANG)	2.872	24.578.000	8.558
17	HIU LANJAM (C. LANJAMAN)	12.941	192.510.000	14.876
18	HIU MACAN (C. BUAS)	2.281	26.700.000	11.705
19	HIU MONYET (C. TIKUSAN)	10.505	111.043.000	10.570
20	HIU TAJI	22	88.000	4.000
21	HIU TETERI	424	9.540.000	22.500
22	HIU TIKUS (C. PAITAN)	15.865	222.110.000	14.000
23	IKAN AYAM-AYAM	53	477.000	9.000
24	IKAN LIDAH	340	8.500.000	25.000
25	IKAN PEDANG	60.364	1.849.059.300	30.632
26	IKAN SETAN (GINDARA)	3.251	86.641.300	26.651
27	KAKAP MERAH	913	50.035.000	54.803
28	JAMBRET	6.304	126.080.000	20.000
29	KEMBUNG	140	3.550.000	25.357
30	KERAPU	1.659	78.896.300	47.557
31	KERAPU BALONG	104	3.640.000	35.000
32	KURISI	3.052	57.698.000	18.905
33	KERONG	1.383	41.490.000	30.000
34	KEROSOK	2.962	103.670.000	35.000
35	KUWE	41	1.230.000	30.000
36	LAYANG BENGGOL	60.287	718.445.300	11.917
37	LAYARAN	3.320	78.651.300	23.690

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

38	LEMADANG	127.662	2.441.103.000	19.122
39	LAYUR	597.825	20.095.978.000	33.615
40	MADIDIHANG	366.933	14.677.320.000	40.000
41	MANYUNG/JAHAN	4.608	69.120.000	15.000
42	NYUNGLAS (TENGGIRI)	7.878	251.520.000	31.927
43	OPAH (SEMAR)	306	3.060.000	10.000
44	PARI KELAPA	119	833.000	7.000
45	PARI KELELAWAR (PLAMPANGAN)	403	3.660.000	9.082
46	REMANG	386	10.808.000	28.000
47	SELAR BENTONG	11.202	179.741.300	16.045
48	SETUHUK HITAM (MARLIN)	14.650	369.704.300	25.236
49	SETUHUK LORENG (GEPENG)	2.828	88.097.000	31.152
50	SUNGLIR	4.470	89.422.000	20.005
51	TIGAWAJA	977	24.425.000	25.000
52	TK. MADIDIHANG	74.981	1.365.363.300	18.209
53	TK. MATA BESAR	550.444	9.957.711.300	18.090
54	TONGKOL PISANG CERUTU (LISONG)	15.542	120.721.300	7.767
55	TUNA MATA BESAR	103.131	3.712.716.000	36.000
56	TUNA SIRIP BIRU SELATAN	8.542	341.680.000	40.000
TOTAL		**3.000.368**	**79.282.409.000**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DATA BULAN APRIL 2025

No	JENIS IKAN	APRIL		
		PRODUKSI	NILAI PRODUKSI	HARGA RATA-RATA
1	Albakora	8.617	267.127.000	31.000
2	Alu-alu	321	5.778.000	18.000
3	Bawal Hitam	144	6.480.000	45.000
4	Belo/selanget	4.664	20.877.000	4.476
5	Bilis	9.967	29.901.000	3.000
6	Cakalang	94.663	1.325.282.000	14.000
7	Cobia	51	918.000	18.000
8	Cucut baster	51	612.000	12.000
9	Cumi karet	250.659	7.519.770.000	30.000
10	Gindara/Ikan setan	262	6.026.000	23.000
11	Gulamah	542	8.130.000	15.000
12	Hiu air	39	468.000	12.000
13	Hiu anjing	188	2.180.000	11.596
14	Hiu koboi	12	192.000	16.000
15	Hiu lalaek	1.461	11.688.000	8.000
16	Hiu lanjam	2.924	40.936.000	14.000
17	Hiu macan	63	756.000	12.000
18	Hiu monyet	512	4.608.000	9.000
19	Hiu tikus	1.851	25.914.000	14.000
20	Ikan layaran	1.595	31.969.000	20.043
21	Ikan pedang	21.296	642.160.000	30.154
22	Jambret	7.983	159.660.000	20.000
23	Kerong	1.061	31.830.000	30.000
24	Kerosok	3.537	123.795.000	35.000
25	Layang	2.210	22.100.000	10.000
26	Layang benggol	15.143	151.430.000	10.000
27	Layur	313.481	10.610.398.000	33.847
28	Lemadang	16.898	321.062.000	19.000
29	Madidihang	180.492	7.216.868.000	39.984
30	Tk Madidihang	37.537	675.666.000	18.000
31	Manyung	3.577	53.655.000	15.000
32	Nyunglas	1.557	49.752.000	31.954
33	Selar bentong	377	5.655.000	15.000
34	Setuhuk hitam	5.996	189.676.000	31.634
35	Setuhuk loreng	541	16.771.000	31.000
36	Sunglir	241	4.820.000	20.000
37	Tigawaja	405	10.125.000	25.000
38	Tongkol Pisang	46	322.000	7.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	Balaki			
39	Tongkol pisang-cerutu	2.658	18.606.000	7.000
40	Tuna mata besar	34.644	1.247.184.000	36.000
41	Tk Mata Besar	162.465	2.924.370.000	18.000
42	Tuna sirip biru selatan	3.223	128.920.000	40.000
TOTAL		**1.193.954**	**33.914.437.000**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DATA BULAN MEI 2025

No	JENIS IKAN	MEI		
		PRODUKSI	NILAI PRODUKSI	HARGA RATA-RATA
1	Albakora	27.573	854.763.000	31.000
2	Alu-alu	357	6.426.000	18.000
3	Barakuda	105	2.964.000	28.229
4	Bawal sabit	30	600.000	20.000
5	Belo/selanget	5.719	17.157.000	3.000
6	Bilis	15.101	45.303.000	3.000
7	Cakalang	263.555	3.690.514.000	14.003
8	Cucut baster	645	7.683.000	11.912
9	Cumi karet	402.695	12.103.110.000	30.055
10	Dogol	286	17.160.000	60.000
11	Gulamah	3.370	50.550.000	15.000
12	Hiu anjing	578	6.926.000	11.983
13	Hiu koboi	8	128.000	16.000
14	Hiu lalaek	3.517	28.136.000	8.000
15	Hiu lanjam	6.895	96.530.000	14.000
16	Hiu macan	206	1.644.000	7.981
17	Hiu monyet	10.515	95.370.000	9.070
18	Hiu teteri	424	9.540.000	22.500
19	Hiu tikus	27.171	380.300.000	13.997
20	Ikan Layaran	4.529	93.610.000	20.669
21	Ikan Pedang	42.577	1.277.190.000	29.997
22	Ikan setan	2.165	49.795.000	23.000
23	Jambret	12.868	257.360.000	20.000
24	Jerbung	522	99.180.000	190.000
25	Kerong	1.694	50.820.000	30.000
26	Kerosok	5.134	179.690.000	35.000
27	Layang	75.888	758.880.000	10.000
28	Layur	770.446	26.028.630.000	33.784
29	Lemadang	20.765	399.046.000	19.217
30	Lendra/lidah	638	13.970.000	21.897
31	Madidihang	351.835	14.073.400.000	40.000
32	Manyung	2.658	39.870.000	15.000
33	Nyunglas	2.223	70.876.000	31.883
34	Pari kelelawar	77	616.000	8.000
35	Pari Plampangan	93	930.000	10.000
36	Selar bentong	54	810.000	15.000
37	Setuhuk hitam	10.731	342.285.000	31.897
38	Setuhuk loreng	961	29.791.000	31.000
39	Sunglir	684	13.680.000	20.000
40	Tigawaja	2.126	53.150.000	25.000
41	Tk Madidihang	56.985	1.322.224.000	23.203
42	Tk Mata Besar	211.947	3.915.432.000	18.474
43	Tongkol banyar	480	4.800.000	10.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

44	Tongkol pisang cerutu	15.831	155.136.000	9.800
45	Tuna Mata Besar	78.970	2.842.920.000	36.000
46	Tuna sirip biru selatan	831	33.240.000	40.000
TOTAL		**2.442.462**	**69.522.135.000**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DATA BULAN JUNI 2025

No	JENIS IKAN	JUNI		
		PRODUKSI	NILAI PRODUKSI	HARGA RATA-RATA
1	**Albakora**	55.233	1.712.653.000	31.008
2	**Alu-alu**	1.238	22.802.000	18.418
3	**Aruan tasek**	30	600.000	20.000
4	**Barakuda**	199	5.572.000	28.000
5	Bawal putih	777	155.400.000	200.000
6	**Bawal sabit**	63	1.260.000	20.000
7	Belo/Selanget	6.716	20.148.000	3.000
8	Bilis	17.176	51.528.000	3.000
9	**Cakalang**	506.755	7.083.575.000	13.978
10	**Cobia**	21	378.000	18.000
11	**Cucut baster**	233	2.718.000	11.665
12	**Cumi karet**	806.837	25.158.829.440	31.182
13	Dogol	1.265	75.900.000	60.000
14	**Gabus laut**	169	3.042.000	18.000
15	Gulamah	5.658	84.870.000	15.000
16	**Hiu anjing**	1.531	18.005.000	11.760
17	**Hiu lalaek**	6.185	49.678.000	8.032
18	**Hiu lanjam**	8.579	121.744.000	14.191
19	**Hiu macan**	598	9.120.000	15.251
20	**Hiu monyet**	10.156	91.243.000	8.984
21	**Hiu tikus**	20.767	290.533.000	13.990
22	**Ikan ayam-ayam**	41	369.000	9.000
23	**Ikan layaran**	5.306	107.887.000	20.333
24	Ikan lidah	220	5.500.000	25.000
25	**Ikan pedang**	84.302	2.502.998.000	29.691
26	**Ikan setan**	2.281	52.535.000	23.032
27	Jambret	14.106	282.120.000	20.000
28	Jerbung	2.093	397.670.000	190.000
29	**Kenyar**	407	7.014.000	17.233
30	**Kerapu**	1.822	81.645.000	44.811
31	Kerong	2.170	65.100.000	30.000
32	Kerosok	5.213	182.455.000	35.000
33	Kurisi	2.752	54.304.000	19.733
34	**Layang**	11.058	110.580.000	10.000
35	**Layang anggur**	3.728	37.280.000	10.000
36	**Layang benggol**	38.598	385.980.000	10.000
37	**Layur**	847.755	28.652.262.200	33.798
38	**Lemadang**	35.652	715.692.000	20.074
39	**Madidihang**	651.352	26.054.080.000	40.000
40	**Manyung**	6.150	92.250.000	15.000
41	**Nyunglas**	3.053	97.212.000	31.841
42	**Pari kelapa**	175	1.225.000	7.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

43	**Pari kelelawar**	545	4.592.000	8.426
44	Remang	581	16.268.000	28.000
45	**Setuhuk hitam**	15.158	485.056.000	32.000
46	**Setuhuk loreng**	4.115	127.588.000	31.006
47	**Sunglir**	1.055	20.264.000	19.208
48	Tigawaja	410	10.250.000	25.000
49	**Tk madidihang**	47.618	924.162.000	19.408
50	**Tk mata besar**	339.134	6.123.042.000	18.055
51	**Tongkol banyar**	11.864	118.640.000	10.000
52	**Tongkol pisang cerutu**	2.579	18.482.000	7.166
53	**Tuna mata besar**	143.064	5.210.244.000	36.419
54	**Tuna sirip biru selatan**	452	18.080.000	40.000
TOTAL		**3.734.995**	**107.922.424.640**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DATA BULAN JULI 2025

No	JENIS IKAN	JULI		
		PRODUKSI	NILAI PRODUKSI	HARGA RATA-RATA
1	Albakora	63.261	1.957.526.000	30.944
2	Alu-alu	147	2.646.000	18.000
3	Aruan tasek	41	820.000	20.000
4	Barakuda	13	364.000	28.000
5	Bawal Hitam	955	43.975.000	46.047
6	Bawal putih	1.997	499.250.000	250.000
7	Bawal sabit	133	1.292.000	9.714
8	Belo/selanget	10.045	30.135.000	3.000
9	Bilis	29.709	89.127.000	3.000
10	Cakalang	881.277	12.381.372.000	14.049
11	Cobia	15	270.000	18.000
12	Cucut baster	1.030	12.145.000	11.791
13	Cumi karet	670.264	19.574.067.000	29.204
14	Dogol	3.181	221.170.000	69.528
15	Gabus laut	19	342.000	18.000
16	Gulamah	14.599	218.985.000	15.000
17	Hiu anjing	2.098	23.826.000	11.357
18	Hiu koboy	16	256.000	16.000
19	Hiu lalaek	7.260	56.968.000	7.847
20	Hiu lanjam	6.329	86.634.800	13.689
21	Hiu Macan	1.262	19.924.000	15.788
22	Hiu monyet	7.115	69.171.000	9.722
23	Hiu tikus	18.719	255.220.000	13.634
24	Ikan ayam-ayam	563	6.487.000	11.522
25	Ikan layaran	3.027	60.880.000	20.112
26	Ikan pedang	62.626	1.869.180.000	29.847
27	Ikan sebelah	81	486.000	6.000
28	Ikan setan	3.730	81.782.300	21.926
29	Jambret	24.900	592.230.000	23.784
30	Jerbung	4.644	924.050.000	198.977
31	Kenyar	281	5.058.000	18.000
32	Kerapu karang	747	33.615.000	45.000
33	Kerong	3.493	104.790.000	30.000
34	Kerosok	7.827	303.205.000	38.738
35	Layang	14.534	145.340.000	10.000
36	Layang	17.445	174.450.000	10.000
37	Layang benggol	47.191	471.910.000	10.000
38	Layur	180.620	6.054.650.000	33.521
39	Lemadang	65.083	1.231.416.000	18.921
40	Lidah	793	19.825.000	25.000
41	Madidihang	771.994	31.267.444.000	40.502
42	Manyung	15.424	231.360.000	15.000
43	Nyunglas	9.407	299.272.000	31.814
44	Opah	881	17.620.000	20.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

45	Pari Burung	22	154.000	7.000
46	Pari Kelapa	176	1.232.000	7.000
47	Pari kelelawar	1.919	15.516.000	8.085
48	Remang	460	12.880.000	28.000
49	Setuhuk hitam	13.176	421.263.000	31.972
50	Setuhuk loreng	3.367	103.243.000	30.663
51	Sunglir	1.235	24.470.000	19.814
52	Tigawaja	1.392	34.800.000	25.000
53	Tk madidihang	55.207	963.766.000	17.457
54	Tk mata besar	310.611	5.644.332.000	18.172
55	Tongkol abu-abu	91	910.000	10.000
56	Tongkol banyar	3.771	37.710.000	10.000
57	Tongkol pisang cerutu	11.510	89.190.000	7.749
58	Tuna mata besar	230.517	8.289.366.000	35.960
59	Tuna sirip biru selatan	63	2.520.000	40.000
Total		**3.588.293**	**95.081.888.100**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DATA BULAN AGUSTUS 2025

No	JENIS IKAN	AGUSTUS		
		PRODUKSI	NILAI PRODUKSI	HARGA RATA-RATA
1	Albakora	92.283	2.858.888.000	30.980
2	Alu - alu	53	954.000	18.000
3	Alu-alu	79	1.422.000	18.000
4	Barakuda	30	840.000	28.000
5	Bawal hitam	839	41.950.000	50.000
6	Bawal putih	677	169.250.000	250.000
7	Bawal sabit	306	6.120.000	20.000
8	Belo/selanget	14.445	72.225.000	5.000
9	Bilis	26.942	134.710.000	5.000
10	Cakalang	1.177.757	17.815.000.000	15.126
11	Cucut baster	766	9.192.000	12.000
12	Cumi karet	892.941	26.774.325.000	29.984
13	Gulamah	12.675	190.125.000	15.000
14	Dogol	2.674	187.180.000	70.000
15	Hiu anjing	4.145	49.740.000	12.000
16	Hiu lalaek	7.414	60.252.000	8.127
17	Hiu lanjam	6.130	85.820.000	14.000
18	Hiu macan	541	8.656.000	16.000
19	Hiu monyet	11.048	100.162.000	9.066
20	Hiu tikus	23.140	326.102.000	14.093
21	Ikan ayam-ayam	81	729.000	9.000
22	Ikan layaran	2.386	48.556.000	20.350
23	Ikan pedang	64.249	1.930.182.000	30.042
24	Ikan sebelah	308	1.848.000	6.000
25	Ikan setan	4.431	101.976.000	23.014
26	Jambret	21.096	527.400.000	25.000
27	Jerbung	3.783	756.600.000	200.000
28	Kerong	2.965	88.950.000	30.000
29	Kerosok	7.751	310.040.000	40.000
30	Layang benggol	81.438	647.664.000	7.953
31	Layur	50.653	1.683.102.000	33.228
32	Lemadang	120.500	2.287.190.000	18.981
33	Lidah	1.391	34.775.000	25.000
34	Madidihang	1.735.077	69.381.680.000	39.988
35	Manyung	14.141	212.115.000	15.000
36	Nyunglas	3.901	124.794.000	31.990
37	Opah	191	3.820.000	20.000
38	Pari kelelawar	1.405	12.338.000	8.781
39	Remang	176	4.928.000	28.000
40	Setuhuk hitam	15.864	507.648.000	32.000
41	Setuhuk loreng	4.958	153.696.000	31.000
42	Sunglir	1.476	29.742.000	20.150
43	Tigawaja	2.662	66.550.000	25.000
44	Tk madidihang	35.084	722.556.000	20.595

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

45	Tk mata besar	339.005	6.093.771.000	17.975
46	Tongkol banyar	1.442	14.282.000	9.904
47	Tongkol pisang cerutu	25.045	175.315.000	7.000
48	Tuna mata besar	667.367	24.023.112.000	35.997
Total		**5.483.711**	**158.838.272.000**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DATA BULAN SEPTEMBER 2025

No	JENIS IKAN	SEPTEMBER		
		PRODUKSI	NILAI PRODUKSI	HARGA RATA-RATA
1	Albakora	125.796	3.899.629.000	31.000
2	Alu-alu	62	1.116.000	18.000
3	Bawal Hitam	993	49.650.000	50.000
4	Bawal Putih	250	62.500.000	250.000
5	Bawal sabit	728	14.560.000	20.000
6	Belo/selanget	10.000	50.000.000	5.000
7	Bilis	26.685	133.425.000	5.000
8	Cakalang	953.706	13.351.884.000	14.000
9	Cobia	127	2.286.000	18.000
10	Cucut baster	1.290	15.480.000	12.000
11	Cumi karet	894.608	26.681.705.000	29.825
12	Dogol	2.506	175.420.000	70.000
13	Hiu anjing	4.194	50.328.000	12.000
14	Hiu lalaek	7.687	61.496.000	8.000
15	Hiu lanjam	4.232	59.248.000	14.000
16	HIU Macan	119	1.492.000	12.538
17	Hiu monyet	7.966	78.358.000	9.837
18	Hiu taji	262	1.048.000	4.000
19	Hiu teteri	1.612	36.270.000	22.500
20	Hiu tikus	24.361	341.054.000	14.000
21	Gulamah	8.859	132.885.000	15.000
22	Ikan layaran	2.502	50.040.000	20.000
23	Ikan pedang	72.827	2.182.351.000	29.966
24	Ikan sebelah	270	1.620.000	6.000
25	Ikan setan	5.106	117.438.000	23.000
26	Jambret	23.686	592.150.000	25.000
27	Jerbung	3.869	773.800.000	200.000
28	Kerong	2.950	88.500.000	30.000
29	Kerosok	7.459	298.360.000	40.000
30	Layang	9.185	91.850.000	10.000
31	Layang benggol	44.735	447.350.000	10.000
32	Layur	3.900	123.680.000	31.713
33	Lemadang	101.914	1.936.366.000	19.000
34	Lidah	1.493	37.325.000	25.000
35	Madidihang	1.375.925	55.037.000.000	40.000
36	Manyung	10.430	156.450.000	15.000
37	Nyunglas	2.997	95.904.000	32.000
38	Opah	1.267	25.340.000	20.000
39	Pari kelelawar	1.121	8.968.000	8.000
40	Remang	427	11.956.000	28.000
41	Setuhuk hitam	12.422	397.504.000	32.000
42	Setuhuk loreng	4.651	144.250.000	31.015
43	Sunglir	7.004	140.635.000	20.079
44	Tigawaja	1.118	27.950.000	25.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

45	Tk madidihang	25.191	453.438.000	18.000
46	Tk mata besar	140.544	2.531.250.000	18.010
47	Tk. Madidihang	2.272	40.896.000	18.000
48	Tk. Mata besar	474	8.532.000	18.000
49	Tk. Tuna mata besar	3.192	57.456.000	18.000
50	Tongkol pisang cerutu	38.406	302.726.000	7.882
51	Tuna mata besar	394.808	14.488.074.000	36.697
Total		**4.378.188**	**125.868.993.000**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

NOTA DINAS
NOMOR 762/PPSC/TU.140/X/2025

Yth. : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Dari : Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran
Hal : Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama lingkup Tim Kerja Kesyahbandaran Triwulan III Tahun 2025
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 2 Oktober 2025

Sehubungan dengan Pelaksanaan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2025, terlampir kami laporkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melekat pada Tim Kerja Kesyahbandaran dengan periode pengukuran Triwulan III sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang Optimal dan Bertanggung Jawab
    1. IKU.5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)

        Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang menunjukkan jumlah Persetujuan Berlayar (PB) yang diterbitkan, jumlah Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) yang diterbitkan dan jumlah Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang diterbitkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

        Pengukuran kinerja Tingkat Pelayananan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dilakukan secara tahunan.

2. Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
    2.1 IKU.8 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)

        Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

        Perhitungan IKU ini dilakukan dengan menghitung jumlah dokumen kapal perikanan (surat ukur dan/atau sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. IKU ini merupakan IKU dengan periode pengukuran triwulanan.

IKU	Target	Realisasi Sd TW III	Capaian (%)
Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	680	1.283	188,68

Capaian kinerja pelaksanaan Penerbitan SKKP pada kapal Izin Daerah dapat dilaksanakan secara optimal salah satunya dikarenakan adanya kebijakan penerbitan melalui mekanisme pembaruan tanpa dilakukan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan.

Penerbitan SKKP Triwulan III seluruhnya dilakukan dengan mekanisme Online melalui aplikasi SICEFI serta PPKKP dapat melakukan pemeriksaan secara bergantian disesuaikan dengan beban pekerjaan pada saat adanya permohonan penerbitan SKKP dari pemilik kapal yang telah tersampaikan.

2.2 IKU.9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)

Merupakan indikator kinerja yang menunjukkan persentase kapal perikanan yang tersertifikasi kompetensi layak laut, layak tangkap dan layak simpan serta yang memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Indikator ini memiliki periode pengukuran semesteran.

IKU	Target	Realisasi S.d SM I	Capaian (%)
Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26 (kategori cukup)	0,36	119,23

Capaian kinerja Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai) telah dilaksanakan secara optimal. Realisasi pada Semester I mencapai 0,36 dari target tahunan 0,26 atau 119,23% dengan predikat capaian tahunan telah terealisasi.

Kapal izin Daerah yang beroperasi di atas 12 Mill sebagian besar telah melakukan migrasi ke Izin kewenangan Pusat mengakibatkan meningkatnya pemenuhan sertifikasi awak kapal perikanan termasuk kepemilikan Buku Kapal Perikanan,

Matriks capaian dan dukung pengukuran IKU periode Triwulan III Tahun 2025 terlampir kami sampaikan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.

Dwiharto Kurniawan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KAPAL PERIKANAN IZIN DAERAH YANG MEMENUHI KETENTUAN
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

BULAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
JANUARI	70	37	41
FEBUARI	80	38	49
MARET	73	39	60
APRIL	73	46	36
MEI	92	41	39
JUNI	44	50	6
JULI	70	39	8
AGUSTUS	21	35	5
SEPTEMBER	28	37	5
OKTOBER	25	21	
NOVEMBER	8	13	
DESEMBER	16	38	
JUMLAH	600	434	249
TOTAL	1.283		

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
JALAN LINGKAR TELUK PENYU NOMOR 2 CILACAP JAWA TENGAH 53215
TELEPON 0282 - 532686, FAKSIMILE 0282- 532688
LAMAN www.kkp.go.id SUREL pps.cilacap@kkp.go.id

Nomor : B.2645/PPSC/PI.240/VIII/2025 4 Agustus 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Penyampaian Rekapitulasi Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) Perizinan Daerah

Yth. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
di Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Rekapitulasi Penerbitan Sertifikan Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada bulan Juli 2025 Sebanyak 8 (Delapan) permohonan. Pemilik Kapal perikanan yang telah mengajukan permohonan perpanjangan sebanyak 8 (Delapan) kapal serta telah diterbitkan sertifikatnya (sebagaimana terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Cilacap,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Imas Masriah

Tembusan:
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Surat
Nomor : B.2645/PPSC/PI.240/VIII/2025
Tanggal : 4 Agustus 2025

REKAPITULASI PENERBITAN SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL PERIKANAN

Unit Kerja : Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Periode : Juli 2025

No	Nama Kapal	Nama Pemilik	Ukuran Kapal (GT)	No. Sertifikat	Tanggal Terbit	PPKKP	Jenis API	Keterangan
1	ANTON JAYA 1	SUJASMAN	25	B.254/PPSC/PI.210/VII/2025	31/07/2025	Welly Yunianto	Jaring Insang Hanyut	Penerbitan Baru
2	SATYA JAYA 02	PONIMAN	17	B.249/PPSC/PI.210/VII/2025	15/07/2025	Rista Tri Purnasari	Pancing Ulur	Penerbitan Baru
3	SATYA JAYA 03	PONIMAN	21	B.250/PPSC/PI.210/VII/2025	15/07/2025	Rista Tri Purnasari	Pancing Ulur	Penerbitan Baru
4	CHARLY WIJAYA	OEY GIOK HWA	26	B.253/PPSC/PI.210/VII/2025	2025-07-31	-	Jaring Insang Hanyut	Pembaruan Sertifikat
5	HASIL MELIMPAH JAYA 9	WINSON CAHYADI	25	B.251/PPSC/PI.210/VII/2025	2025-07-23	-	Pancing Ulur	Pembaruan Sertifikat
6	RIZKI LADUNI 3	LUKMAN HAKIM	10	B.252/PPSC/PI.210/VII/2025	2025-07-23	-	Pancing Ulur	Pembaruan Sertifikat
7	BARU MUNCUL 3	HJ.AWEN	24	B.248/PPSC/PI.210/VII/2025	2025-07-15	-	Jaring Insang Hanyut	Pembaruan Sertifikat
8	SUMBER MULIA 2	H. MUSONO ALIAS YUSUP	30	B.247/PPSC/PI.210/VII/2025	2025-07-01	-	Pancing Ulur	Pembaruan Sertifikat

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Cilacap,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Imas Masriah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
JALAN LINGKAR TELUK PENYU NOMOR 2 CILACAP JAWA TENGAH 53215
TELEPON (0282) 532686, FAKSIMILE (0282) 532688
LAMAN www.kkp.go.id SUREL pps.cilacap@kkp.go.id

Nomor : B.3159/PPSC/PI.410/IX/2025 2 September 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Rekapitulasi Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) Perizinan Daerah

Yth. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
di Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Rekapitulasi Penerbitan Sertifikan Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada bulan Agustus 2025 Sebanyak 5 (Lima) permohonan. Pemilik Kapal perikanan yang telah mengajukan permohonan perpanjangan sebanyak 5 (Lima) kapal serta telah diterbitkan sertifikatnya (sebagaimana terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Cilacap,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Imas Masriah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran
Nomor : B.3159/PPSC/PI.410/IX/2025
Tanggal : 2 September 2025

REKAPITULASI PENERBITAN SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL PERIKANAN

Unit Kerja : Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Periode : Agustus 2025

No	Nama Kapal	Nama Pemilik	Ukuran Kapal (GT)	No. Sertifikat	Tanggal Terbit	PPKKP	Jenis API	Keterangan
1	BANGKIT 6	H. SUYANTO	20	B.259/PPSC/PI.210/VIII/2025	08/08/2025	Arie Nurfita	Pancing Ulur	Penerbitan Baru
2	LANCAR BAHAGIA	HENDRI	24	B.255/PPSC/PI.210/VIII/2025	01/08/2025	-	Pancing Ulur	Pembaruan Sertifikat
3	PUTRA BAROKAH	MUKLISAH	14	B.256/PPSC/PI.210/VIII/2025	05/08/2025	-	Jaring Insang Hanyut	Pembaruan Sertifikat
4	SUCI JAYA	MUKLISAH	29	B.258/PPSC/PI.210/VIII/2025	07/08/2025	-	Pancing Ulur	Pembaruan Sertifikat
5	ADHIKA - I	HJ.AWEN	19	B.257/PPSC/PI.210/VIII/2025	07/08/2025	-	Jaring Insang Hanyut	Pembaruan Sertifikat

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Cilacap,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Imas Masriah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

NOTA DINAS
NOMOR 756/PPSC/PI.210/X/2025

Yth.	:	Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
Dari	:	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Lampiran	:	Satu Lembar
Hal	:	Penyampaian Rekapitulasi Penerbitan SKKP Perizinan Daerah
Tanggal	:	1 Oktober 2025

Bersama ini kami sampaikan Rekapitulasi Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada bulan September 2025 Sebanyak 5 (Lima) permohonan. Pemilik Kapal perikanan yang telah mengajukan permohonan perpanjangan sebanyak 5 (Lima) kapal serta telah diterbitkan sertifikatnya (sebagaimana terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani
Secara Elektronik

Imas Masriah

Tembusan :
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran
Nomor : 756/PPSC/PI.210/X/2025
Tanggal : 1 Oktober 2025

REKAPITULASI PENERBITAN SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL PERIKANAN

Unit Kerja : Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Periode : September 2025

No	Nama Kapal	Nama Pemilik	Ukuran Kapal (GT)	No. Sertifikat	Tanggal Terbit	PPKKP	Jenis API	Keterangan
1	MUTIARA JAYA	REGINA CYNTHIA DEWI	20	B.260/PPSC/PI.210/IX/2025	04/9/2025	Agung Ferieigha Nugroho	Pancing Ulur	Penerbitan Baru
2	CAMAR LAUT 888	WIWIK SUPARWATI	28	B.261/PPSC/PI.210/IX/2025	04/9/2025	Agung Ferieigha Nugroho	Pancing Ulur	Penerbitan Baru
3	BINTANG SUKSES 2	DWI ANDRI OKTAVIAN	21	B.262/PPSC/PI.210/IX/2025	11/9/2025	Agung Ferieigha Nugroho	Pancing Ulur	Penerbitan Baru
4	PUTRI BALI K	YULIUS HARTANTO	20	B.264/PPSC/PI.210/IX/2025	18/9/2025	-	Pancing Ulur	Pembaruan Sertifikat
5	ADHI GENDUT 01	SUMEDI	22	B.265/PPSC/PI.210/IX/2025	24/9/2025	-	Pancing Ulur	Pembaruan Sertifikat

Ditandatangani
Secara Elektronik

Imas Masriah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

NOTA DINAS
NOMOR 755/PPSC/TU.140/X/2025

Yth. : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Dari : Ketua Tim Kerja Tata Kelola Sarana Prasarana
Lampiran : 1 berkas
Hal : Monitoring dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja Tata Kelola Sarana Prasarana Triwulan III Tahun 2025
Tanggal : 1 Oktober 2025

Sehubungan dengan Pelaksanaan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2025, bersama ini kami laporkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan III Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Tata Kelola Sarana Prasarana sebagai berikut.

1. **Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap**

   - Capaian Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2025.

     Kegiatan pengendalian pengembangan fasilitas di PPS Cilacap didasarkan pada pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada Master Plan PPS Cilacap Tahun 2007-2028.

     Berdasarkan Master Plan tersebut terdapat 52 fasilitas yang perlu dilakukan pengendalian untuk menjaga kondisi tetap optimal. Jumlah fasilitas yang telah dilakukan pengendalian sebanyak 22 unit. Capaian ini meningkat 0,18 persen dibanding dengan capaian triwulan II tahun 2025 karena adanya penyesuaian nomenklatur fasilitas untuk data Barang Milik Negara (BMN) yang sebelumnya 51 unit fasilitas menjadi 52 unit

IKU	Target	Realiasi	Capaian (%)
Persentase pengendalian pengembangan fasilitas PPS Cilacap (%)	33	41,56	125,93

- Perbandingan dengan capaian kinerja pada periode yang sama Tahun 2024

IKU	Target	Realiasi	Capaian (%)
Persentase pengendalian pengembangan fasilitas PPS Cilacap (%)	33	41,18	124,78

Jika dibandingkan dengan periode yang sama di Tahun 2024 terlihat bahwa capaian kinerja tersebut hampir sama atau tidak ada perubahan karena pada tahun anggaran 2025 telah dilakukan efisiensi sehingga beberapa fasilitas tidak dilakukan pengembangan. Selain itu, pengembangan fasilitas pelabuhan akan dilaksanakan melalui kegiatan *Project Eco Fishing Port* dengan sumber dana dari dana Loan/Pinjaman Luar Negeri (PLN).

2. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

- Capaian Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan pelabuhan perikanan yang mengoperasikan pelabuhan perikanan harus: 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan. Penilaian kegiatan pengendalian lingkungan di PPS Cilacap dilakukan melalui kegiatan pengendalian lingkungan yang dilaporkan secara periodik pada aplikasi sistem informasi berbasis WEB yaitu SELARASKAN yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Pada aplikasi SELARASKAN terdapat 2 program yang terdiri dari 18 indikator program mandatory, dan minimal 5 indikator program voluntary dengan jumlah bobot 60%. Sedangkan pada indikator hasil terdapat 8 penilaian dengan jumlah bobot 40%.

Pada triwulan III tahun 2025 realisasi nilai pengendalian lingkungan rata-rata tidak mencapai 100 karena pada indikator hasil selama TW III tidak mencapai maksimal 40%. Hal ini disebabkan oleh penggunaan listrik dan penggunaan air pada bulan Juli dan September lebih banyak dari bulan sebelumnya. Namun secara keseluruhan capaian kinerja di TW III telah melebihi target sebesar

314,49 dengan kategori Sangat Baik karena dokumen dan evidence dapat dilengkapi serta memenuhi kriteria.

IKU	Target	Realisasi Bulan			Skor Kumulatif	Rata-Rata	Capaian (%)
		Juli	Agustus	September			
Nilai Pengendalian Lingkungan di PPS Cilacap (nilai)	30.1	93,26	93,08	97,65	283,99	94,66	314,49

- Perbandingan dengan capaian kinerja pada periode yang sama Tahun 2024

  Nilai pengendalian lingkungan di PPS Cilacap pada Triwulan III Tahun 2024 rata-rata 94,72 atau 314,70% dari target sebesar 30,1. Nilai capaian tersebut lebih besar daripada periode yang sama pada tahun 2025 karena di TW III Tahun 2025 terdapat penggunaan air dan listrik yang lebih besar dari bulan sebelumnya sehingga mempengaruhi nilai.

IKU	Target	Realisasi Bulan			Skor Kumulatif	Rata-Rata	Capaian (%)
		Juli	Agustus	September			
Nilai Pengendalian Lingkungan di PPS Cilacap (nilai)	30,1	92,56	98,38	93,23	284,17	94,72	314,70

Terkait dengan laporan capaian indikator kinerja tersebut, terlampir kami sampaikan data dukung yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian kami laporkan, atas perhatiannya diucapkan terlima kasih.

Kushartanto A. Santosa

Tembusan: -

REALIASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025
PERSENTASE PENGENDALIAN PENGEMBANGAN FASILITAS
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
BERDASARKAN MASTER PLAN TAHUN 2007
PENTAHAPAN TAHUN 2008 s.d 2028

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah		Realisasi	Keterangan
A	**Fasilitas Operasional Pelabuhan Bagian Tengah**				
1	Perbaikan revetment kolam A	1	Unit	Sudah	
2	Pengerukan kolam A	1	Unit	Belum	
3	Pengerukan kolam B dan jalur pelayaran sampai kedalaman -3 dari LWS (-4,5 m dari MWL)	1	Unit	Sudah	
4	Perbaikan revetment kolam B	1	Unit	Belum	
5	Pembangunan pasar ikan higienis	1	Unit	Belum	
6	Peningkatan TPI Lama (peninggian atap dan lantai)	1	Unit	Sudah	
7	Pembangunan Pos Jaga	1	Unit	Sudah	
8	Pembangunan Cold Storage	1	Unit	Sudah	
9	Pembuatan menara reservoir kapasitas 20m3	2	Unit	Sudah	
10	Pembangunan areal parkir pelabuhan	1	Unit	Sudah	
B	**Fasilitas Operasional Pelabuhan Bagian Selatan**				
1	Pematangan lahan areal pelabuhan bagian selatan	1	Unit	Sudah	
2	Pengerukan kolam C dan alur pelayaran sampai -5 LWS (-6,5m dari MWL)	1	Unit	Sudah	
3	Pengadaan kapal keruk kapasitas 100m3	1	Unit	Sudah	
4	Pembangunan revetment dengan konstruksi concrete sheet pile	1	Unit	Belum	
5	Pembangunan dermaga C dengan konstruksi jetty	3	Unit	Sudah	
6	Pembangunan transit shield	1	Unit	Sudah	
7	Pembangunan jaringan air bersih	900	LS	Sudah	
8	Pembangunan MCK	2	Unit	Belum	
9	Pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)	2	Unit	Belum	
10	Pembangunan mushollah	1	Unit	Sudah	
11	Pembangunan kantor pelayanan terpadu	1	Unit	Sudah	
12	Pembangunan shelter nelayan	2	Unit	Belum	
13	Pembangunan kios pesisir/waserda	6	Unit	Sudah	
14	Pembangunan Jaringan Drainase	1	Unit	Sudah	
15	Pembangunan pagar keliling dermaga C	525	M	Sudah	
16	Pembangunan SPDN 2 pompa	1	Unit	Sudah	
17	Pembangunan jalan akses pelabuhan bagian selatan	435	M1	Sudah	
C	**Fasilitas Operasional Pelabuhan Bagian Utara**				
1	Pembangunan revetment konstruksi rubble mound	1	Unit	Sudah	
2	Pengurugan dan pematangan lahan areal pelabuhan utara (Dermaga D)	1	Unit	Belum	

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah		Realisasi	Keterangan
3	Pembangunan jalan akses pelabuhan bagian utara (Dermaga D) dengan konstruksi aspal	3.267	M1	Belum	
4	Pembangunan jalan akses pelabuhan bagian utara (Dermaga D) dengan konstruksi beton	1.085	M1	Belum	
5	Pembangunan cold storage (20m X 12m)	1	Unit	Sudah	
6	Pembangunan klinik dan laboratorium (15m X 12m)	2	Unit	Belum	
7	Pembangunan Pos jaga	1	Unit	Belum	
8	Pembangunan break water	1	Unit	Belum	
9	Pembangunan dermaga D dengan konstruksi concrete sheet pile	1	Unit	Belum	
10	Pengurugan dan pematangan lahan areal pelabuhan bagian utara (Dermaga D)	1	Unit	Belum	
11	Pembangunan TPI (Tempat Pelelangan Ikan)	2	Unit	Belum	
12	Pembuatan menara reservoir kapasitas 20m3	2	Unit	Belum	
13	Pembangunan MCK	3	Unit	Belum	
14	Pembangunan IPAL (Instalasi pengolahan Air Limbah)	2	Unit	Belum	
15	Pembangunan jaringan air bersih	3.267	M1	Belum	
16	Pembangunan mushollah	1	Unit	Belum	
17	Pengerukan kolam pelabuhan utara dan alur pelayaran sampai -5 LWS (-6,5 dari MWL)	1	Unit	Belum	
18	Pembangunan kantor pelayanan terpadu	1	Unit	Belum	
19	Pembangunan shelter nelayan	1	Unit	Belum	
20	Pembangunan kios pesisir/waserda	5	Unit	Belum	
21	Pembangunan areal parkir pelabuhan dan jaringan drainase	8.476	M2	Belum	
22	Pembangunan pagar keliling pelabuhan bagian utara (Dermaga D)	1	Unit	Belum	
23	Pembangunan rumah dinas tipe 72	2	Unit	Belum	
24	Pembangunan SPBU 2 pompa	1	Unit	Belum	
25	Pembangunan sarana olah raga	1	Unit	Belum	

Keterangan:

- Rencana pengendalian dan pengembangan fasilitas sesuai master plan sebanyak 52 fasilitas
- Realisasi pengendalian dan pengembangan fasilitas sebanyak 22 fasilitas
- Nilai persentase fasilitas yang telah dilakukan pengendalian dan pengembangan sebesar:

$$= \frac{Realisasi}{Jumlah\ Fasilitas\ Sesuai\ Master\ Plan} \times 100$$

$$= \frac{22}{52} \times 100 \qquad = 42{,}31\%$$

Cilacap, 1 Oktober 2025
Ketua Tim Kerja
Tata Kelola Sarana Prasarana

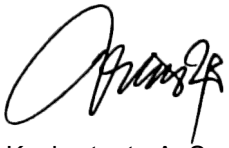

Kushartanto A. Santosa

DATA DUKUNG LAPORAN KINERJA
TIM KERJA TATA KELOLA SARANA DAN PRASARANA
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
TRIWULAN III TAHUN 2025

IKU: Pengendalian Pengembangan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan di PPS Cilacap

A. Fasilitas Operasional Pelabuhan Bagian Tengah

1. Perbaikan Revetment Kolam A

2. Peningkatan TPI Lama

3. Pembangunan Pos Jaga

4. Pembangunan Cold Storage

5. Pembuatan menara reservoir kapasitas 20m3

6. Pembangunan Area Parkir Pelabuhan

B. Fasilitas Operasional Pelabuhan Bagian Selatan

1. Pematangan lahan areal pelabuhan bagian Selatan

2. Pengadaan kapal keruk kapasitas 100m3

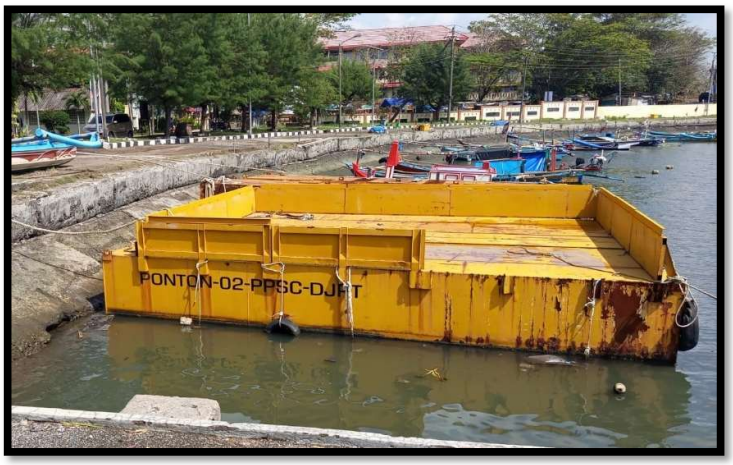

3. Pembangunan Revetment dengan Konstruksi Concrete Sheet Pile

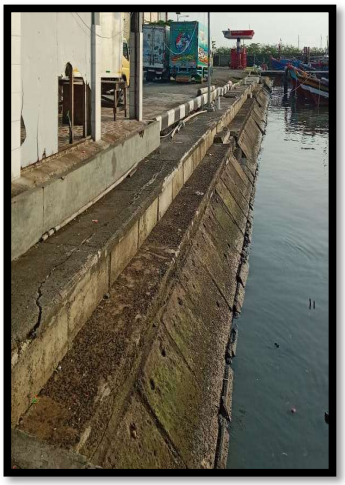

4. Pembangunan dermaga C dengan konstruksi jetty

5. Pembangunan transit shield

6. Pembangunan jaringan air bersih

7. Pembangunan mushollah

8. Pembangunan kantor pelayanan terpadu

9. Pembangunan kios pesisir/waserda

10. Jaringan Drainase

11. Pembangunan pagar keliling dermaga C

12. Pembangunan SPDN 2 pompa

13. Pembangunan jalan akses pelabuhan bagian selatan

C. Fasilitas Operasional Pelabuhan Bagian Utara

1. Pembangunan Revetment Konstruksi Rubble Mount

2. Pembangunan cold storage (20m X 12m)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

Nomor : B.3258/DJPT.4/PI.310/X/2025 14 Oktober 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Capaian dan Hasil Evaluasi Implementasi SELARASKAN Triwulan III TA. 2025 di Pelabuhan Perikanan UPT Pusat

Yth. (Daftar Terlampir)
di Tempat

Sehubungan dengan implementasi Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN) Versi 2, bersama ini kami sampaikan capaian dan hasil evaluasi SELARASKAN triwulan III TA. 2025 di Pelabuhan Perikanan sebagai berikut :

1. Capaian implementasi SELARASKAN bulan Juli s.d September 2025 yang dievaluasi pada bulan Oktober 2025 dengan skor setelah koreksi *evidence* oleh Tim Evaluasi SELARASKAN sebagai berikut:

No.	Pelabuhan Perikanan	Juli	Agustus	September	Skor Kumulatif	Rata-rata	Kategori
1.	PPN Sibolga	97,03	96,82	95,26	289,11	96,37	SANGAT BAIK
2.	PPS Cilacap	93,26	93,08	97,65	283,99	94,66	SANGAT BAIK
3.	PPN Prigi	96,88	93,44	92,80	283,12	94,37	SANGAT BAIK
4.	PPN Kejawanan	94,60	93,25	91,03	278,88	92,96	SANGAT BAIK
5.	PPS Bungus	92,08	90,01	92,38	274,48	91,49	SANGAT BAIK
6.	PPN Pemangkat	90,86	91,79	91,36	274,01	91,34	SANGAT BAIK
7.	PPN Tanjung Pandan	89,90	92,59	91,27	273,76	91,25	SANGAT BAIK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Pelabuhan Perikanan	Juli	Agustus	September	Skor Kumulatif	Rata-rata	Kategori
8.	PPP Teluk Batang	92,46	91,17	89,83	273,46	91,15	SANGAT BAIK
9.	PPN Ternate	88,18	94,08	89,93	272,20	90,73	SANGAT BAIK
10.	PPS Bitung	95,55	91,64	83,47	270,66	90,22	SANGAT BAIK
11.	PPN Brondong	90,84	89,89	88,35	269,08	89,69	SANGAT BAIK
12.	PPN Palabuhanratu	83,04	92,07	90,20	265,31	88,44	SANGAT BAIK
13.	PPN Pengambengan	91,84	85,99	87,19	265,02	88,34	SANGAT BAIK
14.	PPN Tual	86,62	85,08	89,13	260,83	86,94	SANGAT BAIK
15.	PPS Belawan	87,57	86,40	84,43	258,41	86,14	SANGAT BAIK
16.	PPN Ambon	82,06	81,62	91,84	255,51	85,17	SANGAT BAIK
17.	PPS Nizam Zachman Jakarta	84,18	81,78	86,52	252,48	84,16	SANGAT BAIK
18.	PPS Kendari	78,05	84,33	88,06	250,44	83,48	SANGAT BAIK
19.	PPN Karangantu	90,66	71,73	85,02	247,41	82,47	SANGAT BAIK
20.	PPN Sungailiat	80,90	81,89	84,25	247,04	82,35	SANGAT BAIK
21.	PPN Pekalongan	82,89	83,02	80,55	246,46	82,15	SANGAT BAIK
22.	PPN Kwandang	67,59	64,34	81,57	213,50	71,167	BAIK

2. Hasil evaluasi implementasi SELARASKAN bulan Juli s.d September 2025 secara detail dapat diakses melalui tautan berikut https://bit.ly/SELARASKAN_TWIII_2025; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan dengan capaian nilai SELARASKAN dibawah SANGAT BAIK agar lebih meningkatkan kinerjanya di bidang kebersihan dan lingkungan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Kepelabuhanan Perikanan,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Ady Candra

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 1.
Nomor : B.3258/DJPT.4/PI.310/X/2025
Tanggal : 14 Oktober 2025

DAFTAR PELABUHAN PERIKANAN

1. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta
2. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
3. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
4. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung
5. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
6. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
7. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
8. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
9. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
10. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu
11. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
12. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate
13. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
14. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
15. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan
16. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan
17. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat
18. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
19. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat
20. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
21. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang
22. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Kepelabuhanan Perikanan,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Ady Candra

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

NOTA DINAS
NOMOR 863/PPSC/TU.140/X/2025

Yth. : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Dari : Kepala Subbagian Umum
Lampiran : 1 9satu) berkas
Hal : Capaian Kinerja dan Data Dukung IKU Triwulan III Tahun 2025
Tanggal : 15 Oktober 2025

Sehubungan dengan Pelaksanaan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2025, terlampir kami laporkan capaian kinerja Dukungan Manajerial sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)
   - Merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan.
   - .

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	85	100	117,65

IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebesar 117,6%.

Perbandingan capaian Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2025 adalah :

IKU	REALISASI TW III TA 2024	REALISASI TW III TA 2025	NAIK/TURUN (%)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	100	100	-

Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun sebelumnya, capaian indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap ini tetap pada capaian maksimal yakni 100% karena belum adanya pengawasan yyang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP.

Terlampir disampaikan screenshoot dari Aplikasi Sidak KKP yang menunjukan seluruh rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal telah titindaklanjuti dengan status Tuntas.

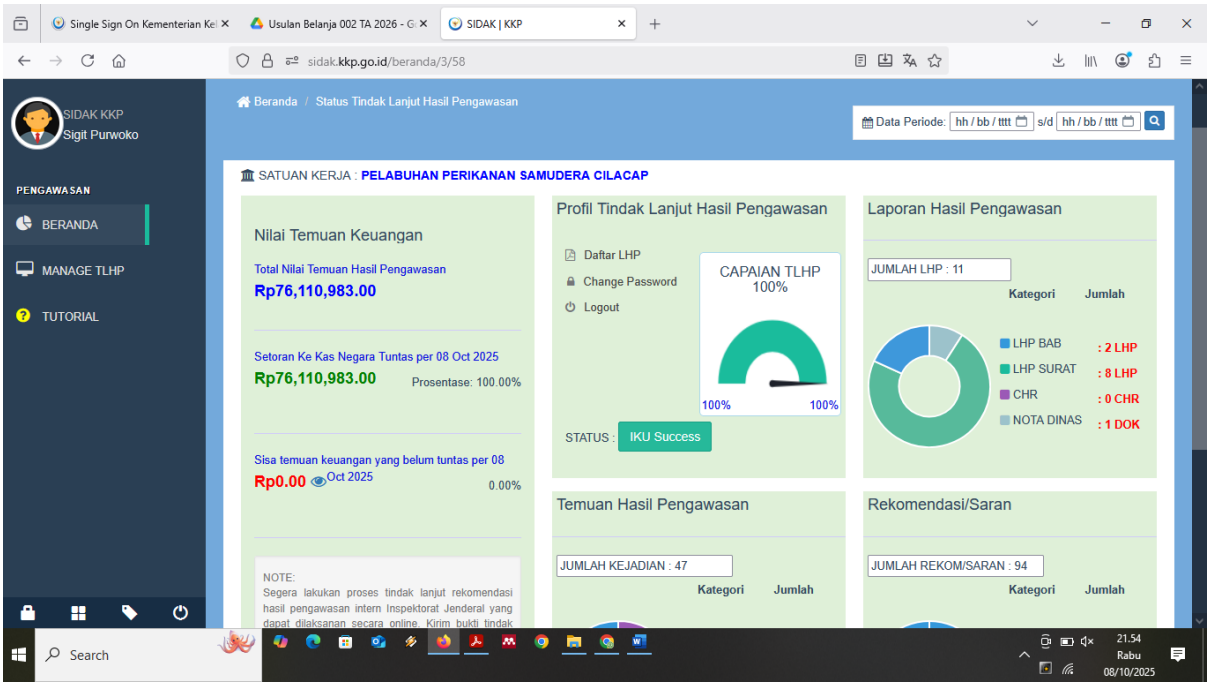

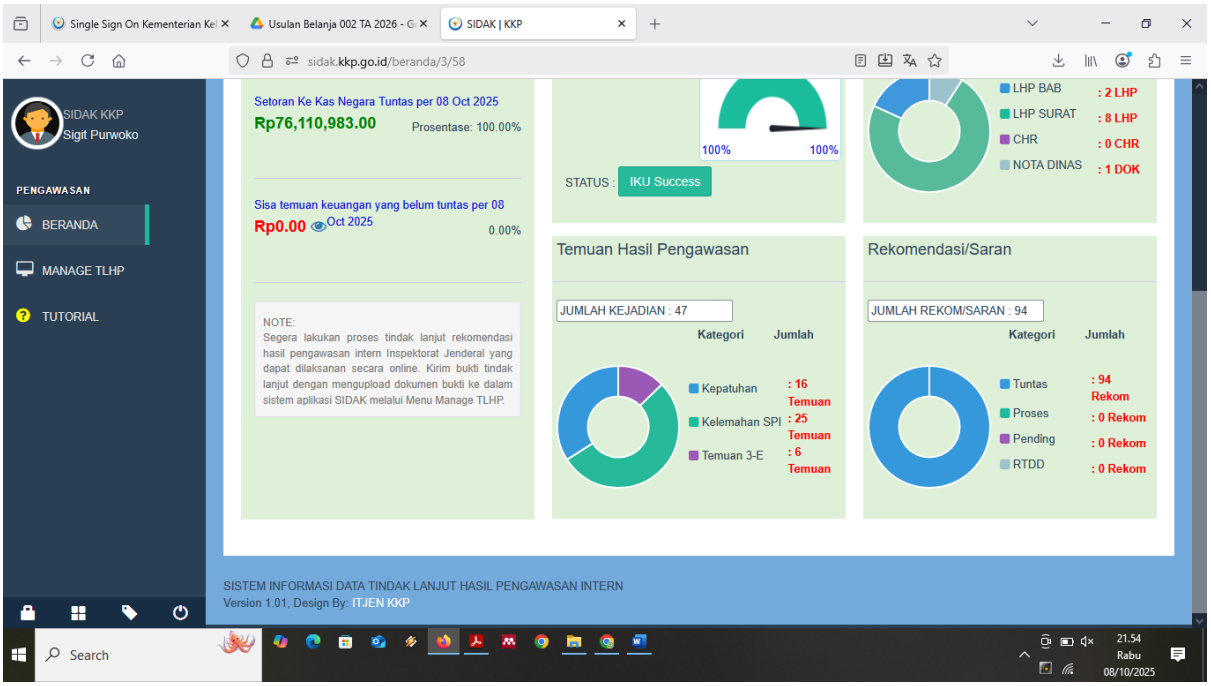

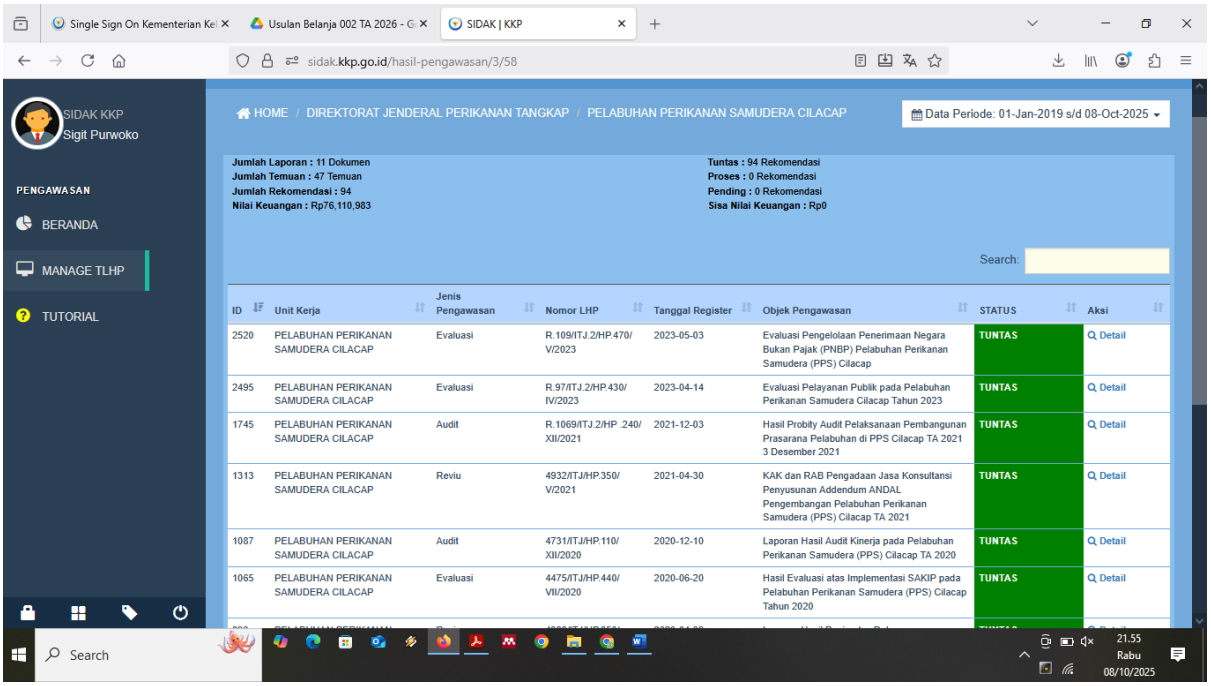

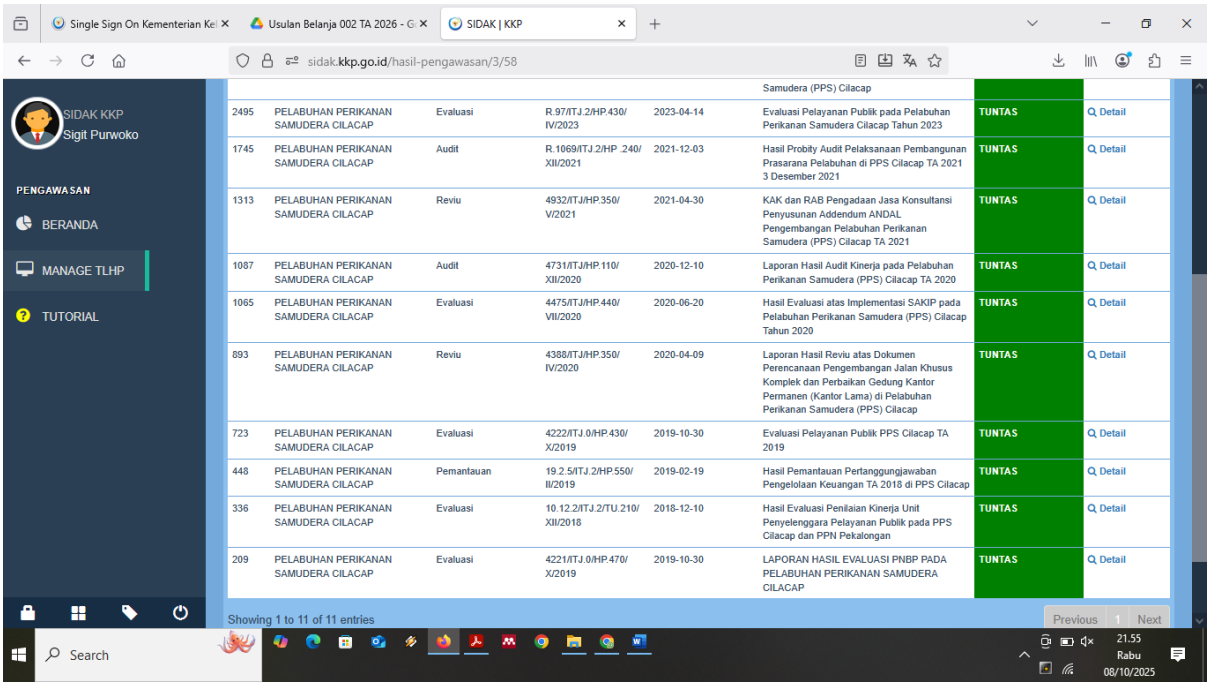

2. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)

- Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di (nama satker). Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi

Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1)

Beberapa kali PPS Cilacap melakukan revisi dan penyesuaian dalam perencanaan angggaran dan telah di tindaklanjuti dengan perubahan RUP dan semuanya sudah diinput dengan nilai 100%. Pagu Pengadaan PPS Cilacap sebesar Rp. 4,130,340,800,- dan telah terumumkan sebesar Rp. 4,130,340,800,- sehinggga tidak ada selisih dan prosentase RUP terumumkan sebesar 100%.

-

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	76	100	131,58

Perbandingan capaian Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2025 adalah belum tersedia dikarenakan IKU ini merupakan IKU Baru pada tahun 2025.

3. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)
   - Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).
   - Pelaksanaan SKM di PPS Cilacap dilakukan oleh Petugas Pelayanan Publik PPS Cilacap.
   - Survei dilakukan secara periodik yaitu setiap triwulan dengan pendekatan kualitatif yang diukur menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Dengan menggunakan

skala *Likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Pengumpulan data pada Survei Kepuasan Masyarakat ini dilakukan melalui pengisian kuesioner (melalui aplikasi SKM) serta wawancara tatap muka kepada pengguna layanan.

- Variabel pengukuran didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang terdiri dari 9 (Sembilan) unsur sebagai berikut:
  1. Persyaratan
  2. Prosedsur
  3. Waktu Pelayanan
  4. Biaya / Tarif
  5. Produk Layanan
  6. Kompetensi Pelaksana
  7. Perilaku Pelaksana
  8. Sarana dan Prasarana
  9. Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan

Hasil SKM pada Triwulan III adalah :

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,5	92,91	104,98

Hasil SKM pada Triwulan III Tahun 2025 ini menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Msyarakat (IKM) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebesar 92,91 (kriteria A) dengan kinerja unit pelayanan SANGAT BAIK.

Indeks tersebut diperoleh dari pengolahan data sebanyak 118 responden dan 12 jenis pelayanan.

Perbandingan capaian Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2025 adalah :

IKU	REALISASI TW III TA 2024	REALISASI TW III TA 2025	NAIK/TURUN (%)
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	90,68	92,91	2,46%

Dalam pelaksanaan SKM pada Triwulan III tahun 2025 ini dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pelayanan publik di PPS Cilacap secara umum menunjukkan kualitas kinerja pelayanan SANGAT BAIK;
b. Seluruh unsur pelayanan mendapatkan nilai SANGAT BAIK. Namun demikian, dua unsur dengan nilai terendah tetap dimasukkan dalam prioritas perbaikan;
c. Tiga unsur pelayanan dengan nilai tertinggi adalah kemudahan fitur/kemampuan petugas, persyaratan pelayanan, dan kemudahan prosedur.

Terkait dengan capain IKU di atas, terlampir kami sampaikan data dukungnya. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih dan mohon arahan lebih lanjut.

Sigit Purwoko

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 381/SJ.7/PL.410/X/2025

Yth. :
1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa
Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 3 Tahun Anggaran 2025
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 8 Oktober 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini memiliki 149 Satuan kerja (satker) yang tersebar di 9 unit kerja eselon I. Seluruh satuan kerja tersebut telah melakukan identifikasi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung pembentuk nilai pagu pengadaan yang selanjutnya dilakukan proses revisi RUP pada aplikasi SIRUP berdasarkan dokumen kertas kerja dimaksud. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP melebihi atau kurang dari 100%. Data yang terbentuk pada dokumen kertas kerja untuk nilai Pagu Terumumkan merupakan nilai yang sama dengan nilai yang tercantum dalam rekap RUP Terumumkan pada aplikasi SIRUP.

Berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada aplikasi SIRUP Triwulan 3 Tahun Anggaran 2025, formula dan ketentuan perhitungannya adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Formulasi pengukuran/penilaian :

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada aplikasi SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \; x \; 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%. Maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Saat ini telah dilakukan kompilasi dan rekapitulasi data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan pada setiap Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 3 Tahun Anggaran 2025. Sebagai informasi, sampai dengan waktu *cut off* data untuk perhitungan persentase RUP Terumumkan pada tanggal 8 Oktober 2025 pukul 11.00 WIB, secara keseluruhan satuan kerja telah mencapai persentase 100,00%.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja perencanaan PBJ yang telah dilaksanakan, kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 1
Nomor : 381/SJ.7/PL.410/X/2025
Tanggal : 8 Oktober 2025

REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN TRIWULAN 3 TAHUN ANGGARAN 2025 LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode E1	Nama Unit Eselon 1	Σ SATKER	Persentase RUP Terumumkan				% Target IKU TW 3	% Capaian Target IKU TW 3	Keterangan
			Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Keterangan			
02	Inspektorat Jenderal	1	5,976,879,000	5,976,879,000	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	1,132,182,915,103	1,132,182,915,103	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	37	43,754,804,122	43,754,804,122	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	42	875,549,848,134	875,549,848,134	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	51,933,565,281	51,933,565,281	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	5,976,879,000	5,976,879,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	336,649,816,000	336,649,816,000	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	9	1,081,158,327,186	1,081,158,327,186	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
01	Sekretariat Jenderal	3	342,443,130,996	342,443,130,996	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
	TOTAL	**149**	**3,875,626,164,822**	**3,875,626,164,822**				**100.00%**	

Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 2
Nomor : 381/SJ.7/PL.410/X/2025
Tanggal : 8 Oktober 2025

REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN TRIWULAN 3 TAHUN ANGGARAN 2025 PER SATUAN KERJA

Inspektorat Jenderal

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN
		TW-3			TW3				
		∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP		
B	***Inspektorat Jenderal***	***5,976,879,000***	***-***	***5,976,879,000***	***5,976,879,000***	***-***	***5,976,879,000***	***-***	***100.00%***
1	INSPEKTORAT JENDERAL	5,976,879,000	-	**5,976,879,000**	5,976,879,000		**5,976,879,000**	-	**100.00%**

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN
		TW-3			TW3				
		∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP		
D	***Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya***	***103,641,596,000***	***28,942,973,000***	***132,584,569,000***	***103,641,596,000***	***28,942,973,000***	***132,584,569,000***	***-***	***100.00%***
1	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	8,346,508,000		**8,346,508,000**	8,346,508,000	-	**8,346,508,000**	-	**100.00%**
2	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	11,611,482,000		**11,611,482,000**	11,611,482,000	-	**11,611,482,000**	-	**100.00%**
3	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	8,049,166,000		**8,049,166,000**	8,049,166,000	-	**8,049,166,000**	-	**100.00%**
4	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	29,905,446,000	11,145,622,000	**41,051,068,000**	29,905,446,000	11,145,622,000	**41,051,068,000**	-	**100.00%**
5	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	3,980,003,000		**3,980,003,000**	3,980,003,000	-	**3,980,003,000**	-	**100.00%**
6	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	12,951,236,000	3,327,515,000	**16,278,751,000**	12,951,236,000	3,327,515,000	**16,278,751,000**	-	**100.00%**
7	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	7,192,845,000	653,692,000	**7,846,537,000**	7,192,845,000	653,692,000	**7,846,537,000**	-	**100.00%**
8	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	4,931,932,000		**4,931,932,000**	4,931,932,000	-	**4,931,932,000**	-	**100.00%**
9	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	2,672,146,000	3,163,875,000	**5,836,021,000**	2,672,146,000	3,163,875,000	**5,836,021,000**	-	**100.00%**
10	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	4,193,405,000	4,999,652,000	**9,193,057,000**	4,193,405,000	4,999,652,000	**9,193,057,000**	-	**100.00%**
11	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	1,484,027,000	1,597,437,000	**3,081,464,000**	1,484,027,000	1,597,437,000	**3,081,464,000**	-	**100.00%**
12	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	6,583,509,000	160,000,000	**6,743,509,000**	6,583,509,000	160,000,000	**6,743,509,000**	-	**100.00%**
13	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	1,739,891,000	3,895,180,000	**5,635,071,000**	1,739,891,000	3,895,180,000	**5,635,071,000**	-	**100.00%**
14	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	1,253,261,000		**1,253,261,000**	1,253,261,000	-	**1,253,261,000**	-	**100.00%**
15	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	5,010,473,000	2,314,090,000	**7,324,563,000**	5,010,473,000	2,314,090,000	**7,324,563,000**	-	**100.00%**
16	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA	986,349,204,103	4,671,318,000	**991,020,522,103**	986,349,204,103	4,671,318,000	**991,020,522,103**	-	**100.00%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN
		TW-3			TW3				
		∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP		
H	***Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan***	***132,793,483,168***	***23,016,799,000***	***155,810,282,168***	***132,793,483,168***	***23,016,799,000***	***155,810,282,168***	**-**	***100.00%***
1	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	815,181,000	1,030,758,000	**1,845,939,000**	815,181,000	1,030,758,000	**1,845,939,000**	-	**100.00%**
2	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN BBRBLPP	2,534,284,000		**2,534,284,000**	2,534,284,000	-	**2,534,284,000**	-	**100.00%**
3	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KP	5,100,517,000		**5,100,517,000**	5,100,517,000		**5,100,517,000**	-	**100.00%**
4	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN BBRSEKP	96,216,000		**96,216,000**	96,216,000		**96,216,000**	-	**100.00%**
5	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	385,776,000	1,222,141,000	**1,607,917,000**	385,776,000	1,222,141,000	**1,607,917,000**	-	**100.00%**
6	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	1,705,088,000	4,944,580,000	**6,649,668,000**	1,705,088,000	4,944,580,000	**6,649,668,000**	-	**100.00%**
7	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	1,861,945,000		**1,861,945,000**	1,861,945,000		**1,861,945,000**	-	**100.00%**
8	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	1,947,816,000		**1,947,816,000**	1,947,816,000		**1,947,816,000**	-	**100.00%**
9	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	17,074,273,000		**17,074,273,000**	17,074,273,000		**17,074,273,000**	-	**100.00%**
10	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	1,453,775,000		**1,453,775,000**	1,453,775,000		**1,453,775,000**	-	**100.00%**
11	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS BRBIH	2,378,245,000		**2,378,245,000**	2,378,245,000		**2,378,245,000**	-	**100.00%**
12	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN BRPI	3,550,829,000		**3,550,829,000**	3,550,829,000		**3,550,829,000**	-	**100.00%**
13	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN BRPSDI	1,868,698,000		**1,868,698,000**	1,868,698,000		**1,868,698,000**	-	**100.00%**
14	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	4,372,192,000	197,970,000	**4,570,162,000**	4,372,192,000	197,970,000	**4,570,162,000**	-	**100.00%**
15	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	4,760,962,000		**4,760,962,000**	4,760,962,000		**4,760,962,000**	-	**100.00%**
16	BALAI RISET PERIKANAN LAUT BRPL	902,114,000		**902,114,000**	902,114,000		**902,114,000**	-	**100.00%**
17	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	5,685,011,000	103,084,000	**5,788,095,000**	5,685,011,000	103,084,000	**5,788,095,000**	-	**100.00%**
18	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN LPTK	190,204,000	1,265,939,000	**1,456,143,000**	190,204,000	1,265,939,000	**1,456,143,000**	-	**100.00%**
19	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT LRBRL	435,469,000	56,885,000	**492,354,000**	435,469,000	56,885,000	**492,354,000**	-	**100.00%**
20	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	439,115,000	480,771,000	**919,886,000**	439,115,000	480,771,000	**919,886,000**	-	**100.00%**
21	LOKA RISET PERIKANAN TUNA LRPT	1,930,550,000		**1,930,550,000**	1,930,550,000	-	**1,930,550,000**	-	**100.00%**
22	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR LRSDKP	1,035,654,000	1,053,546,000	**2,089,200,000**	1,035,654,000	1,053,546,000	**2,089,200,000**	-	**100.00%**
23	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN	14,749,211,000		**14,749,211,000**	14,749,211,000		**14,749,211,000**	-	**100.00%**
24	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	1,797,869,000		**1,797,869,000**	1,797,869,000		**1,797,869,000**	-	**100.00%**
25	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	572,296,000	2,363,918,000	**2,936,214,000**	572,296,000	2,363,918,000	**2,936,214,000**	-	**100.00%**
26	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI	848,422,000	837,013,000	**1,685,435,000**	848,422,000	837,013,000	**1,685,435,000**	-	**100.00%**
27	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	658,207,000	1,078,219,000	**1,736,426,000**	658,207,000	1,078,219,000	**1,736,426,000**	-	**100.00%**
28	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	28,407,071,644		**28,407,071,644**	28,407,071,644	-	**28,407,071,644**	-	**100.00%**
29	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	1,250,072,524	1,221,557,000	**2,471,629,524**	1,250,072,524	1,221,557,000	**2,471,629,524**	-	**100.00%**
30	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN	2,012,876,000		**2,012,876,000**	2,012,876,000		**2,012,876,000**	-	**100.00%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN
		TW-3			TW3				
		∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP		
H	***Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan***	***132,793,483,168***	***23,016,799,000***	***155,810,282,168***	***132,793,483,168***	***23,016,799,000***	***155,810,282,168***	***-***	***100.00%***
31	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	7,515,109,000	-	**7,515,109,000**	7,515,109,000		**7,515,109,000**	-	**100.00%**
32	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	2,195,333,000	5,209,960,000	**7,405,293,000**	2,195,333,000	5,209,960,000	**7,405,293,000**	-	**100.00%**
33	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7,284,200,000		**7,284,200,000**	7,284,200,000		**7,284,200,000**	-	**100.00%**
34	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	1,296,505,000		**1,296,505,000**	1,296,505,000		**1,296,505,000**	-	**100.00%**
35	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	439,179,000	1,950,458,000	**2,389,637,000**	439,179,000	1,950,458,000	**2,389,637,000**	-	**100.00%**
36	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	1,814,020,000		**1,814,020,000**	1,814,020,000		**1,814,020,000**	-	**100.00%**
37	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	785,173,000		**785,173,000**	785,173,000		**785,173,000**	-	**100.00%**
38	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	644,025,000		**644,025,000**	644,025,000		**644,025,000**	-	**100.00%**
39	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	1,109,942,000		**1,109,942,000**	1,109,942,000		**1,109,942,000**	-	**100.00%**
40	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	754,234,000	1,209,683,000	**1,963,917,000**	754,234,000	1,209,683,000	**1,963,917,000**	-	**100.00%**
41	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KP	716,506,016,966		**716,506,016,966**	716,506,016,966		**716,506,016,966**	-	**100.00%**
42	PUSAT STANDARISASI DAN SERTIFIKASI SDM KP	159,690,000		**159,690,000**	159,690,000	-	**159,690,000**	-	**100.00%**

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN
		TW-3			TW3				
		∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP		
I	***Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan***	***23,133,112,424***	***373,548,000***	***23,506,660,424***	***23,133,112,424***	***373,548,000***	***23,506,660,424***	***-***	***100.00%***
1	BALAI BESAR KIPM dan KHP MAKASSAR	2,892,982,000		**2,892,982,000**	2,892,982,000		**2,892,982,000**	-	**100.00%**
2	BALAI KIPM dan KHP BALIKPAPAN	454,583,300		**454,583,300**	454,583,300		**454,583,300**	-	**100.00%**
3	BALAI KIPM dan KHP LAMPUNG	945,341,324		**945,341,324**	945,341,324		**945,341,324**	-	**100.00%**
4	BALAI KIPM dan KHP AMBON	254,838,000	373,548,000	**628,386,000**	254,838,000	373,548,000	**628,386,000**	-	**100.00%**
5	BALAI KIPM dan KHP BANJARMASIN	565,163,000		**565,163,000**	565,163,000		**565,163,000**	-	**100.00%**
6	BALAI KIPM dan KHP DENPASAR	1,784,010,000		**1,784,010,000**	1,784,010,000		**1,784,010,000**	-	**100.00%**
7	BALAI KIPM dan KHP JAKARTA II	1,857,219,000		**1,857,219,000**	1,857,219,000		**1,857,219,000**	-	**100.00%**
8	BALAI KIPM dan KHP JAYAPURA	399,150,000		**399,150,000**	399,150,000		**399,150,000**	-	**100.00%**
9	BALAI KIPM dan KHP MANADO	1,711,693,000		**1,711,693,000**	1,711,693,000		**1,711,693,000**	-	**100.00%**
10	BALAI KIPM dan KHP MATARAM	1,082,514,000		**1,082,514,000**	1,082,514,000		**1,082,514,000**	-	**100.00%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN
		TW-3			TW3				
		∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP		
I	***Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan***	***23,133,112,424***	***373,548,000***	***23,506,660,424***	***23,133,112,424***	***373,548,000***	***23,506,660,424***	***-***	***100.00%***
11	BALAI KIPM dan KHP MEDAN I	2,227,785,000		**2,227,785,000**	2,227,785,000		**2,227,785,000**	-	**100.00%**
12	BALAI KIPM dan KHP SEMARANG	1,486,140,000		**1,486,140,000**	1,486,140,000		**1,486,140,000**	-	**100.00%**
13	BALAI KIPM dan KHP SURABAYA I	4,601,969,000		**4,601,969,000**	4,601,969,000		**4,601,969,000**	-	**100.00%**
14	BALAI KIPM dan KHP TARAKAN	154,755,800		**154,755,800**	154,755,800		**154,755,800**	-	**100.00%**
15	BALAI UJI STANDAR KIPM dan KHP	2,714,969,000		**2,714,969,000**	2,714,969,000		**2,714,969,000**	-	**100.00%**
16	SEKRETARIAT BPPMHKP	6,369,048,000		**6,369,048,000**	6,369,048,000		**6,369,048,000**	-	**100.00%**
17	STASIUN KIPM dan KHP KENDARI	351,241,000		**351,241,000**	351,241,000		**351,241,000**	-	**100.00%**
18	STASIUN KIPM dan KHP MAMUJU	35,000,000		**35,000,000**	35,000,000		**35,000,000**	-	**100.00%**
19	STASIUN KIPM dan KHP SORONG	338,737,000		**338,737,000**	338,737,000		**338,737,000**	-	**100.00%**
20	STASIUN KIPM dan KHP ACEH	1,035,194,000		**1,035,194,000**	1,035,194,000		**1,035,194,000**	-	**100.00%**
21	STASIUN KIPM dan KHP BATAM	1,351,261,698		**1,351,261,698**	1,351,261,698		**1,351,261,698**	-	**100.00%**
22	STASIUN KIPM dan KHP BENGKULU	436,771,000		**436,771,000**	436,771,000		**436,771,000**	-	**100.00%**
23	STASIUN KIPM dan KHP CIREBON	2,045,141,000		**2,045,141,000**	2,045,141,000		**2,045,141,000**	-	**100.00%**
24	STASIUN KIPM dan KHP GORONTALO	226,766,000		**226,766,000**	226,766,000		**226,766,000**	-	**100.00%**
25	STASIUN KIPM dan KHP JAMBI	190,000,000		**190,000,000**	190,000,000		**190,000,000**	-	**100.00%**
26	STASIUN KIPM dan KHP KUPANG	-	58,810,000	**58,810,000**	-	58,810,000	**58,810,000**	-	**100.00%**
27	STASIUN KIPM dan KHP MERAK	658,352,000		**658,352,000**	658,352,000		**658,352,000**	-	**100.00%**
28	STASIUN KIPM dan KHP MERAUKE	768,055,000		**768,055,000**	768,055,000		**768,055,000**	-	**100.00%**
29	STASIUN KIPM dan KHP PADANG	744,295,000		**744,295,000**	744,295,000		**744,295,000**	-	**100.00%**
30	STASIUN KIPM dan KHP PALANGKARAYA	664,903,000		**664,903,000**	664,903,000		**664,903,000**	-	**100.00%**
31	STASIUN KIPM dan KHP PALEMBANG	687,840,000		**687,840,000**	687,840,000		**687,840,000**	-	**100.00%**
32	STASIUN KIPM dan KHP PALU	474,690,000		**474,690,000**	474,690,000		**474,690,000**	-	**100.00%**
33	STASIUN KIPM dan KHP PANGKAL PINANG	1,006,732,000		**1,006,732,000**	1,006,732,000		**1,006,732,000**	-	**100.00%**
34	STASIUN KIPM dan KHP PEKANBARU	392,002,000		**392,002,000**	392,002,000		**392,002,000**	-	**100.00%**
35	STASIUN KIPM dan KHP PONTIANAK	1,490,057,000		**1,490,057,000**	1,490,057,000		**1,490,057,000**	-	**100.00%**
36	STASIUN KIPM dan KHP TERNATE	112,965,000		**112,965,000**	112,965,000		**112,965,000**	-	**100.00%**
37	STASIUN KIPM dan KHP YOGYAKARTA	810,283,000		**810,283,000**	810,283,000		**810,283,000**	-	**100.00%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN
		TW-3			TW3				
		∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP		
F	***Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan***	***12,743,424,000***	***-***	***12,743,424,000***	***12,743,424,000***	***-***	***12,743,424,000***	***-***	***100.00%***
1	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	12,743,424,000		**12,743,424,000**	12,743,424,000		**12,743,424,000**	-	**100.00%**
2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	39,190,141,281		**39,190,141,281**	39,190,141,281		**39,190,141,281**	-	**100.00%**

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN
		TW-3			TW3				
		∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP		
C	***Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap***	***454,445,909,663***	***2,825,805,000***	***457,271,714,663***	***454,445,909,663***	***2,825,805,000***	***457,271,714,663***	***-***	***100.00%***
1	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN SEMARANG	4,359,556,000	590,438,000	**4,949,994,000**	4,359,556,000	590,438,000	**4,949,994,000**	-	**100.00%**
2	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	1,472,698,000	2,235,367,000	**3,708,065,000**	1,472,698,000	2,235,367,000	**3,708,065,000**	-	**100.00%**
3	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	4,447,072,000		**4,447,072,000**	4,447,072,000	-	**4,447,072,000**	-	**100.00%**
4	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	3,539,681,000		**3,539,681,000**	3,539,681,000	-	**3,539,681,000**	-	**100.00%**
5	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	437,742,234,663		**437,742,234,663**	437,742,234,663	-	**437,742,234,663**	-	**100.00%**
6	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	2,884,668,000		**2,884,668,000**	2,884,668,000	-	**2,884,668,000**	-	**100.00%**
7	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	2,019,499,000		**2,019,499,000**	2,019,499,000	-	**2,019,499,000**	-	**100.00%**
8	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	3,915,697,000		**3,915,697,000**	3,915,697,000	-	**3,915,697,000**	-	**100.00%**
9	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	2,200,792,000		**2,200,792,000**	2,200,792,000	-	**2,200,792,000**	-	**100.00%**
10	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	1,158,531,231,000		**1,158,531,231,000**	1,158,531,231,000	-	**1,158,531,231,000**	-	**100.00%**
11	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	2,103,286,000		**2,103,286,000**	2,103,286,000	-	**2,103,286,000**	-	**100.00%**
12	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	850,730,000	2,026,728,000	**2,877,458,000**	850,730,000	2,026,728,000	**2,877,458,000**	-	**100.00%**
13	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	1,208,763,000	6,400,000	**1,215,163,000**	1,208,763,000	6,400,000	**1,215,163,000**	-	**100.00%**
14	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	157,451,000	1,718,681,000	**1,876,132,000**	157,451,000	1,718,681,000	**1,876,132,000**	-	**100.00%**
15	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	2,872,026,000		**2,872,026,000**	2,872,026,000	-	**2,872,026,000**	-	**100.00%**
16	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	1,941,647,000	37,642,000	**1,979,289,000**	1,941,647,000	37,642,000	**1,979,289,000**	-	**100.00%**
17	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	2,089,461,000		**2,089,461,000**	2,089,461,000	-	**2,089,461,000**	-	**100.00%**
18	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	3,869,917,000	2,672,013,000	**6,541,930,000**	3,869,917,000	2,672,013,000	**6,541,930,000**	-	**100.00%**
19	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	59,278,619,000	31,000,000	**59,309,619,000**	59,278,619,000	31,000,000	**59,309,619,000**	-	**100.00%**
20	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	2,358,509,000		**2,358,509,000**	2,358,509,000	-	**2,358,509,000**	-	**100.00%**
21	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	4,130,340,800		**4,130,340,800**	4,130,340,800	-	**4,130,340,800**	-	**100.00%**
22	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	35,948,521,000		**35,948,521,000**	35,948,521,000	-	**35,948,521,000**	-	**100.00%**
23	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	15,847,989,000		**15,847,989,000**	15,847,989,000	-	**15,847,989,000**	-	**100.00%**
24	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	1,250,409,662,000	25,516,762,000	**1,275,926,424,000**	1,250,409,662,000	25,516,762,000	**1,275,926,424,000**	-	**100.00%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN
		TW-3			TW3				
		∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP		
E	***Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan***	***336,647,410,000***	***2,406,000***	***336,649,816,000***	***336,647,410,000***	***2,406,000***	***336,649,816,000***	***-***	***100.00%***
1	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	17,690,544,000		**17,690,544,000**	17,690,544,000	-	**17,690,544,000**	-	**100.00%**
2	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	11,018,108,000		**11,018,108,000**	11,018,108,000	-	**11,018,108,000**	-	**100.00%**
3	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	19,093,772,000		**19,093,772,000**	19,093,772,000	-	**19,093,772,000**	-	**100.00%**
4	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM	16,268,690,000		**16,268,690,000**	16,268,690,000	-	**16,268,690,000**	-	**100.00%**
5	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BENOA	16,699,218,500		**16,699,218,500**	16,699,218,500	-	**16,699,218,500**	-	**100.00%**
6	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO	16,767,797,500		**16,767,797,500**	16,767,797,500	-	**16,767,797,500**	-	**100.00%**
7	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SDKP	163,921,048,000		**163,921,048,000**	163,921,048,000	-	**163,921,048,000**	-	**100.00%**
8	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	14,283,210,000		**14,283,210,000**	14,283,210,000	-	**14,283,210,000**	-	**100.00%**
9	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	16,166,999,000		**16,166,999,000**	16,166,999,000	-	**16,166,999,000**	-	**100.00%**
10	STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON	7,725,242,000	2,406,000	**7,727,648,000**	7,725,242,000	2,406,000	**7,727,648,000**	-	**100.00%**
11	STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK	9,389,614,000		**9,389,614,000**	9,389,614,000	-	**9,389,614,000**	-	**100.00%**
12	STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP	5,318,969,000		**5,318,969,000**	5,318,969,000	-	**5,318,969,000**	-	**100.00%**
13	STASIUN PENGAWASAN SDKP KUPANG	8,976,008,000		**8,976,008,000**	8,976,008,000	-	**8,976,008,000**	-	**100.00%**
14	STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA	7,059,085,000		**7,059,085,000**	7,059,085,000	-	**7,059,085,000**	-	**100.00%**
15	STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN	6,269,105,000		**6,269,105,000**	6,269,105,000	-	**6,269,105,000**	-	**100.00%**

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN
		TW-3			TW3				
		∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP		
G	***Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut***	***89,119,323,985***	***-***	***89,119,323,985***	***89,119,323,985***	***-***	***89,119,323,985***	***-***	***100.00%***
1	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL BKKPN KUPANG	26,318,377,000		**26,318,377,000**	26,318,377,000		**26,318,377,000**	-	**100.00%**
2	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT BPSPL PADANG	2,914,499,000		**2,914,499,000**	2,914,499,000		**2,914,499,000**	-	**100.00%**
3	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	5,826,547,000		**5,826,547,000**	5,826,547,000		**5,826,547,000**	-	**100.00%**
4	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	19,206,467,000		**19,206,467,000**	19,206,467,000		**19,206,467,000**	-	**100.00%**
5	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	2,343,328,000		**2,343,328,000**	2,343,328,000		**2,343,328,000**	-	**100.00%**
6	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	3,217,528,985		**3,217,528,985**	3,217,528,985		**3,217,528,985**	-	**100.00%**
7	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	3,062,287,000		**3,062,287,000**	3,062,287,000		**3,062,287,000**	-	**100.00%**
8	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	26,230,290,000		**26,230,290,000**	26,230,290,000		**26,230,290,000**	-	**100.00%**
9	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	941,754,537,201	50,284,466,000	**992,039,003,201**	941,754,537,201	50,284,466,000	**992,039,003,201**	-	**100.00%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sekretariat Jenderal

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN
		TW-3			TW3				
		∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP		
A	***Sekretariat Jenderal***	***328,436,495,996***	***14,006,635,000***	***342,443,130,996***	***328,436,495,996***	***14,006,635,000***	***342,443,130,996***	**-**	***100.00%***
1	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	10,053,931,000		**10,053,931,000**	10,053,931,000	-	**10,053,931,000**	-	**100.00%**
2	BIRO UMUM dan PBJ SETJEN KKP	314,813,237,996	14,006,635,000	**328,819,872,996**	314,813,237,996	14,006,635,000	**328,819,872,996**	-	**100.00%**
3	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,569,327,000		**3,569,327,000**	3,569,327,000	-	**3,569,327,000**	-	**100.00%**

Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NOTA DINAS
NOMOR 2576/DJPT.1/OT.710/X/2025

Yth.	:	1. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan 2. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan 3. Direktur Kepelabuhanan Perikanan 4. Direktur Usaha Penangkapan Ikan 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
Dari	:	Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap
Lampiran	:	Satu berkas
Hal	:	Penyampaian Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Periode Triwulan III tahun 2025
Tanggal	:	9 Oktober 2025

Sehubungan dengan telah dilaksanakan Validasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap periode pelaksanaan Triwulan III Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan hasil sebagai berikut:

1. Validasi dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap selaku admin eselon I dan Pusdatin selaku super admin pada Tools SKM KKP;
2. Hasil SKM diambil berdasarkan validasi data SKM Triwulan II Tahun 2025 yang dilakukan tanggal 1 s.d. 8 Oktober 2025;
3. Hasil penyelenggaraan SKM Ditjen Perikanan Tangkap periode Triwulan III Tahun 2025 per Unit Pelayanan Publik (UPP) terlampir (lampiran II).
4. Analisis atas hasil SKM Ditjen Perikanan Tangkap dijabarkan berikut:
   a. Target nilai SKM sebagaimana IKU Ditjen Perikanan Tangkap adalah 88,50;
   b. Jumlah responden sebanyak 3.833 dengan hasil SKM **93,78** (kategori mutu pelayanan **Sangat Baik**);
   c. Jumlah layanan yang dilaksanakan sebanyak 43 berdasarkan Kepmen KP Nomor 20 Tahun 2025. Jumlah layanan yang diselenggarakan oleh UPP Ditjen Perikanan Tangkap merupakan yang terbanyak di lingkungan KKP;
   d. Nilai SKM tertinggi diperoleh PPN Tual dengan nilai sebesar 99,03. Sedangkan, nilai terendah diperoleh Direktorat Usaha Penangkapan Ikan dengan nilai 89,75;
   e. Seluruh unsur pelayanan (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas, U7 Kemudahan Fitur/Perilaku, U8 Layanan Konsultansi, U9 Kualitas Isi/Sarana) mendapatkan nilai lebih dari 3 (tiga) dengan nilai rata-rata 3,75;
5. Atas hasil SKM tersebut, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap menghimbau agar masing-masing UPP untuk dapat:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

a. Mengidentifikasi 3 (tiga) unsur terendah dari U1 s.d. U9 dan menjadikan unsur tersebut sebagai bahan dalam menyusun rencana tindak lanjut hasil SKM dalam laporan;

b. Upaya yang dapat dilakukan oleh UPP untuk dijadikan rencana tindak lanjut atas unsur terendah tersebut antara lain dengan memberikan sosialisasi terkait waktu pemberian layanan, meningkatkan waktu respon petugas dalam melaksanakan pelayanan dengan memberikan in-house training, melakukan sosialisasi di berbagai media terkait fasilitas konsultasi dan pengaduan yang dimiliki UPP, dan melakukan perbaikan/peningkatan aplikasi dan/atau sarana prasarana yang mendukung pelayanan publik di masing-masing UPP;

c. Memperhatikan kecukupan jumlah responden per UPP, dengan mengacu tabel sampel dari *Krejcie and Morgan* sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

d. Menindaklanjuti hasil validasi dengan penyusunan laporan, inventarisasi saran dan masukan, penyusunan rencana tindak lanjut, serta publikasi hasil SKM Triwulan III Tahun 2025 melalui media sosial dan sarana prasarana yang tersedia paling lambat tanggal **14 Oktober 2025.**

e. memastikan kesesuaian format penyusunan laporan pelaksanaan SKM per UPP mengacu Pedoman Kementerian PANRB yang dapat diunduh pada menu Download pada Tools SKM KKP.

6. Rincian data SKM berdasarkan hasil validasi Triwulan III Tahun 2025 dapat diunduh secara mandiri melalui menu Laporan Data Detail pada Tools SKM KKP.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara , kami mengucapkan terima kasih.

Ditandatangani Secara Elektronik

Ridwan Mulyana

Tembusan
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran
Nomor : 2576/DJPT.1/OT.710/X/2025
Tanggal : 9 Oktober 2025

Hasil Penyelenggaraan SKM Triwulan III tahun 2025 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Unit Pelayanan Publik	Jumlah Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Hasil SKM
BBPI Semarang	60	3,800	3,850	3,767	3,717	3,833	3,700	3,750	3,817	3,750	94,40
Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	279	3,753	3,735	3,746	3,763	3,756	3,688	3,720	3,720	3,742	93,40
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	5	4,000	3,800	4,000	4,000	3,800	4,000	3,800	4,000	4,000	98,33
Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	94	3,638	3,617	3,585	3,574	3,574	3,553	3,564	3,596	3,606	89,75
PPN Ambon	164	3,762	3,732	3,665	3,677	3,713	3,854	3,854	3,799	3,817	94,09
PPN Brondong	126	3,794	3,778	3,754	3,786	3,706	3,675	3,698	3,683	3,714	93,30
PPN Karangantu	203	3,704	3,680	3,704	3,803	3,734	3,704	3,759	3,611	3,502	92,23
PPN Kejawanan	159	3,824	3,843	3,811	3,761	3,786	3,805	3,830	3,767	3,730	94,88
PPN Kwandang	243	3,840	3,794	3,811	3,753	3,782	3,691	3,778	3,840	3,794	94,67
PPN Palabuhanratu	141	3,887	3,858	3,851	3,837	3,801	3,773	3,816	3,773	3,759	95,43
PPN Pekalongan	106	3,858	3,830	3,830	3,783	3,774	3,830	3,868	3,698	3,670	94,84
PPN Pemangkat	178	3,871	3,848	3,860	3,904	3,798	3,865	3,848	3,865	3,831	96,36
PPN Pengambengan	125	3,784	3,752	3,792	3,728	3,768	3,720	3,736	3,728	3,680	93,58
PPN Prigi	146	3,767	3,774	3,740	3,692	3,726	3,664	3,740	3,664	3,664	92,87
PPN Sibolga	203	3,739	3,724	3,734	3,690	3,690	3,680	3,709	3,700	3,734	92,78

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Unit Pelayanan Publik	Jumlah Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Hasil SKM
PPN Sungailiat	111	3,775	3,784	3,730	3,703	3,640	3,586	3,676	3,568	3,775	92,19
PPN Tanjungpandan	118	3,746	3,720	3,729	3,686	3,754	3,771	3,678	3,729	3,746	93,34
PPN Ternate	217	3,742	3,700	3,696	3,682	3,724	3,774	3,788	3,747	3,742	93,36
PPN Tual	143	3,958	3,958	3,965	3,944	3,972	3,972	3,951	3,951	3,958	99,03
PPP Teluk Batang	69	3,913	3,870	3,826	3,884	3,826	3,870	3,812	3,841	3,913	96,54
PPS Belawan	107	3,645	3,645	3,682	3,710	3,551	3,654	3,738	3,682	3,645	91,74
PPS Bitung	223	3,731	3,695	3,691	3,691	3,731	3,749	3,691	3,713	3,731	92,84
PPS Bungus	221	3,661	3,670	3,670	3,701	3,661	3,697	3,679	3,665	3,661	91,87
PPS Cilacap	118	3,739	3,697	3,731	3,689	3,723	3,807	3,664	3,647	3,739	92,91
PPS Kendari	134	3,821	3,836	3,828	3,843	3,843	3,813	3,813	3,813	3,821	95,71
PPS Nizam Zachman	139	3,741	3,770	3,791	3,727	3,719	3,784	3,755	3,705	3,741	93,67
DJPT	**3833**	**3,781**	**3,764**	**3,756**	**3,752**	**3,744**	**3,733**	**3,766**	**3,741**	**3,724**	**93,78**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DATA HASIL PENGAWASAN TRIWULAN III TA 2025

DARI APLIKASI SIDAK

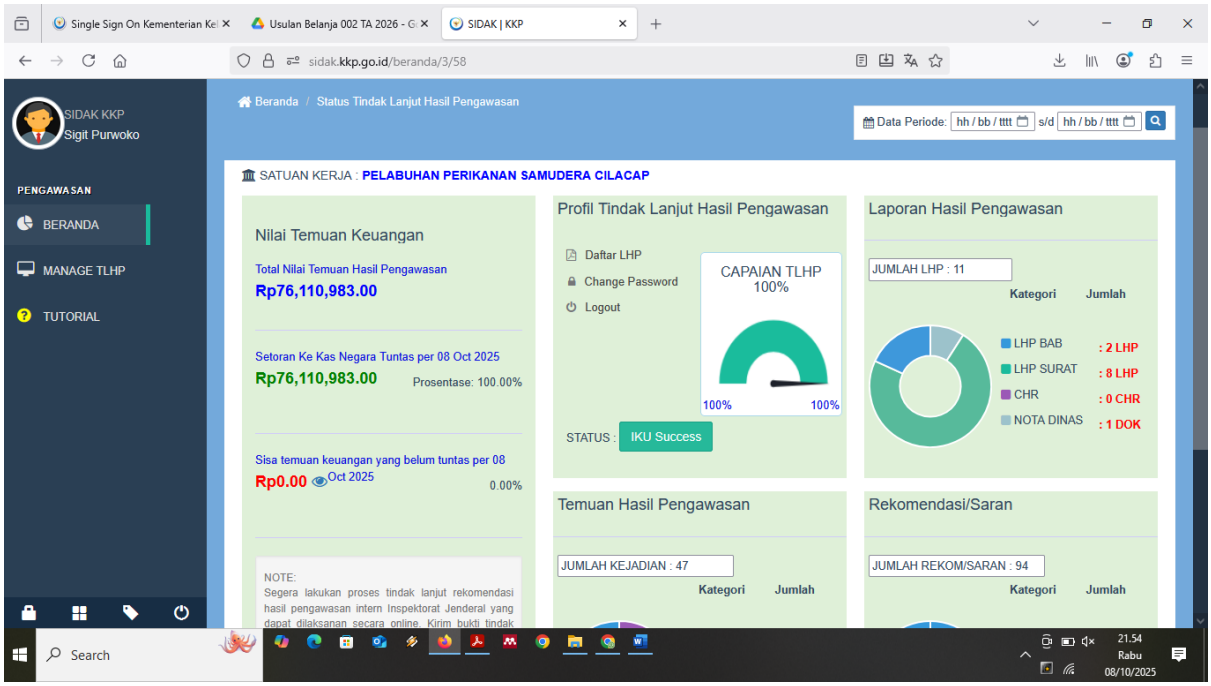

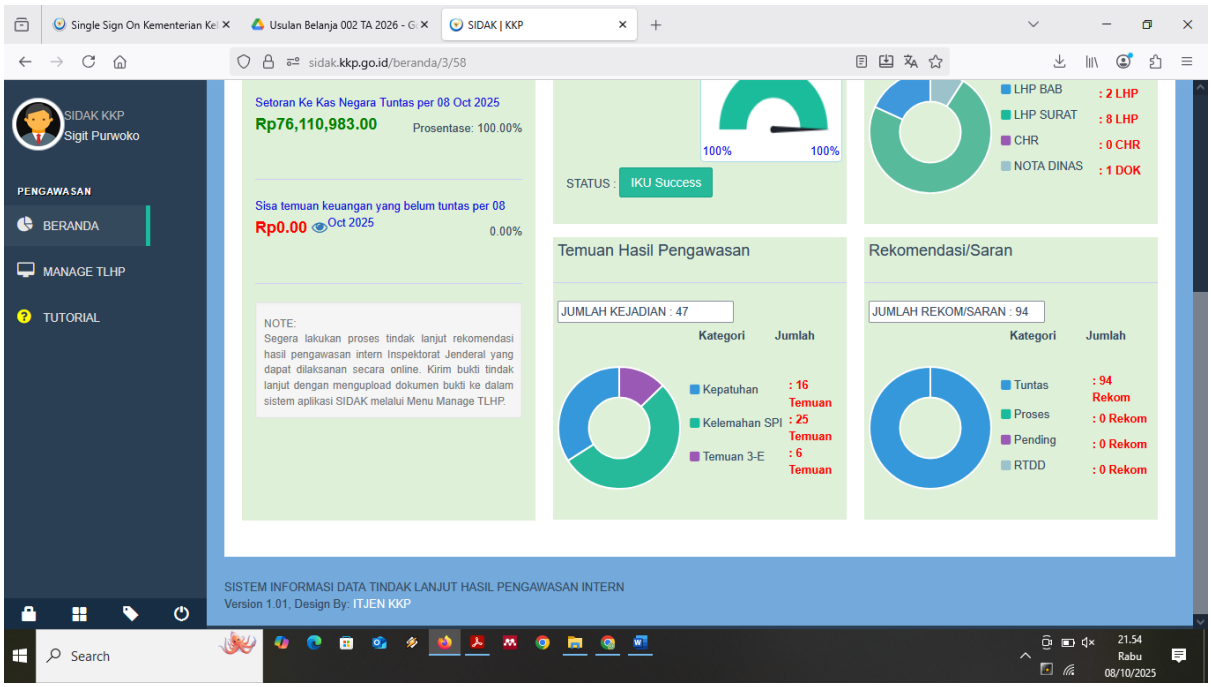

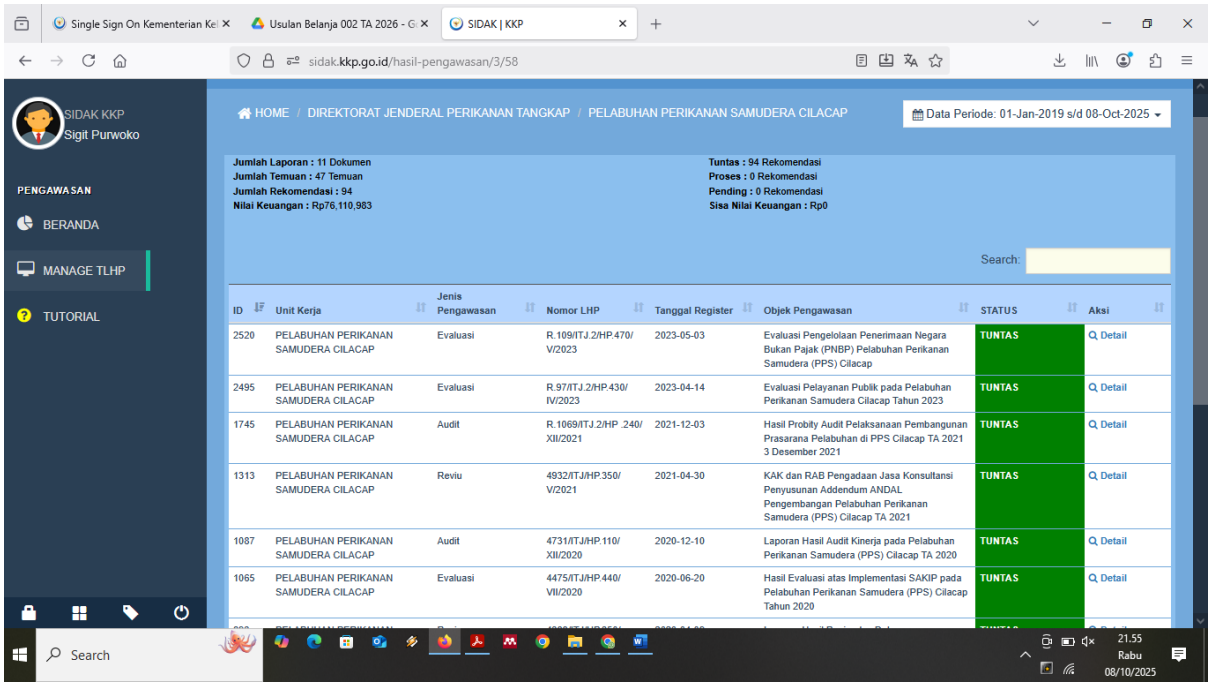
Single Sign On Kementerian Ke
Usulan Belanja 002 TA 2026 - G
SIDAK | KKP
sidak.kkp.go.id/hasil-pengawasan/3/58
SIDAK KKP
Sigit Purwoko
PENGAWASAN
BERANDA
MANAGE TLHP
TUTORIAL
HOME / DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP / PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
Data Periode: 01-Jan-2019 s/d 08-Oct-2025
Jumlah Laporan : 11 Dokumen
Jumlah Temuan : 47 Temuan
Jumlah Rekomendasi : 94
Nilai Keuangan : Rp76,110,983
Tuntas : 94 Rekomendasi
Proses : 0 Rekomendasi
Pending : 0 Rekomendasi
Sisa Nilai Keuangan : Rp0
Search:
ID
Unit Kerja
Jenis Pengawasan
Nomor LHP
Tanggal Register
Objek Pengawasan
STATUS
Aksi
2520 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP Evaluasi R.109/ITJ.2/HP.470/V/2023 2023-05-03 Evaluasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap TUNTAS Detail
2495 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP Evaluasi R.97/ITJ.2/HP.430/IV/2023 2023-04-14 Evaluasi Pelayanan Publik pada Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2023 TUNTAS Detail
1745 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP Audit R.1069/ITJ.2/HP .240/XII/2021 2021-12-03 Hasil Probity Audit Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pelabuhan di PPS Cilacap TA 2021 3 Desember 2021 TUNTAS Detail
1313 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP Reviu 4932/ITJ/HP.350/V/2021 2021-04-30 KAK dan RAB Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Addendum ANDAL Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap TA 2021 TUNTAS Detail
1087 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP Audit 4731/ITJ/HP.110/XII/2020 2020-12-10 Laporan Hasil Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap TA 2020 TUNTAS Detail
1065 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP Evaluasi 4475/ITJ/HP.440/VII/2020 2020-06-20 Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap Tahun 2020 TUNTAS Detail
Search
21.55
Rabu
08/10/2025

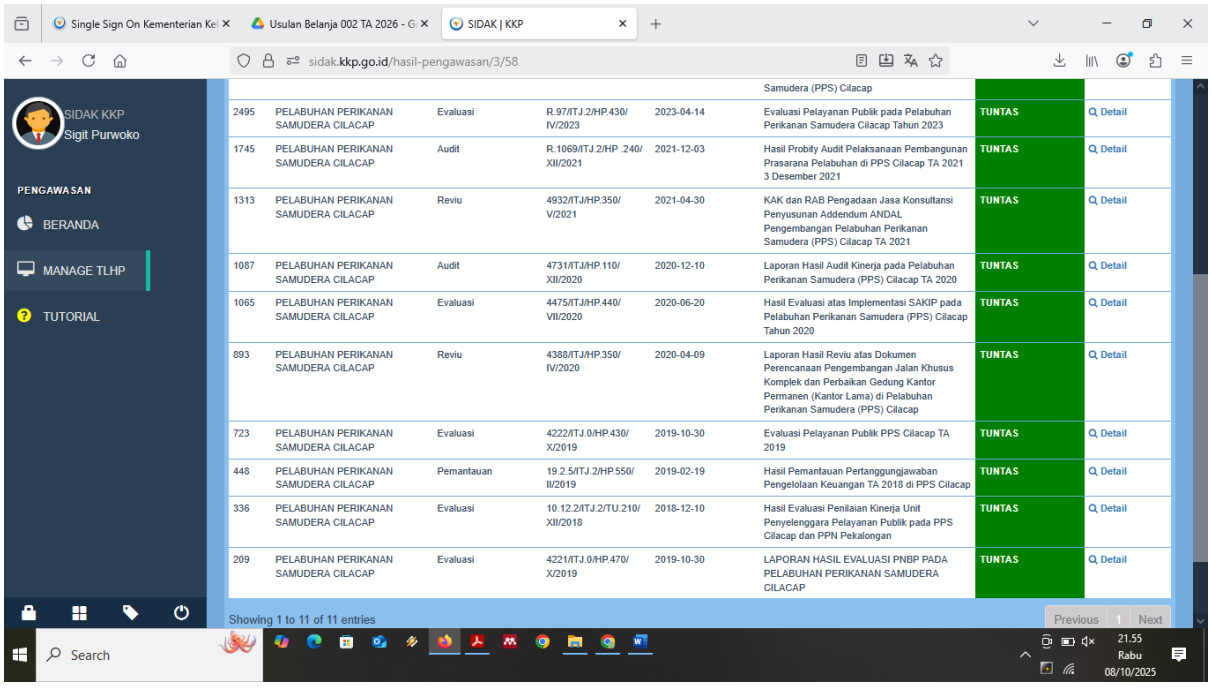
Single Sign On Kementerian Ke
Usulan Belanja 002 TA 2026 - G
SIDAK | KKP
sidak.kkp.go.id/hasil-pengawasan/3/58
SIDAK KKP
Sigit Purwoko
PENGAWASAN
BERANDA
MANAGE TLHP
TUTORIAL
Samudera (PPS) Cilacap
2495 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP Evaluasi R.97/ITJ.2/HP.430/IV/2023 2023-04-14 Evaluasi Pelayanan Publik pada Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2023 TUNTAS Detail
1745 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP Audit R.1069/ITJ.2/HP .240/XII/2021 2021-12-03 Hasil Probity Audit Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pelabuhan di PPS Cilacap TA 2021 3 Desember 2021 TUNTAS Detail
1313 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP Reviu 4932/ITJ/HP.350/V/2021 2021-04-30 KAK dan RAB Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Addendum ANDAL Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap TA 2021 TUNTAS Detail
1087 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP Audit 4731/ITJ/HP.110/XII/2020 2020-12-10 Laporan Hasil Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap TA 2020 TUNTAS Detail
1065 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP Evaluasi 4475/ITJ/HP.440/VII/2020 2020-06-20 Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap Tahun 2020 TUNTAS Detail
893 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP Reviu 4388/ITJ/HP.350/IV/2020 2020-04-09 Laporan Hasil Reviu atas Dokumen Perencanaan Pengembangan Jalan Khusus Komplek dan Perbaikan Gedung Kantor Permanen (Kantor Lama) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap TUNTAS Detail
723 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP Evaluasi 4222/ITJ.0/HP.430/X/2019 2019-10-30 Evaluasi Pelayanan Publik PPS Cilacap TA 2019 TUNTAS Detail
448 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP Pemantauan 19.2.5/ITJ.2/HP.550/II/2019 2019-02-19 Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan TA 2018 di PPS Cilacap TUNTAS Detail
336 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP Evaluasi 10.12.2/ITJ.2/TU.210/XII/2018 2018-12-10 Hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada PPS Cilacap dan PPN Pekalongan TUNTAS Detail
209 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP Evaluasi 4221/ITJ.0/HP.470/X/2019 2019-10-30 LAPORAN HASIL EVALUASI PNBP PADA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP TUNTAS Detail
Showing 1 to 11 of 11 entries
Previous 1 Next
Search
21.55
Rabu
08/10/2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TRIWULAN III TAHUN 2025

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan III PPS Cilacap Tahun 2025 sebagai upaya untuk melakukan perbaikan terhadap pelayanan publik di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Penyelenggara Pelayanan wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun. Untuk itu, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap triwulan dengan mengambil responden dari masyarakat penerima pelayanan publik.

Hasil survei kepuasan masyarakat pada Triwulan III yang dituangkan dalam laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan untuk evaluasi dan pedoman dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan kepada Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada masa yang akan datang.

Cilacap, 13 Oktober 2025
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Ditandatangani Secara Elektronik

Imas Masriah, SPi, M.Pi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3

BAB II PENGUMPULAN DATA SKM 4
2.1. Pelaksana SKM 4
2.2. Metode Pengumpulan Data 4
2.3. Lokasi Pengumpulan Data 7
2.4. Waktu Pelaksanaan SKM 7
2.5. Penentuan Jumlah Responden 7

BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA SKM 8
3.1. Jumlah Responden SKM 8
3.2. IKM PPS Cilacap 9

BAB IV ANALISIS HASIL SKM 11
4.1. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan kelebihan Usur Layanan . 11
4.2. Rencana Tindak Lanjut atas Hasil Analisa IKM 11
4.3. Kritik dan Saran Responden pada Aplikasi SUSAN 12
4.4. Rencana tindak Lanjut 14
4.5. Tren Nilai SKM 14

BAB V KESIMPULAN 16

LAMPIRAN

1. Kuesioner
2. Pengelolaan Data SKM
3. Dokumentasi Hasil Pelaksanaan SKM
4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Pada Periode Sebelumnya (TW II 2025)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap melaksanakan tugas-tugas pelayanan dalam rangka mendukung pembangunan perikanan tangkap. Dalam hal ini, terdapat 15 (lima belas) layanan publik di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang masuk dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelayanan publik yang dilakukan di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap berorientasi pada keutamaan kebutuhan dan kepuasan penerima layanan khususnya *Stakeholder* Perikanan yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Namun demikian pelayanan yang dilakukan mungkin terdapat ketidaksesuaian dengan harapan pengguna layanan.

Untuk mengetahui kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap perlu melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala, dalam hal ini dilakukan setiap triwulan. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei kepuasan masyarakat dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menggambarkan tingkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan. Selain itu, survei kepuasan masyarakat juga dilakukan untuk mendeteksi adanya keluhan atau perlunya perbaikan dalam pelaksanaan pelayanan publik Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Kop/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kep/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II
PENGUMPULAN DATA SKM

2.1. Pelaksana SKM

Pelaksanaan SKM lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dilakukan oleh Petugas Pelayanan Publik Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

2.2. Metode Pengumpulan Data

- Survei dilakukan secara periodik yaitu setiap triwulan dengan pendekatan kualitatif yang diukur menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Dengan menggunakan skala *Likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.
- Pengumpulan data pada Survei Kepuasan Masyarakat ini dilakukan melalui pengisian kuesioner (melalui aplikasi SKM) serta wawancara tatap muka kepada pengguna layanan.
- Variabel pengukuran didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang terdiri dari 9 (Sembilan) unsur sebagai berikut:

  1. Persyaratan
  2. Prosedsur
  3. Waktu Pelayanan
  4. Biaya / Tarif
  5. Produk Layanan
  6. Kompetensi Pelaksana
  7. Perilaku Pelaksana
  8. Sarana dan Prasarana
  9. Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan

- Tahapan pengukuran dilakukan sebagai berikut :

Persiapan

Pelaksanaan SKM semula melalui penyebaran kuesioner secara manual, namun mulai Triwulan II Tahun 2023, pelaksanaan SKM dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yakni apikasi SUSAN yang diinisiasi oleh Sekretariat Jenderal KKP. Untuk itu, telah dilakukan sosialisasi kepada petugas survey (surveyor) perihal tata cara penggunaan aplikasi dalam pengisian kuesioner.

Kuesioner dibagi atas 2 (dua) bagian, yaitu :

- Data Masyarakat (Responden) meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama.
- Mutu pelayanan Publik yang merupakan pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai. Kriteria untuk responden SKM adalah para pengguna layanan pada Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data telah dilaksanakan pada periode Triwulan III 2025. Data yang terkumpul langsung masuk dalam aplikasi SUSAN.

Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur (variable pengukuran) diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "Nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan survey kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan (9 unsur) memiliki penimbang yang sama yang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{(Total unsur yang terisi x 9)}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai SKM (sebelum konversi) x 25}$$

Untuk memperoleh Nilai IKM Unit Pelayanan sebagai penyelenggara pelayanan publik maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai IKM Unit Pelayanan} = \frac{\text{Jumlah Nilai IKM per Jenis Pelayanan}}{\text{Jumlah Jenis Layanan}}$$

Adapun nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, mutu pelayanan, dan kinerja unit pelayanan publik digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Kategorisasi Mutu Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	BAIK
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	SANGAT BAIK

Penyusunan Laporan

Hasil survei disusun dalam bentuk laporan sebagai salah satu media atau alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik secara bertahap, konsisten, berkesinambungan.

2.3. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada waktu jam layanan.

2.4. Waktu Pelaksanaan SKM

Pelaksanaan SKM dilakukan pada periode SKM Triwulan III Tahun 2025.

2.5. Penentuan Jumlah Responden

Responden diambil pada saat pelaksanaan permohonan pelayanan pada setiap layanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1. Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pegumpulan data, jumlah responden penerima layanan lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada survei kepuasan masyarakat Triwulan III Tahun 2025 adalah sebanyak 118 responden dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Karakteristik dan komposisi responden

Karakteristik	Indikator	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	63	53,39
	Perempuan	55	46,61
Pendidikan	SD	17	14,41
	SMP	8	6,78
	SMA	59	50
	D3	2	1,69
	S1	32	27,12
Pekerjaan	ASN	3	2,54
	Pelaku Usaha KKP	44	37,29
	Swasta	40	33,90
	Wirausaha	25	21,19
	Pelajar	6	5,08

3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Hasil pengolahan data SKM diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Detai Nilai SKM Per Unsur Layanan

Uraian	Nilai unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM Per Unsur	94,28	93,43	92,37	93,22	92,16	93,01	95,13	91,53	91,10
Mutu Pelayanan	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Pelayanan Publik	92.91								

Keterangan:

U1 Persyaratan Layanan
U2 Kemudahan Prosedur
U3 Waktu Penyelesaian
U4 Kesesuaian Biaya
U5 Kesesuaian Produk
U6 Kecepatan Respon
U7 Kemampuan petugas
U8 Layanan konsultasi
U9 Sarpras

Grafik 1. Grafik Nilai Rata-rata per Unsur Layanan

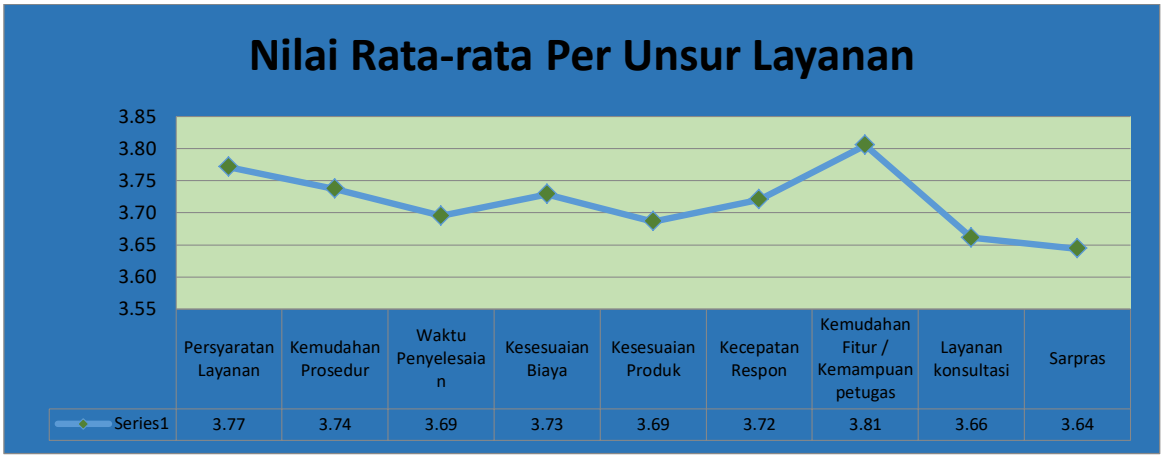

Grafik 2. Grafik IKM Per Layanan

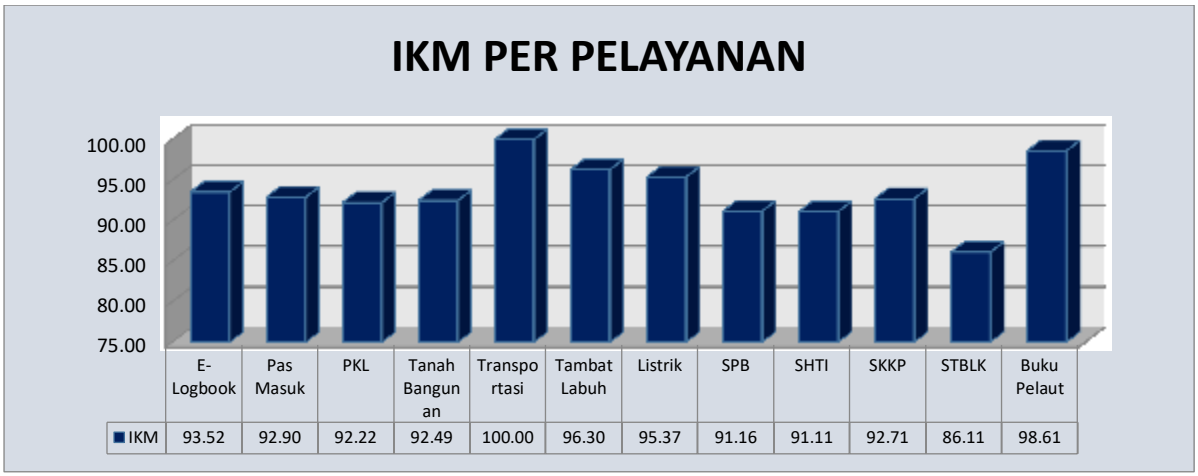

BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Survei Kepuasan Msyarakat (SKM) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dilaksanakan setiap triwulan, berdasarkan pada Peraturan Menteri PAN RB No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Hasil SKM pada Triwulan III Tahun 2025 ini menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebesar 92,91 (kriteria A) dengan kinerja unit pelayanan SANGAT BAIK. Indeks tersebut diperoleh dari pengolahan data sebanyak 118 responden dan 12 jenis pelayanan.

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa:

1. Seluruh unsur layanan mendapatkan nilai dengan mutu pelayanan kategori A (SANGAT BAIK);
2. Unsur pelayanan yang mendapatkan nilai terendah diantaranya adalah sarana dan prasarana mendapatkan nilai terendah meski masih dalam kategori SANGAT BAIK;
3. Kemudahan fitur/kemampuan petugas menempati nilai tertinggi yaitu 3,81;
4. Jenis layanan dengan IKM paling tinggi yakni Pelayanan Penggunaan Transportasi.

4.2. Rencana Tindak Lanjut atas Hasil Analisa IKM

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Rencana Tindak Lanjut

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	**TW II**	**TW III**	**TW IV**	
1	Sarana dan prasarana	Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana telah disusun dalam perencanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana PPS Cilacap				**√**	**Timja TKSP**
2	Layanan Konsultasi	Sarana pengaduan telah disediakan baik online maupun online, namun mungkin perlu lebih gencar dalam sosialisasi atas sarana-sarana untuk pengaduan dan konsultasi bagi pengguna layanan				**√**	**Tim Penanganan Pengaduan**

4.3. Kritik dan Saran Responden pada Aplikasi SUSAN

Dalam pengukuran SKM pada Triwulan III Tahun 2025 yang dilakukan terhadap 12 layanan, seluruh layanan mendapatkan nilai dengan kategori BAIK dan SANGAT BAIK. Namun, tetap terdapat kritik dan saran yang disampaikan pada pengisian *polling* melalui aplikasi SUSAN, sebagai masukan bagi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berikut adalah kritik dan saran responden yang memerlukan perhatian khusus:

No	**Nama Layanan**	**Kritik Saran**
1	Persetujuan berlayar	Formulir keberangkatan 3jenis yang semula ada di pos pelayanan sekarang ng print sendiri
2	Persetujuan berlayar	Lambat (proses setelah lewat kesehatan) Bila perlu lakukan pengamatan sendiri sbg konsumen

No	Nama Layanan	Kritik Saran
3	Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan	Epit. Serba online tp lambat sampai hasil stblkk. Kami di lapangan butuh cepat krn harus ajuin rekom bbm. Perbaiki hal yg bisa dioptimalkan. Bila perlu lakukan pengamatan sendiri sbg konsumen
4	Buku pelaut awak kapal perikanan	Semoga permohonan penerbitan Buku Pelaut bisa untuk semua awak kapal, bukan hanya awak kapal yang sudah memiliki Sertifikat ketrampilan saja
5	Pengesahan perjanjian kerja laut	Petugas pelayanan ramah, cepat dan responsif, semoga kedepannya PKL terhubung dengan EPIT, yg mana pada saat menginput EPIT terbit form PKL bagi awak kapal yang siap untuk ditanda tangani agar efisiensi tidak isi PKL secara manual dari tanggal-nama awak-tempat tanggal lahir- alamat - dan premi yang memakan waktu karena harus input satu per satu
6	Buku pelaut awak kapal perikanan	Kalau bisa khususnya di laporan kedatangan yang STBLKK jika sudah terbit nama kapal di panggil jangan diam saja, baru dokumen bisa langsung di alihkan ke bagian yang di HPK kedatangan
7	Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan	Pelayanan petugas baik, ramah, responsif, namun tarif tambat labuh yg tinggi tidak didukung oleh fasilitas yang memadai, alur keluar-masuk kolam perlu di keruk, karena pendangkalan di beberapa bagian yang menyulitkan dalam aktifitas tambat
8	Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	Area timur terlalu terbuka sehingga jika ada hujan air masuk ke area pasar, apalagi di tempat tersebut kita meletakkan frezer yang kemungkinan bisa menyebabkan kebocoran arus listrik

4.4. Rencana Tindak Lanjut

No	Nama Layanan	Kritik Saran	Rencana Tindak Lanjut
1	Persetujuan berlayar	Formulir keberangkatan 3 jenis yang semula ada di pos pelayanan sekarang ng print sendiri	Adanya efisiensi anggaran di TA 2025, namum demikian akan diusulkan kembali di TA 2026

No	Nama Layanan	Kritik Saran	Rencana Tindak Lanjut
2	Persetujuan berlayar	Lambat (proses setelah lewat kesehatan) Bila perlu lakukan pengamatan sendiri sbg konsumen	Lambat dan cepat adalah relatif, lebih lanjut akan disosialisasikan Standar Pelayanan dengan mencermati baku mutu waktu pelayanan
3	Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan	Epit. Serba online tp lambat sampai hasil stblkk. Kami di lapangan butuh cepat krn harus ajuin rekom bbm. Perbaiki hal yg bisa dioptimalkan. Bila perlu lakukan pengamatan sendiri sbg konsumen	Lambat dan cepat adalah relatif, lebih lanjut akan disosialisasikan Standar Pelayanan dengan mencermati baku mutu waktu pelayanan
4	Buku pelaut awak kapal perikanan	Semoga permohonan penerbitan Buku Pelaut bisa untuk semua awak kapal, bukan hanya awak kapal yang sudah memiliki Sertifikat ketrampilan saja	Terkait buku pelaut diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. Selanjutnya akan disosialisasikan terkait dengan peraturan tersebut.
5	Pengesahan perjanjian kerja laut	Petugas pelayanan ramah, cepat dan responsif, semoga kedepannya PKL terhubung dengan EPIT, yg mana pada saat menginput EPIT terbit form PKL bagi awak kapal yang siap untuk ditanda tangani agar efisiensi tidak isi PKL secara manual dari tanggal-nama awak-tempat tanggal lahir-alamat - dan premi yang memakan waktu karena harus input satu per satu	Saran dan masukan akan disampaikan lebih lanjut ke pengembang aplikasi

No	Nama Layanan	Kritik Saran	Rencana Tindak Lanjut
6	Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan	Pelayanan petugas baik, ramah, responsif, namun tarif tambat labuh yg tinggi tidak didukung oleh fasilitas yang memadai, alur keluar-masuk kolam perlu di keruk, karena pendangkalan di beberapa bagian yang menyulitkan dalam aktifitas tambat	Terkait dengan pendangkalan telah masuk dalam salah satu poin dalam pengembangan pelabuhan pada proyek AFD

4.5. Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Berikut adalah tren tingkat kepuasan penerima layanan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2025.

Grafik 3. Tren IKM PPS Cilacap 2023 - 2025

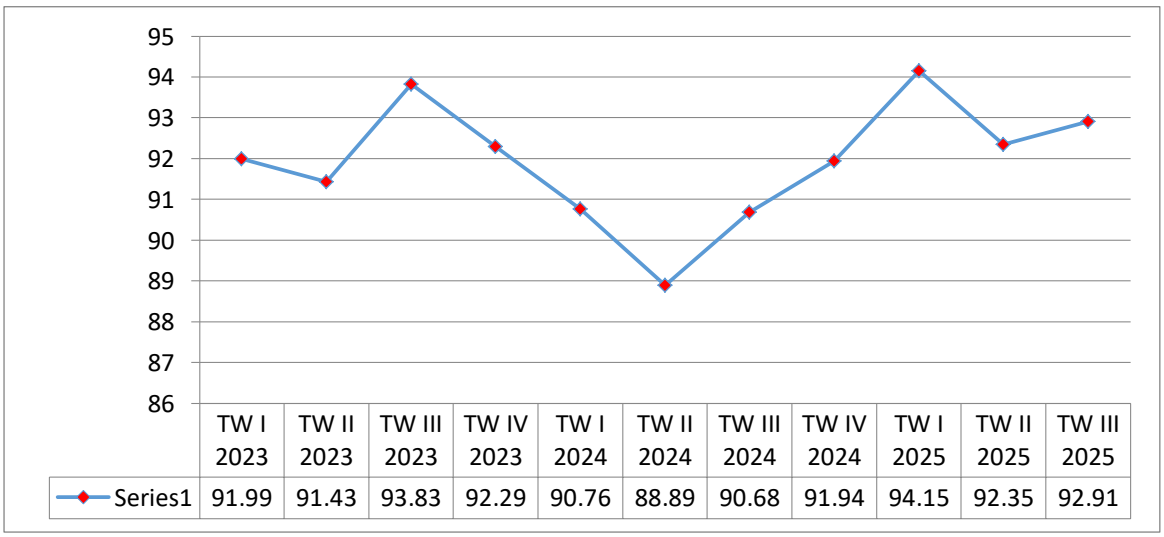

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat PPS Cilacap mencapai mutu pelayanan dengan kategori A (SANGAT BAIK).

Tabel 5. Tren IKM Per Pelayanan Tahun 2025

No	Layanan	Triwulan 1 2025		Triwulan 2 2025		Triwulan 3 2025	
		IKM	KUP	IKM	KUP	IKM	KUP
1	E-Logbook Penangkapan Ikan	96.76	SB	92.17	SB	93.52	SB
2	Floating Repair	95.56	SB	-	-	-	-
3	Pas Masuk	84.26	B	91.36	SB	92.90	SB
4	Pengesahan Perjanjian Kerja Laut	94.14	SB	97.47	SB	92.22	SB
5	Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan	81.67	B	86.87	B	92.49	SB
6	Penggunaan Transportasi	100	SB	100	SB	100	SB
7	Jasa Tambat Labuh	97.22	SB	99.60	SB	96.30	SB
8	Jasa Listrik	97.22	SB	97.22	SB	95.37	SB
9	Surat Persetujuan Berlayar	95.49	SB	91.85	SB	91.16	SB
10	Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan	90.74	SB	88.89	SB	91.11	SB
11	Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan	95	SB	99.54	SB	92.71	SB
12	Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal	93.52	SB	96.11	SB	86.11	SB
13	Buku Pelaut	-	-	-	-	98.61	SB

BAB V

KESIMPULAN

Survei Kepuasan Msyarakat (SKM) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dilaksanakan setiap triwulan, berdasarkan pada Peraturan Menteri PAN RB No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaan SKM pada Triwulan III Tahun 2025 ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik di PPS Cilacap secara umum menunjukkan kualitas kinerja pelayanan SANGAT BAIK;
2. Seluruh unsur pelayanan mendapatkan nilai SANGAT BAIK. Namun demikian, dua unsur dengan nilai terendah tetap dimasukkan dalam prioritas perbaikan;
3. Tiga unsur pelayanan dengan nilai tertinggi adalah kemudahan fitur/kemampuan petugas, persyaratan pelayanan, dan kemudahan prosedur.

LAMPIRAN

1. Kuesioner

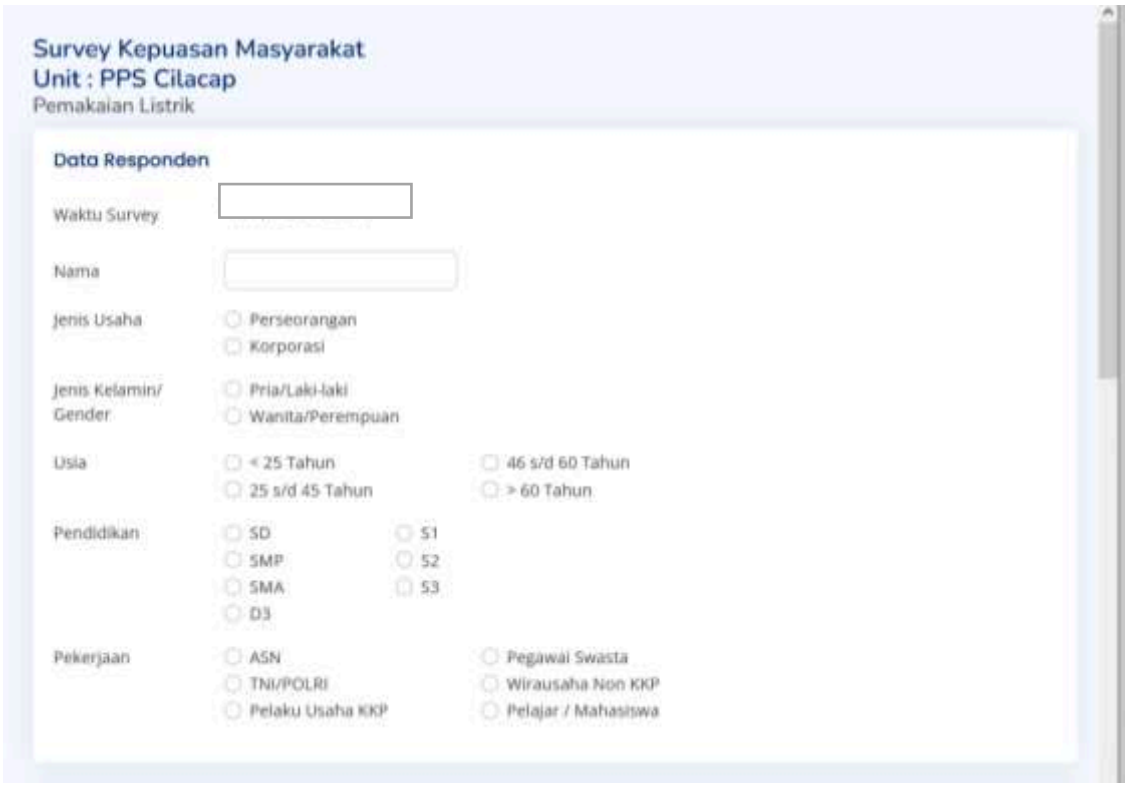

Survey Kepuasan Masyarakat
Unit : PPS Cilacap
Pemakaian Listrik

Data Responden

Waktu Survey

Nama

Jenis Usaha
- Perseorangan
- Korporasi

Jenis Kelamin/ Gender
- Pria/Laki-laki
- Wanita/Perempuan

Usia
- < 25 Tahun
- 25 s/d 45 Tahun
- 46 s/d 60 Tahun
- > 60 Tahun

Pendidikan
- SD
- SMP
- SMA
- D3
- S1
- S2
- S3

Pekerjaan
- ASN
- TNI/POLRI
- Pelaku Usaha KKP
- Pegawai Swasta
- Wirausaha Non KKP
- Pelajar / Mahasiswa

Pertanyaan

1. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang **kesesuaian persyaratan** pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan?
   - Sangat sesuai
   - Sesuai
   - Kurang sesuai
   - Tidak sesuai

2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kemudahan prosedur** yang dijalani untuk mendapatkan layanan?
   - Sangat Mudah
   - Mudah
   - Kurang mudah
   - Tidak mudah

3. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian jangka waktu penyelesaian** pelayanan dengan yang diinformasikan?
   - Sangat sesuai
   - Sesuai
   - Kurang sesuai
   - Tidak sesuai

4. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian biaya** pelayanan yang dibayarkan dengan yang diinformasikan?
   - Sangat sesuai
   - Sesuai
   - Kurang sesuai
   - Tidak sesuai

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang **kesesuaian produk** pelayanan antara yang ada pada publikasi dengan pelayanan yang diberikan?

- Sangat sesuai
- Sesuai
- Kurang sesuai
- Tidak sesuai

6. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesigapan petugas pelayanan**?

- Sangat Cepat
- Cepat
- Kurang cepat
- Lambat

7. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **perilaku /kemampuan petugas pelayanan**?

- Sangat baik
- Baik
- Kurang baik
- Tidak baik

8. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **layanan konsultasi dan pengaduan** yang tersedia (sarana pengaduan/kemudahan mengadu/tindak lanjut)?

- Sangat baik
- Baik
- Kurang baik
- Tidak baik

9. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap **kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana** pelayanan di unit?

- Sangat baik
- Baik
- Kurang baik
- Tidak baik

2. Pengelolaan Data SKM

Nama_Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Kritik_Saran	Kode_Sesi_Survey	Tgl_Data_SKM
Pas masuk harian dan berlangganan	4	4	4	4	4	4	4	4	3	Pelayanan sudah baik cepat ramah	114.10.18.195-20250930-111729	9/30/2025 11:25
Sertifikat kelaikan kapal perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan nya sangat memuaskan	114.10.125.136-20250929-144443	9/29/2025 14:55
Penggunaan transportasi kendaraan/pengangkutan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Peremajaan unit truk pendingin	182.2.43.186-20250929-100248	9/29/2025 10:11
Persetujuan berlayar	4	4	4	4	4	4	4	4	3	Formulir keberangkatan 3jenis yang semula ada di pos pelayanan sekarang print sendiri	114.10.120.138-20250929-100013	9/29/2025 10:07
Pas masuk harian dan berlangganan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sudah baik pertahankan	182.2.40.24-20250929-094931	9/29/2025 9:58
Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sudah baik pertahankan	182.2.40.24-20250929-094931	9/29/2025 9:57
Sertifikat kelaikan kapal perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sudah baik pertahankan	182.2.40.24-20250929-094931	9/29/2025 9:56
Persetujuan berlayar	3	2	1	4	2	2	3	1	3	Lambat (proses setelah lewat kesehatan) Bila perlu lakukan pengamatan sendiri sbg konsumen	182.2.40.24-20250929-094623	9/29/2025 9:55
Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan	3	2	2	4	2	2	3	1	3	Epit. Serba online tp lambat sampai hasil stblkk. Kami di lapangan butuh cepat krn harus ajuin rekom bbm. Perbaiki hal yg bisa dioptimalkan. Bila perlu lakukan pengamatan sendiri sbg konsumen	140.213.163.134-20250929-092247	9/29/2025 9:41
Persetujuan berlayar	4	4	3	3	3	3	3	3	3	Tetap semangat melayani konsumen	182.2.42.124-20250929-090608	9/29/2025 9:13
Persetujuan berlayar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tetap semangat untuk memberikan pelayanan terbaik Terimakasih	180.241.194.29-20250929-090540	9/29/2025 9:12
Sertifikat hasil tangkapan ikan	4	4	4	4	4	3	3	3	3	Agar prosesnya lebih cepat dan tidak banyak persyaratan	36.65.91.136-20250929-090244	9/29/2025 9:10
Persetujuan berlayar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan super baik	103.199.117.195-20250929-085634	9/29/2025 9:07
Persetujuan berlayar	4	4	4	4	3	4	4	4	4	Saran kalau bisa SPB dan STLBKK di kirimkan softcopy nya untuk arsip	140.213.139.19-20250929-085830	9/29/2025 9:06
Pengesahan perjanjian kerja laut	4	3	3	4	4	3	4	3	3	Semoga semakin lancar dan cepat	140.213.160.221-20250929-085409	9/29/2025 9:04
Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan	4	4	4	3	4	3	4	3	4	Semoga makin cepat	140.213.160.221-20250929-085409	9/29/2025 9:01
Pas masuk harian dan berlangganan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan sudah baik cepat dan ramah	36.65.90.192-20250927-143956	9/27/2025 14:48

Nama_Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Kritik_Saran	Kode_Sesi_Survey	Tgl_Data_SKM
Akun e-logbook penangkapan ikan yang teraktivasi	4	4	4	4	3	4	4	4	4	Pelayanan sangat cepat	140.213.162.176-20250927-112328	9/27/2025 11:33
Sertifikat kelaikan kapal perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Cepat baik dan mantap	114.10.6.149-20250926-115348	9/26/2025 12:01
Sertifikat kelaikan kapal perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Cepat, Mantep, Efektif dan Efisien	146.75.160.26-20250926-115006	9/26/2025 11:56
Pengesahan perjanjian kerja laut	4	4	4	4	3	4	4	4	4	Cepat, cermat dan mantap	182.2.36.97-20250925-080713	9/25/2025 8:16
Pengesahan perjanjian kerja laut	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Mantep, lanjutkan, tingkatkan	146.75.160.26-20250925-075748	9/25/2025 8:04
Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	semoga semakin baik kedepannya	36.73.32.115-20250924-163556	9/24/2025 16:42
Pas masuk harian dan berlangganan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sudah sesuai bagus ramah	36.65.93.56-20250924-133045	9/24/2025 13:40
Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	4	3	3	3	4	3	3	4	3	Saya berharap semua personil dinas terkait untuk proaktip membantu kelancaran usaha mikro yang kami tekuni selama ini	182.2.36.65-20250924-120749	9/24/2025 12:24
Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	4	4	4	3	3	3	3	3	3	Lakukan yang terbaik untuk pedagang kecil . Terima kasih	114.10.122.98-20250924-121240	9/24/2025 12:19
Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Semoga lebih baik	114.10.19.237-20250924-115659	9/24/2025 12:08
Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Air di mushola dan keversihan	114.79.51.158-20250924-114647	9/24/2025 11:57
Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	3	3	4	4	3	3	3	3	3	Perbaikan ,perawatan,keamanan di tingkatkan	182.2.40.176-20250924-113345	9/24/2025 11:49
Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Semoga sangat baik	182.2.40.139-20250924-113318	9/24/2025 11:43
Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Pebaikan sarana dan prasarana diperbaik... Semisal lantai dan kramik banyk yg rusak... Tolong perbaiki secepatannya.. Mksh...	182.2.39.140-20250924-113108	9/24/2025 11:43

Nama_Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Kritik_Saran	Kode_Sesi_Survey	Tgl_Data_SKM
Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	4	4	3	2	4	4	4	4	3	lebih ditingkatkan lagi	182.2.46.201-20250924-113022	9/24/2025 11:42
Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Terimakasih dan salam sejahtera	182.2.46.121-20250924-113233	9/24/2025 11:42
Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1 air musholah	114.10.11.102-20250924-112941	9/24/2025 11:41
Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Lebih diperhatikan lagi keluhan kami..	182.2.52.188-20250924-112740	9/24/2025 11:41
Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan sangat memuaskan	114.10.11.115-20250924-113339	9/24/2025 11:41
Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tidak ada saran	114.79.47.230-20250924-113402	9/24/2025 11:41
Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Air di mushola dan kebersihan	114.79.51.158-20250924-112945	9/24/2025 11:41
Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Air buat mushola,kebersihan,	114.10.20.15-20250924-112931	9/24/2025 11:40
Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	mudahan ,mudahan lebih baik lagi	140.213.166.2-20250924-112916	9/24/2025 11:39
Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanab sangat bagus	140.213.168.78-20250924-113144	9/24/2025 11:39
Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tidak ada saran	114.79.32.143-20250924-113108	9/24/2025 11:39

Nama_Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Kritik_Saran	Kode_Sesi_Survey	Tgl_Data_SKM
Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Allhamdullillah ya alloh	182.2.46.121-20250924-113233	9/24/2025 11:39
Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	mdh" lebih baik lagi	114.79.46.208-20250924-112910	9/24/2025 11:39
Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	4	4	3	3	3	4	4	3	3	Semoga bisa selalu melaksanakan kewajibannya dengan profesional dan tanggung jawab	114.79.47.216-20250924-112849	9/24/2025 11:39
Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Lanjutkan dan kembangkqn	182.2.50.182-20250924-112930	9/24/2025 11:37
Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	area timur terlalu terbuka sehingga jika ada hujan air masuk ke area pasar, apalagi di tempat tersebut kita meletakkan frezer yang kemungkinan bisa menyebabkan kebocoran arus listrik	114.10.20.15-20250924-112822	9/24/2025 11:37
Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	area timur terlalu terbuka sehingga jika ada hujan air masuk ke area pasar, apalagi di tempat tersebut kita meletakkan frezer yang kemungkinan bisa menyebabkan kebocoran arus listrik	114.10.20.15-20250924-112822	9/24/2025 11:36
Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	3	4	3	4	4	4	4	3	3	Jadi lebih baik lagi kedepannya	114.125.110.198-20250924-103828	9/24/2025 11:01
Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan sudah sangat baik	140.213.160.166-20250924-095627	9/24/2025 10:03
Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Untuk pelayanan, sesuai,baik,dan memuaskan	114.10.16.83-20250924-093356	9/24/2025 9:47
Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan	4	4	4	3	3	4	4	4	4	Pelayanan sangat baik	36.65.89.74-20250924-093505	9/24/2025 9:43
Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Terimakasih untuk pelayanan nya	36.65.89.74-20250924-093428	9/24/2025 9:41

Nama_Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Kritik_Saran	Kode_Sesi_Survey	Tgl_Data_SKM
Pas masuk harian dan berlangganan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan lancar baik dan ramah	114.10.125.202-20250924-082155	9/24/2025 8:29
Pas masuk harian dan berlangganan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sesuai menjalankan pekerjaan,cepat,tanggap	182.2.40.14-20250924-080447	9/24/2025 8:12
Sertifikat hasil tangkapan ikan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Cukup bermanfaat dan membantu	103.175.81.249-20250923-161048	9/23/2025 16:17
Sertifikat hasil tangkapan ikan	4	4	4	4	4	3	3	3	4	oke baik baik	36.65.90.63-20250923-161015	9/23/2025 16:16
Sertifikat kelaikan kapal perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Cepat,terbaik dan lancar	114.10.20.70-20250915-114421	9/15/2025 11:51
Sertifikat kelaikan kapal perikanan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Sangat baik dan sopan	114.10.19.167-20250911-163231	9/11/2025 16:43
Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan	4	3	4	4	4	4	4	4	4	oke baik bagus	114.10.5.2-20250903-150235	9/3/2025 15:09
Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Petugas sangat baik dalam memberikan pelayanan. Terimakasih banyak	182.2.52.34-20250902-114227	9/2/2025 11:49
Sertifikat kelaikan kapal perikanan	4	4	4	4	3	4	4	3	3	Pelabuhan udah dangkal	114.10.4.18-20250830-121000	8/30/2025 12:20
Sertifikat kelaikan kapal perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan yang ramah, memberi arahan yang mudah dipahami	114.10.17.156-20250829-091511	8/29/2025 9:21
Sertifikat kelaikan kapal perikanan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Sudah cukup baik dan memuaskan	182.2.39.124-20250825-085605	8/25/2025 9:01
Sertifikat kelaikan kapal perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Luar biasa sekaliii	140.213.162.223-20250822-161249	8/22/2025 16:19
Sertifikat kelaikan kapal perikanan	3	3	3	1	3	3	3	3	3	BAIK BAIK BAIK	36.65.92.118-20250822-153300	8/22/2025 15:40
Akun e-logbook penangkapan ikan yang teraktivasi	3	3	3	4	3	3	4	4	3	Untuk pelayanan e log book sudah sesuai dengan apa yg di publikasikan..	125.165.194.168-20250817-082958	8/17/2025 8:37
Pengesahan perjanjian kerja laut	3	3	3	3	3	3	4	3	3	Untuk pelayanan pkl sudah sangat baik	125.165.194.168-20250817-082121	8/17/2025 8:34
Persetujuan berlayar	3	3	3	4	3	4	4	3	3	Untuk pelayanan spb sudah baik	125.165.194.168-20250817-082121	8/17/2025 8:30
Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan	3	3	3	4	4	3	4	3	3	Untuk kinerja pelayanan kedatangan (stblk) sudah sangat baik	125.165.194.168-20250817-081542	8/17/2025 8:25
Persetujuan berlayar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Semoga semakin lebih baik kedepannya	115.178.238.149-20250815-152401	8/15/2025 15:29
Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	GESIT, MANTAP dan RAMAH	182.2.50.87-20250815-151643	8/15/2025 15:22

Nama_Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Kritik_Saran	Kode_Sesi_Survey	Tgl_Data_SKM
Buku pelaut awak kapal perikanan	4	4	3	4	4	4	4	4	4	Semoga permohonan penerbitan Buku Pelaut bisa untuk semua awak kapal, bukan hanya awak kapal yang sudah memiliki Sertifikat ketrampilan saja	114.10.10.11-20250815-143924	8/15/2025 14:54
Persetujuan berlayar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Semakin lancar jaya	140.213.254.154-20250815-144724	8/15/2025 14:53
Sertifikat kelaikan kapal perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Petugas pelayanan ramah, cepat dan responsif, namun penerbitan Surat Tugas terkadang lama di website	114.10.10.11-20250815-143924	8/15/2025 14:52
Akun e-logbook penangkapan ikan yang teraktivasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Petugas pelayanan ramah, cepat dan responsif	114.10.10.11-20250815-143924	8/15/2025 14:51
Pengesahan perjanjian kerja laut	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Petugas pelayanan ramah, cepat dan responsif, semoga kedepannya PKL terhubung dengan EPIT, yg mana pada saat menginput EPIT terbit form PKL bagi awak kapal yang siap untuk ditanda tangani agar efisiensi tidak isi PKL secara manual dari tanggal-nama awak-tempat tanggal lahir- alamat - dan premi yang memakan waktu karena harus input satu per satu	114.10.10.11-20250815-143924	8/15/2025 14:51
Sertifikat hasil tangkapan ikan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan petugas cepat, ramah dan responsif, penerbitan SHTI diperlukan dokumen CPIB yang mana dokumen CPIB tersebut terkandala di lamanya proses penerbitan sertifikat bimtek awak kapal	114.10.10.11-20250815-143924	8/15/2025 14:48
Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan	4	4	3	4	4	4	4	4	3	Petugas pelayanan ramah, cepat dan responsif	114.10.10.11-20250815-143924	8/15/2025 14:47
Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	2	Pelayanan petugas baik, ramah, responsif, namun tarif tambat labuh yg tinggi tidak didukung oleh fasilitas yang memadai, alur keluar-masuk kolam perlu di keruk, karena pendangkalan di beberapa bagian yang menyulitkan dalam aktifitas tambat	114.10.10.11-20250815-143924	8/15/2025 14:46
Persetujuan berlayar	4	4	4	1	4	3	4	4	4	baik baik baik	114.10.10.136-20250815-143737	8/15/2025 14:43
Persetujuan berlayar	4	4	4	4	4	4	4	4	3	Petugas ramah, responsif, pelayanan cepat	114.10.10.11-20250815-143733	8/15/2025 14:43

Nama_Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Kritik_Saran	Kode_Sesi_Survey	Tgl_Data_SKM
Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan	4	4	4	3	4	4	4	4	4	Pelayanannya sangat bagus	36.65.85.141-20250815-142543	8/15/2025 14:32
Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Semoga kedepannya maki lancar jaya	140.213.160.124-20250815-142425	8/15/2025 14:30
Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sudah sangat baik	115.178.236.80-20250815-142114	8/15/2025 14:26
Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan	4	3	3	4	3	4	4	4	4	sudah sangat baik dalam pelayanan dan informatif dalam memberikan informasi, semoga bisa dipertahankan untuk kedepannya, terima kasih	114.10.120.227-20250814-144434	8/14/2025 14:54
Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan sangat memuaskan	114.10.11.180-20250814-093515	8/14/2025 9:41
Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan	4	4	3	4	3	4	4	4	4	Pelayanan sangat memuaskan	36.65.85.141-20250814-093502	8/14/2025 9:40
Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Ramah Sopan Disiplin	182.2.38.185-20250731-141452	7/31/2025 14:20
Sertifikat kelaikan kapal perikanan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Tingkat pelayanan dengan baik	36.73.34.155-20250731-091620	7/31/2025 9:33
Sertifikat kelaikan kapal perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sebaiknya diberi no pengurus kapal	114.10.5.64-20250730-150348	7/30/2025 15:13
Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Musola kurang air bersih	114.10.9.204-20250722-141328	7/22/2025 14:23
Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	3	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan sangat baik,berkerjasama dengan pengguna jasa baik,tingkatan kualitas pelayanan	114.10.20.148-20250722-141331	7/22/2025 14:23
Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Air kran musholah,	114.10.122.72-20250722-141401	7/22/2025 14:22
Sertifikat kelaikan kapal perikanan	4	4	4	4	4	4	4	3	3	Sudah sangat baik dan cekatan	114.79.51.255-20250721-110600	7/21/2025 11:14
Listrik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tarif sudah sangat sesuai	114.10.21.183-20250718-141154	7/18/2025 14:17
Listrik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan sudah sangat memuaskan	36.73.34.93-20250718-140707	7/18/2025 14:12

Nama_Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Kritik_Saran	Kode_Sesi_Survey	Tgl_Data_SKM
Listrik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Lebih ditingkatkan lagi	36.73.34.93-20250718-135938	7/18/2025 14:05
Sertifikat hasil tangkapan ikan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Mantap terus melayani dengan baik	36.73.32.253-20250718-122746	7/18/2025 12:33
Sertifikat kelaikan kapal perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Good Job Semua	182.2.36.197-20250718-115102	7/18/2025 11:55
Sertifikat kelaikan kapal perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sudah sangat baik	182.2.83.65-20250718-114301	7/18/2025 11:47
Sertifikat kelaikan kapal perikanan	4	4	4	4	4	4	4	3	4	Udah cekatan dan tingkatkan terus	182.2.36.67-20250718-105554	7/18/2025 11:03
Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan sangat baik	115.178.237.250-20250715-113337	7/15/2025 11:39
Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Semakin lebih baik lagi	182.2.50.5-20250714-111729	7/14/2025 11:21
Sertifikat kelaikan kapal perikanan	3	3	4	4	4	4	4	4	3	Lebih ditingkatkan lagi	182.2.44.207-20250711-145036	7/11/2025 14:55
Sertifikat kelaikan kapal perikanan	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Cepatan lugas santun	114.10.122.85-20250711-112021	7/11/2025 11:25
Pas masuk harian dan berlangganan	4	4	4	3	3	3	4	3	3	Semoga petugas tetap bisa melayani dengan baik dan optimal	114.79.47.151-20250709-172149	7/9/2025 17:42
Listrik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tidak ada kata	182.2.46.61-20250709-143948	7/9/2025 14:44
Listrik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	sudah baik dan sangat membantu	103.186.58.22-20250709-141531	7/9/2025 14:19
Listrik	4	4	4	4	4	4	4	3	4	Pelayanan sangat baik	180.254.63.125-20250709-110252	7/9/2025 11:07
Pas masuk harian dan berlangganan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Semakin lebih baik lagi kedepannya	180.253.132.3-20250709-110106	7/9/2025 11:07
Buku pelaut awak kapal perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kalau bisa khususnya di laporan kedatangan yang STBLKK jika sudah terbit nama kapal di panggil jangan diam saja, baru dokumen bisa langsung di alihkan ke bagian yang di HPK kedatangan.	182.2.53.243-20250708-151703	7/8/2025 15:22
Pas masuk harian dan berlangganan	3	3	3	3	3	4	3	3	3	Terima kasih kkp	103.18.35.17-20250708-133629	7/8/2025 13:44
Sertifikat kelaikan kapal perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Petugas nya sangat profesional. Membantu sekali	182.2.44.18-20250704-140258	7/4/2025 14:07
Sertifikat kelaikan kapal perikanan	4	4	4	4	3	4	4	4	4	Siap dan senyum melayani kami	182.2.36.10-20250704-084630	7/4/2025 8:56

Nama_Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Kritik_Saran	Kode_Sesi_Survey	Tgl_Data_SKM
Sertifikat kelaikan kapal perikanan	3	3	3	3	3	3	4	3	3	Sudah cukup oke	182.2.44.176-20250702-162411	7/2/2025 16:28
Sertifikat kelaikan kapal perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Petugas sangat profesional berdedikasi. Pelayanan sangat baik. Terimakasih banyak	36.73.35.28-20250702-113847	7/2/2025 11:44
Penggunaan transportasi kendaraan/pengangkutan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan sangat baik	182.2.40.224-20250701-110859	7/1/2025 11:13

3. Dokumentasi Hasil Pelaksanaan SKM